



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**

RPJPD

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH**

2025 - 2045

KABUPATEN SIGI





SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-
2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang..
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ~~nasional, provinsi, dan kabupaten/kota~~ ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kabupaten/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
18. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Bupati adalah Bupati Sigi.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJPD disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) RPJPD merupakan:
 - a. penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Kabupaten; dan
 - b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggaraan Pembangunan Daerah Jangka Panjang;
- b. menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah 20 tahun mendatang; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 1. penyusunan RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 2. penyusunan Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I Pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. hubungan RPJPD dengan Dokumen lainnya;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. sistematika penulisan.
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, meliputi:
 1. aspek geografi dan demografi;
 2. aspek kesejahteraan masyarakat;
 3. aspek daya saing Daerah;
 4. aspek pelayanan umum;
 5. evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025;

6. tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan
 7. pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi:
 1. permasalahan pembangunan; dan
 2. isu strategis.
 - d. Bab IV Visi dan Misi, meliputi:
 1. visi daerah Tahun 2025-2045; dan
 2. misi daerah Tahun 2025-2045.
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, meliputi:
 1. arah kebijakan daerah; dan
 2. sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
 - f. Bab VI Penutup
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

RPJPD menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 133,08/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota/provinsi merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen perencanaan ini bersifat makro yang memuat permasalahan dan isu strategis yang terkait langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB/SDGs, visi misi 20 tahun dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, yang proses penyusunannya dilakukan secara teknokratik dalam rancangan awal dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di daerah.

RPJP daerah merupakan landasan operasional perencanaan pembangunan di daerah dalam suatu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan RPJPD kabupaten/kota harus mengacu pada RPJPD provinsi dan RPJP nasional, disamping harus pula memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud rancangan teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun Pemerintah Daerah dengan pendekatan teknokratik.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 150

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izinNya, pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Sigi melalui Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sigi ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah. RPJPD tersebut akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sigi selama 20 tahun mendatang. Arah kebijakan tersebut menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat luas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VII
LAMPIRAN	1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.....	1
NOMOR 8 TAHUN 2024	1
TENTANG	1
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2045	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1. Dasar Hukum	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	9
1.4. Maksud dan Tujuan	16
1.5. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	21
1.1. Aspek Geografi dan Demografi	21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	46
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	55
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	83
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	83
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	91
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	104
2.8. Integrasi KLHS RPJPD dan RPJPD tahun 2025-2045	118
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	235
3.1. Permasalahan Pembangunan.....	235
3.2. Isu Strategis	250
BAB IV VISI DAN MISI.....	268
4.1. Visi	268

4.2.	Misi RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045.....	281
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN.....		297
5.1.	Arah Kebijakan Daerah.....	297
5.2.	Sasaran Pokok	322
5.3.	Upaya transformasi super prioritas (Game changers).....	314
BAB VI PENUTUP.....		316
6.1.	Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan Pembangunan	316
6.2.	Pendanaan Dan Penganggaran.....	317
6.3.	Kerangka Pengendalian.....	318
6.4.	Sistem Insentif.....	319
6.5.	Manajemen Resiko	320
6.6.	Mekanisme Perubahan.....	324

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak ke Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2022	22
Tabel 2.2	Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Sigi Tahun 2022	32
Tabel 2.3	Potensi Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sigi Tahun 2022	33
Tabel 2.4	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sigi Tahun 2022	35
Tabel 2.5	Populasi ternak menurut Kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Sigi Tahun 2022	36
Tabel 2.6	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sigi	42
Tabel 2.7	Deskripsi dan Karakteristik Fisik Satuan Ekoregion Wilayah Ekologis Kabupaten Sigi	45
Tabel 2.8	Kondisi Formasi Geologi Kabupaten Sigi	46
Tabel 2.9	Tingkat Risiko dan Kecenderungan Bencana Kabupaten Sigi	48
Tabel 2.10	Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2010-2022	49
Tabel 2.11	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2010, 2015, 2020, 2021, 2022	51
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 2.13	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010, 2015, 2020, 2021, 2022	54
Tabel 2.14	NTP Kabupaten Sigi Tahun 2016 – 2020	55
Tabel 2.15	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022	56
Tabel 2.16	Gini Rasio Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2018 – 2022	58
Tabel 2.17	Presentase penduduk miskin Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2018 – 2022	59
Tabel 2.18	Garis Kemiskinan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2018 – 2022	60
Tabel 2.19	Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kab. Sigi Tahun 2012 – 2022	62
Tabel 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022	63

Tabel 2.21	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha	63
Tabel 2.22	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2018-2022	65
Tabel 2.23	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2018 2022	66
Tabel 2.24	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2018-2022	67
Tabel 2.25	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Atas Dasar Harga (ADH) Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2018-2022	68
Tabel 2.26	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022	69
Tabel 2.27	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2018–2022	71
Tabel 2.28	Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan 2010) Kabupaten Sigi (Milyar)	72
Tabel 2.29	Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku) Kabupaten Sigi (Milyar)	73
Tabel 2.30	Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk 2010)	75
Tabel 2.31	PDRB Per Kapita ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022 (Ribu)	77
Tabel 2.32	Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2017-2020 Kabupaten Sigi	79
Tabel 2.33	Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2020 Kabupaten Sigi	80
Tabel 2.34	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022	81
Tabel 2.35	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022	82
Tabel 2.36	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022	83

Tabel 2.37	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2020	85
Tabel 2.38	Rasio Ketergantungan Tua dan Muda Tahun 2017-2020 Kabupaten Sigi	87
Tabel 2.39	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2020 Kabupaten Sigi	88
Tabel 2.40	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2019	89
Tabel 2.41	Realisasi indikator urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2022 .	90
Tabel 2.42	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020-2022	99
Tabel 2.43	Proyeksi Jumlah penduduk Kabupaten Sigi tahun 2025-2045	100
Tabel 2.44	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045	101
Tabel 2.45	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sigi Tahun 2025 sd 2045	103
Tabel 2.46	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2025 sd 2045	194
Tabel 2.47	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Sigi Tahun 2025 Sd 2045	201
Tabel 2.48	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal Kabupaten Sigi	213
Tabel 2.49	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sigi	231
Tabel 2.50	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sigi	108
Tabel 2.51	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	109
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Sigi Tahun 2010-2022	236
Tabel 4.1	Penyusunan Penjelasan Visi	277
Tabel 4.2	Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045...	280
Tabel 4.3	Penyelarasan 8 Misi Pembangunan RPJPD ke dalam Misi Pembangunan Kabupaten Sigi	283
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2045	301
Tabel 5.2	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045	324
Tabel 5.3	Keterkaitan Indikator Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi	330

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Integrasi Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.....	18
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi Periode 2025-2045.....	20
Gambar 1.3	Keterkaitan Dokumen RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterkaitan Dokumen RPJPD dan Dokumen KLHS RPJPD.....	20
Gambar 1.4	Keterkaitan Dokumen RPJPD dan Dokumen KLHS RPJPD.....	21
Gambar 2.1	Batas Wilayah Administasi Kabupaten Sigi.....	30
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Sigi.....	30
Gambar 2.3	Potensi Wisata Kabupaten Sigi.....	40
Gambar 2.4	Peta Sesar Palu-Koro.....	44
Gambar 4.1	Keterkaitan RPJMN dengan Dokumen Rencana Lainnya...	272
Gambar 6.1	Proses Manajemen Risiko.....	320
Gambar 6.2	Hubungan antara Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko.....	323

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri atas Daerah Kabupaten/Kota, dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten Sigi menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Sigi wajib menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, yang terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Pembangunan daerah berdasarkan prinsip otonomi yang diberikan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Kabupaten atau Kota mengandung kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dengan perimbangan yang proporsional antara pusat dan daerah untuk

pencapaian pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Pembangunan daerah Kabupaten Sigi merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah juga bagian integral dari pembangunan nasional.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RPJPD Kabupaten/Kota atau Provinsi merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan kesepakatan atau komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi untuk setiap jangka waktu 5 tahun.

Kabupaten Sigi sejak mekar dari Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah Umurnya telah mencapai 16 tahun. Kabupaten Sigi telah tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten dengan karakteristik, topografi, sosial, ekonomi, politik, budaya, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang khas. Diantara kekhasannya sekitar 76 persen wilayahnya berada atau berhimpitan dengan Kawasan Hutan

Lindung Taman Nasional Lore Lindu, sehingga dari 24 persen sisanya dimanfaatkan untuk hal-hal produktif oleh masyarakat setempat. Basis pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi berasal dari area seluas 24 persen.

Desa di wilayah Sigi terutama di wilayah pegunungan dan lereng, menghadapi Persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini, seperti masalah transportasi di internal desa, antar desa, antar kecamatan, dan ke Ibu kota Kabupaten Sigi.

Kabupaten Sigi merupakan daerah yang tidak memiliki laut kecuali Danau Lindu. Karakteristik alam Sigi, turut membentuk perilaku masyarakatnya. Kabupaten Sigi dengan karakteristik bergunung, lereng, dengan perilaku adat budaya setempat dapat menjadi objek wisata berbasis kearifan lokal, yang dapat dikembangkan di daerah ini. Untuk membangun Kabupaten Sigi yang berbasis budaya lokal agar lebih maju dari aspek sosial, ekonomi, dan politik, di butuhkan kepedulian dan keberpihakan mulai dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, sampai Pusat.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sigi berdasarkan data kependudukan sebesar 2 persen pertahun. Meskipun pertambahan jumlah penduduk lebih cepat dibanding pertambahan lahan untuk permukiman. Sehingga lahan pertanian di Kabupaten Sigi akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan permukiman. Kabupaten Sigi kedepannya dituntut untuk lebih mandiri dalam menghadapi kebutuhan pangan dan perkembangan teknologi pertanian sebagai bentuk antisipasi terhadap pertambahan jumlah penduduk.

Sepatutnya Kabupaten Sigi 20 tahun ke depan periode 2025-2045, mengangkat derajat masyarakatnya menjadi lebih Sejahtera dan berkemajuan, dengan cara mendorong daerahnya keluar dari keterisolasian arus transportasi, agar hasil produksi pertanian dan sektor lainnya terdistribusi ke seluruh wilayah di negeri ini, termasuk ke Ibu Kota Nusantara, dan tidak terbatas hanya dengan Kota Palu. Sebaliknya dengan terbukanya keterisolasian tersebut dapat mendatangkan wisatawan lokal, regional, maupun mancanegara. Untuk mewujudkannya, Kabupaten Sigi mencatat dalam Dokumen RPJPD Periode 2025-2045, menjadi daerah terbuka dan tidak terisolasi akibat keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan membangun, Kabupaten Sigi Menjadi Kabupaten Trans Lintas Tengah, melalui jalur mulai dari Palu-Kulawi-Gimpu-Peana-Kalamanta-Seko-Masamba.

Kabupaten Sigi ke depan menjadi penting mengembangkan Pertanian berbasis pariwisata, sekaligus mendukung dan mendorong Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten Agropolitan yang menjadikan Sektor pertanian maju dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai harapan yang dibutuhkan daerah ini ke depan, dokumen RPJPD 2025-2045 Kabupaten Sigi harus memprioritaskan hal-hal berikut:

- a. meningkatnya Akses Terhadap Kebutuhan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan);
- b. pengentasan Kemiskinan dan penanganan *Stunting*;
- c. peningkatan Kualitas SDM dan Reformasi Birokrasi;

- d. pengurangan resiko bencana dan pemulihan ekonomi pascabencana;
- e. ketahanan Energi dan Pangan;
- f. perlindungan Sosial (konflik dan Kriminalitas); dan
- g. percepatan Pembangunan Infrastruktur
- h. Pengembangan Wilayah (Pertanian berbasis kearifan lokal, Pariwisata, dan Ekonomi, dan Bonus Demografi).

1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

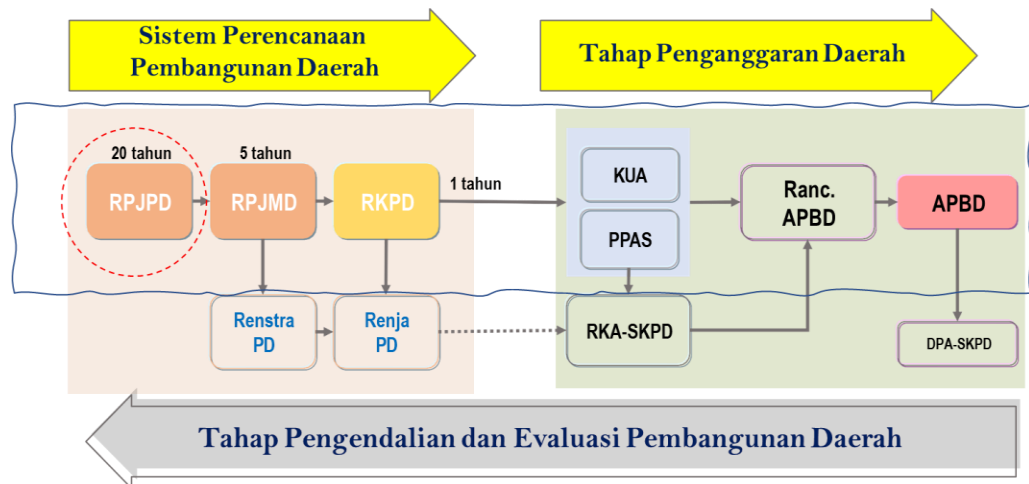
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125).

15.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan ini bersifat makro yang memuat permasalahan dan Isu Strategis yang terkait langsung dengan Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, Visi Misi 20 tahun dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang proses penyusunannya dilakukan secara Teknokratik dalam Rancangan Awal dan Partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di daerah. RPJPD merupakan landasan operasional perencanaan pembangunan di daerah dalam suatu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJPD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

RPJPD memuat tahapan periodisasi pembangunan setiap lima tahun yang harus menjadi dasar untuk siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon kepala daerah dalam membuat visi dan misi yang akan disampaikan pada kampanye periodisasi politik. Diharapkan melalui dokumen RPJPD pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan akan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematis dan terarah berdasarkan prioritas pembangunan. Muatan RPJPD akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik Perencanaan Jangka Menengah Daerah maupun Perencanaan Jangka Pendek dengan mengintegrasikan muatan dokumen KLHS. Untuk memastikan penyusunan dokumen RPJPD dapat menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini, serta generasi masa depan, dengan memperhatikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian disinergikan dengan tahapan penganggaran daerah, sehingga apa yang direncanakan dapat sejalan dengan rencana penganggaran daerah. Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada matriks berikut.



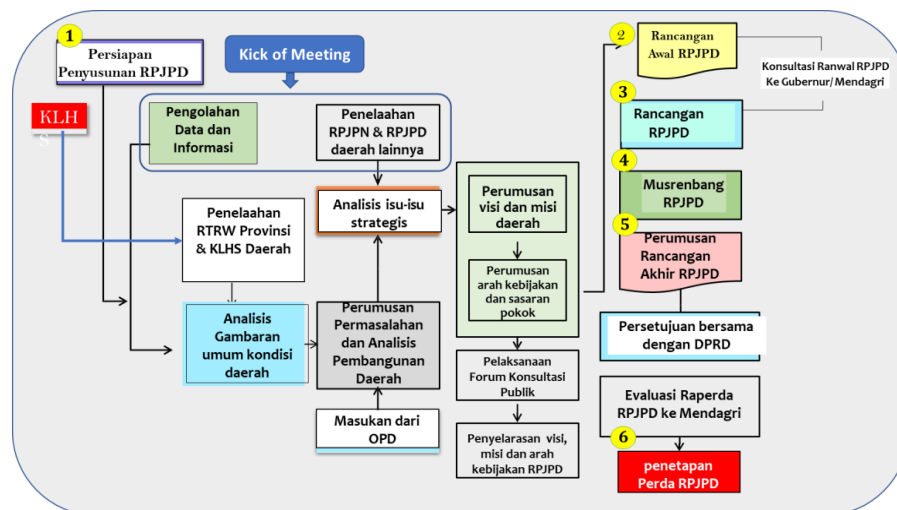
Gambar 1.1
Integrasi Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sigi, yang memuat kondisi umum, visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Sigi. Dokumen perencanaan ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sigi, sebagai bentuk usaha merancang masa depan generasi saat ini untuk generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Tahapan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi sebagai berikut:

1. menyiapkan rancangan awal RPJPD, untuk mendapat gambaran awal dari permasalahan dan isu strategis daerah, gagasan visi misi dan arah pembangunan daerah.
2. rumusan rancangan awal adalah hasil masukkan konsultasi publik dan pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dan RPJPD;
3. konsultasi ke Provinsi terhadap rancangan awal;
4. perumusan rancangan RPJPD hasil fasilitasi/masukan setelah konsultasi ke Provinsi;

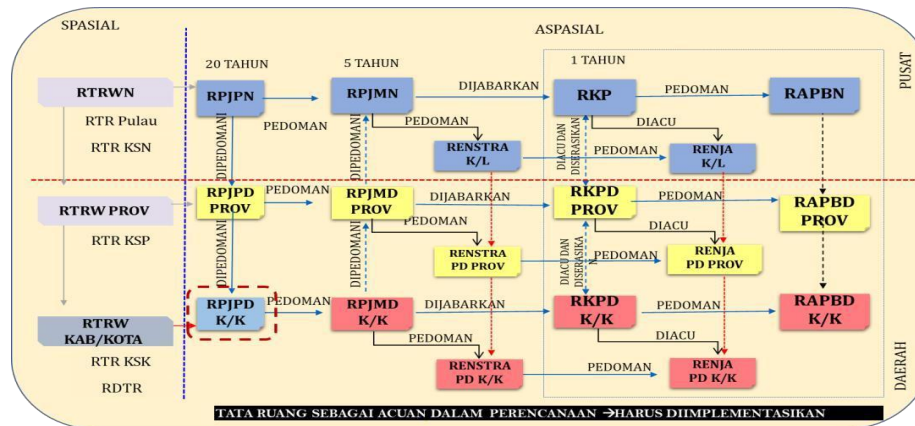
5. musyawarah perencanaan pembangunan daerah jangka panjang daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan RPJPD;
6. penyusunan rancangan akhir RPJPD, yang dalam hal ini termasuk seluruh masukan dan komitmen hasil musrenbangda jangka panjang daerah menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan RPJPD;
7. penetapan peraturan Kabupaten Sigi tentang RPJPD, di bawah koordinasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. rancangan akhir RPJPD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah Kabupaten Sigi untuk dibahas bersama dan diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi.



Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi Periode 2025-2045

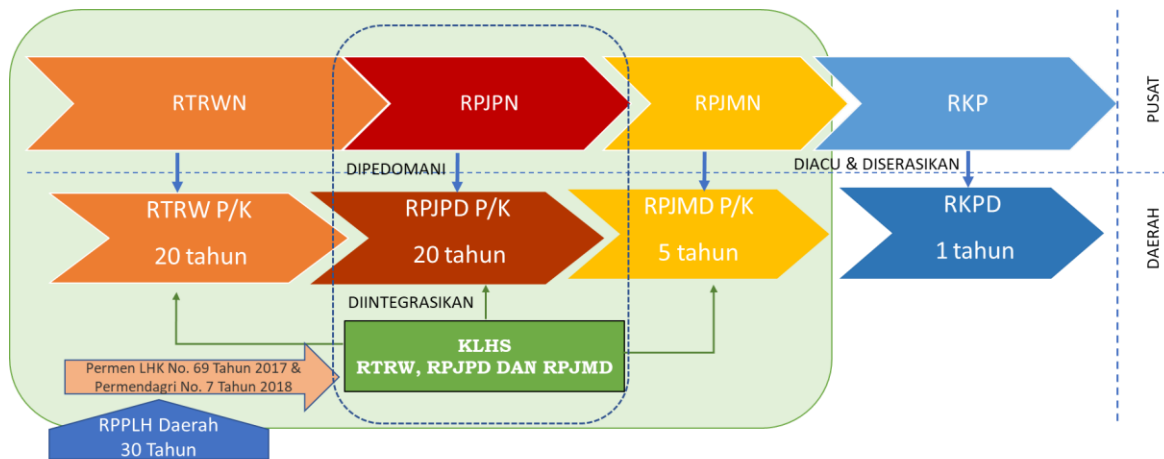
RPJPD Kabupaten Sigi mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kabupaten dalam jangka panjang, yang

merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Sigi dengan tetap memperhatikan arahan RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Dokumen Perencanaan lainnya yang berhubungan dengan RPJPD Kabupaten Sigi adalah RTRW Kabupaten Sigi, RPJMD Kabupaten Sigi, RKPD serta Renja Perangkat Daerah.



Gambar 1.3
Keterkaitan Dokumen RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Pembangunan daerah termasuk rencana jangka Panjang daerah Kabupaten Sigi, harus sinergi dan sinkron dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Sigi. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Juga perencanaan harus konsisten dimana apa yang direncanakan disiapkan anggarannya atas dasar perencanaan.



Gambar 1.4
Keterkaitan Dokumen RPJPD dan Dokumen KLHS RPJPD

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini, serta generasi masa depan, pemerintah Kabupaten Sigi menyusun RPJPD dan RPJMD dengan memperhatikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu mengintegrasikan muatan dokumen KLHS.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat KLHS guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan,

Rencana dan Program telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 telah mengatur pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara umum, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memberikan Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, Pemerintah dan Pemda wajib melakukan KLHS dalam penyusunan evaluasi terhadap RTRW beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJPD baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Kota; serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup. Penyelenggaraan KLHS RPJPD. tertuang dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mekanisme pengintegrasian oleh Tim penyusun RPJPD dan Tim KLHS RPJPD Kabupaten Sigi melakukan telaah untuk memastikan laporan KLHS RPJPD termuat dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045. Proses telaah dilaksanakan menyesuaikan dengan proses dan tahapan penyusunan atau validasi KLHS RPJPD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun sampai Tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan untuk seluruh komponen di Kabupaten Sigi (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045.

Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan melalui mekanisme FGD, Konsultasi Publik maupun penghimpunan aspirasi melalui survei atau desain kuesioner, sehingga upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat berjalan sinergis, koordinatif, dan saling

melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap tindak menuju visi Kabupaten Sigi 2045.

1.4.2 Tujuan

Menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Sigi yang sinergis, koordinatif, dan sustainable dalam pelaksanaannya, serta terarah untuk menuju Masyarakat Kabupaten Sigi yang diinginkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan

1.5. Sistematika Penulisan

Meliputi Bab 1 sampai dengan Bab 6, yang rician sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Memuat peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.2. Demografi

Memuat karakteristik demografi daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045

Memuat sekurang-kurangnya:

3.1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan

faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia kesenjangan antara realita atau capaian.

3.2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar

Bab 4 Visi Dan Misi Daerah

Memuat sekurang-kurangnya:

4.1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

4. 2. Misi daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat sekurang-kurangnya:

5.1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik.

Bab VI Penutup

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sigi digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi pada jangka Panjang. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Aspek Geografi diuraikan mengenai peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

A. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Secara geografis letak Kabupaten Sigi berada antara 0°51'24.02" sampai 2°3'20.24" Lintang Selatan dan 119°38'46.7" sampai 120°22'12.07" Bujur Timur dan luas wilayah seluas 521.818,56 Ha atau sekitar 8,48 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

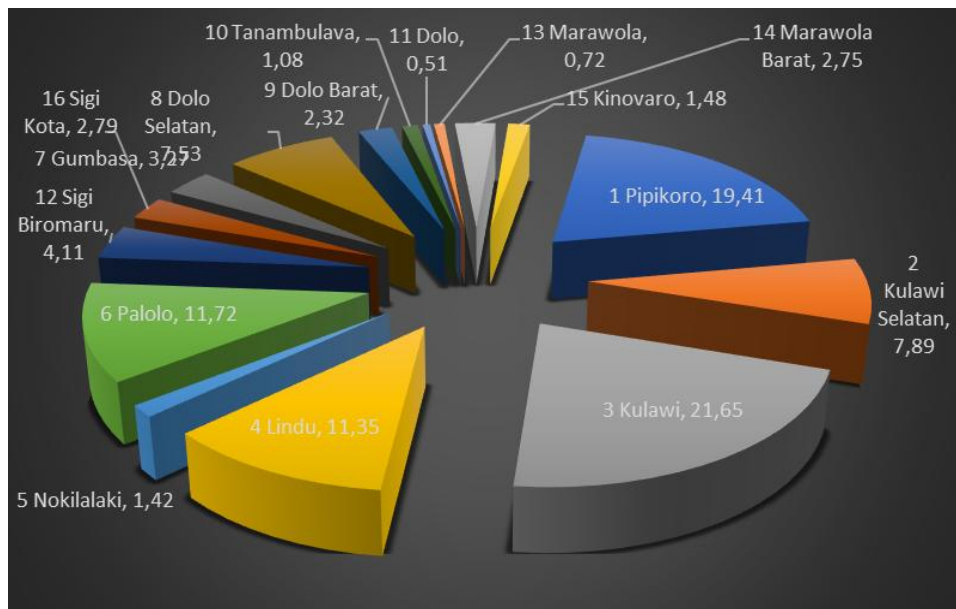
Sebelah Utara	:	Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
Sebelah Barat	:	Kabupaten Donggala, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
Sebelah Timur	:	Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Sigi merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 16 Kecamatan, 177 desa dan 1 Unit Permukiman Transmigrasi. dibentuk. Berikut adalah luas wilayah administratif masing-masing kecamatan:

*Tabel 2.1
Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jarak ke Ibukota
Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2022*

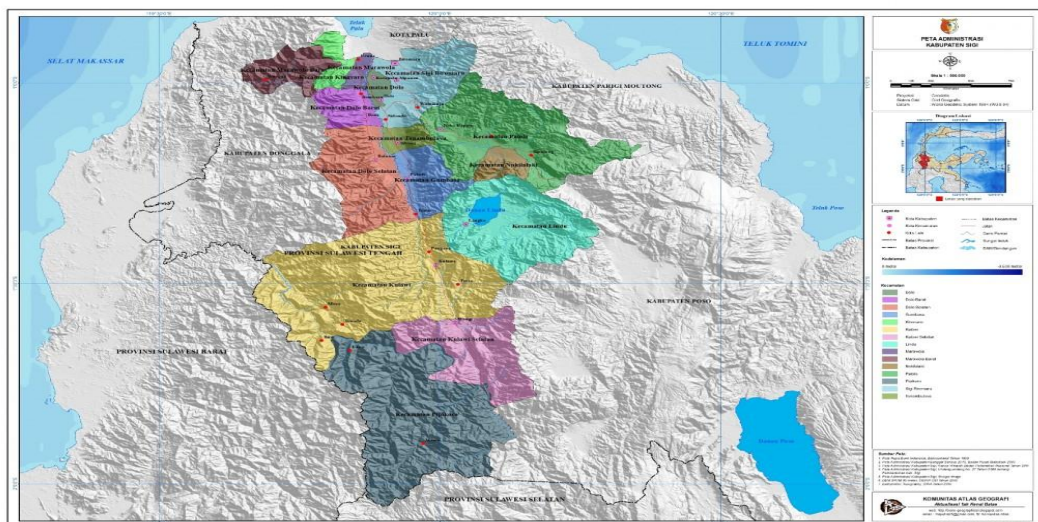
No.	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota kecamatan	Jml Desa	Jarak dari ibukota Kab. (Km)
1	Pipikoro	101.264	19,41	Peana	19	123
2	Kulawi Selatan	41.158	7,89	Lawua	12	96
3	Kulawi	112.964	21,65	Bolapapu	16	62
4	Lindu	59.225	11,35	Tomado	5	89
5	Nokilalaki	7.397	1,42	Kamarora A	5	35
6	Palolo	61.152	11,72	Makmur	21	25
7	Gumbasa	17.054	3,27	Pakuli	7	32
8	Dolo Selatan	39.296	7,53	Baluase	12	12
9	Dolo Barat	12.092	2,32	Kaleke	12	7
10	Tanambulava	5.644	1,08	Sibalaya utara	5	17
11	Dolo	2.683	0,51	Kotapulu	10	7
12	Sigi Biromaru	21.448	4,11	Mpanau	10	14
13	Marawola	3.779	0,72	Binangga	11	18
14	Marawola Barat	14.376	2,75	Dombu	12	33
15	Kinovaro	7.722	1,48	Porame	10	20
16	Sigi Kota	14.564	2,79	Bora	10	0
		521.818	100,00		177	-

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Sigi Tahun 2021-2041



Gambar 2.1
Luas Per Kecamatan Wilayah Administasi Kabupaten Sigi

Untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah peta administrasi Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Sigi

B. Potensi Sumber Daya Alam

Komoditi sumber daya alam di Kabupaten memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan PDRB di Kabupaten Sigi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu pola perkembangan pertanian, peternakan maupun perkebunan yang diadopsi adalah pola yang berbudaya industri dengan orientasi pasar dalam rangka pengembangan industri yang berbasis sumber daya lokal.

Sumber daya perkebunan yang dikembangkan terdiri dari tanaman produktif seperti kakao, kelapa, cengkeh dan tanaman lainnya. Lahan pertanian di Kabupaten Sigi seluas $\pm 39.399\text{Ha}$. Komoditas peternakan yang dapat dikembangkan adalah : sapi dan kambing.. Bahan tambang yang terkandung dalam kekayaan alam Kabupaten Sigi, antara lain berupa emas, pasir dan batu, granit, andesit, dasit, basalt, lempung dan batu gamping. Dari beberapa bahan tambang yang tersedia tersebut, sebahagian kecil yang dimanfaatkan berupa galian C, sedangkan sebahagian besar masih merupakan potensi yang memerlukan promosi untuk menarik minat investor.

Selain sumber daya alam di Kabupaten Sigi terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk pembangunan, yaitu :

1. sungai yang dapat dipergunakan untuk sumber bersih, pembangkit listrik, irigasi dan perikanan. Sungai di wilayah Sigi yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pasokan ke pembangkit listrik tenaga air adalah Sungai Gumbasa, Sungai Lariang; dan
2. danau yang dapat digunakan untuk perikanan, objek wisata dan pembangkit listrik. Danau yang layak untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Sigi adalah Danau Lindu.

Kabupaten Sigi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas khususnya :

a. Pertanian

Kabupaten Sigi adalah wilayah pertanian yang potensial tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pembentukan Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi dan memiliki kecenderungan pertumbuhan positif. Lahan pertanian di Kabupaten Sigi seluas ± 39.399 Ha dan dengan lahan seluas tersebut potensi lahan pertanian perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan hasil produksi terutama tanaman pangan. Sub sektor yang paling besar kontribusinya dalam sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan. Komoditi yang termasuk dalam sub sektor ini adalah padi dan palawija.

Tabel 2.2
Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Sigi Tahun 2022

Tanaman Pangan	Hasil Produksi (ton)
Padi	64.949,47
Jagung	56.173
Kedelai	175
Kabupaten Sigi	121.297,47

Sumber: Kabupaten Sigi dalam Angka 2023, diolah kembali

Pertanian di Kabupaten Sigi terbagi beberapa komoditi yaitu sayuran, buah- buahan, tanaman obat dan tanaman hias. Potensi produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sigi secara terperinci tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Potensi Produksi Komoditas Pertanian di
Kabupaten Sigi Tahun 2022

Komoditas	Potensi Produksi
Sayuran dan buah semusim	Kwintal/ ha
1. Bawang Daun	482/ 24
2. Bawang Merah	5.680/ 199
3. Bawang Putih	25/ 4
4. Bayam	4.258/ 71
5. Buncis	165/ 7
6. Cabai Besar	118/ 20
7. Cabai Rawit	9.279/ 62
8. Cabai Keriting	3.458/ 487
9. Kacang Panjang	7.496/ 110
10.Kangkung	5.608/ 79
11.Kembang Kol	268/ 7
12.Ketimun	66.370/ 188
13.Kubis	89/ 5
14.Labu Siam	340/ 10
15.Petai	1.428/ 87
16.Terong	111.206/ 296
17.Tomato	59.839/ 347
18.Semangka	319/ 18
Tanaman Biofarmaka	Kg/ m ²
1. Jahe	3.967/ 4.315
2. Kencur	866/ 300
3. Kunyit	1.050/ 1.150
4. Laos/ Lengkuas	861/ 810
5. Lempuyang	450/ 250
6. Temulawak	800/ 400
7. Laos	861/ 810
Tanaman Hias	Tangkai/ m ²
1. Anggrek	1.629/ 549
2. Mawar	195/ 27
3. Sedap Malam	25/ 6

Sumber: Kabupaten Sigi dalam Angka 2023, KLHS RPJPD, diolah kembali

Secara umum potensi pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Sigi adalah tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura di Kabupaten Sigi didominasi oleh sayuran semusim dengan hasil tertinggi yaitu Terong yang mencapai 111.206 kwintal, sedangkan untuk hortikultura buah semusim yaitu hanya buah semangka dengan hasil produksi 319 kwintal di Tahun 2022. Dalam pengembangan pertanian Kabupaten Sigi ke depan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha pertanian terpadu, pengembangan sistem pertanian organik dan sistem usaha agribisnis, meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang berdaya saing berbasis agribisnis untuk memenuhi kebutuhan pangan dan produk di dalam negeri dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan pangan, serta memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan peluang ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan tangguh, serta memberdayakan dan meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha agribisnis untuk mampu mengakses teknologi, permodalan dan informasi pasar serta pengembangan kelembagaan petani.

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan salah satu komoditas andalan di Kabupaten Sigi. Pengembangan kawasan perkebunan memiliki arti penting bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, mengingat kontribusi sub-sektor perkebunan yang cukup berarti dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, serta fungsi perlindungan terhadap lingkungan. Perkebunan di Kabupaten Sigi terbagi menjadi beberapa komoditi yaitu kelapa, kopi, dan kakao. Komoditas Kakao menjadi tanaman perkebunan dengan produksi terbanyak di Kabupaten Sigi. Komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Sigi secara terperinci tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di
Kabupaten Sigi Tahun 2022

Kecamatan	Komoditas (Ton)		
	Kelapa	Kopi	Kakao
Pipikoro	-	160.089	1.174.125
Kulawi Selatan	43.828	-	854.406
Kulawi	70.032	224.674	2.321.310
Lindu	-	89.084	630.806
Nokilalaki	40.630	-	15.472
Palolo	59.634	11.975	8.925.798
Gumbasa	388.884	-	837.697
Dolo Selatan	1.050.447	-	1.348.205
Dolo Barat	211.046	-	404.050
Tanambulava	497.596	-	699.204
Dolo	319.530	-	153.755
Sigi Biromaru	115.244	-	57.183
Marawola	52.642	-	53.218
Marawola Barat	41.043	-	1.981.531
Kinovaro	-	14.178	49.240
Sigi Kota	-	-	-
Kabupaten Sigi	3.030.000	500.000	19.506.000

Sumber: Kabupaten Sigi dalam Angka 2023, KLHS RPJPD, diolah kembali

Berdasarkan data statistik BPS pada Tahun 2022 produksi Kakao mencapai 19.506.000 ton dengan wilayah penghasil terbesar berada di Kecamatan Palolo mencapai 8.925.798 ton. Selain kakao, Kabupaten Sigi juga merupakan tanaman penghasil kelapa yang jumlahnya cukup banyak yaitu 3.030.000 ton. Produksi kelapa terbesar di kecamatan Dolo Selatan dengan total produksi 1.050.447 ton.

c. Peternakan

Populasi ternak merupakan salah satu indikator yang mendapat pertimbangan pada suatu daerah, demikian pula Kabupaten Sigi peningkatan populasi menjadi pokok tujuan dalam upaya pengembangan peternakan. Peternakan termasuk sektor usaha yang dijalankan masyarakat Kabupaten Sigi dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Tabel 2.5
Populasi ternak menurut Kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Sigi
Tahun 2022

Kecamatan	Populasi (Ekor)									
	Ternak						Unggas			
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Pipikoro	226			32		895	9.333			537
Kulawi Selatan	788	76				2.217	5.156			1.820
Kulawi	1.178		168	111		2.772	4.921			725
Lindu	126	17		14		895	9.333			532
Nokilalaki	125	576		14		1.109	5.608			487
Palolo	1.060			191		20.034	13.854			3.400
Gumbasa	3.475	16	2	818		1.550	4.692			730

Kecamatan	Populasi (Ekor)									
	Ternak						Unggas			
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Dolo Selatan	6.157			1.527	3	756	5.619	76		239
Dolo Barat	5.587			1.514		495	3.207	18.000	3.000	95
Tanambulava	3.096			1.495		5	7.574		4.000	295
Dolo	4.202		10	893		610	929	55.000	9.100	361
Sigi Biromaru	4.943		12	3.989	355	9.325	17.911	10.672	45.000	720
Marawola	4.746			1.825	21	43	1.242	5.585	7.523	161
Marawola Barat	86			9		495	3.520			
Kinovaro	1.568			1.850	1.005	340	7.344	6000	11.000	215
Sigi Kota										
Kabupaten Sigi	37.363	685	192	14.282	1.384	41.811	100.243	95.333	79.623	10.327

Sumber: Kabupaten Sigi dalam Angka 2023, KLHS RPJPD, diolah kembali

Sebaran populasi ternak yang dominan dipelihara di Kabupaten Sigi masing-masing adalah ternak sapi sebanyak 37.363 ekor, kerbau 685, kuda 192, kambing 14.282 ekor, domba 1.384 ekor, dan babi 41.811 ekor. Ternak babi merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Sigi utamanya dikembangkan di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Sigi Biromaru, sementara untuk ternak sapi banyak dijumpai di Kecamatan Dolo Selatan dan Kecamatan Dolo Barat. Ternak unggas dipelihara hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi utamanya ternak ayam kampung dan ternak itik, sedangkan ayam petelur dan ayam pedaging hanya dipelihara di kecamatan yang dekat dengan ibu kota provinsi yaitu Kecamatan Biromaru, Dolo, Dolo Barat, Kinovaro, Marawola dan Tanambulava.

d. Perikanan

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Kabupaten Sigi memprioritaskan pengembangan budidaya perikanan air tawar karena daerah Kabupaten Sigi tidak memiliki wilayah laut, sehingga perlu ada peningkatan melalui prioritas budidaya air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Sigi.

Tabel 2.6
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sigi

Kecamatan	Produksi (ton)	
	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
	Perairan Umum	Kolam
Pipikoro	-	-
Kulawi Selatan	-	57
Kulawi	-	38
Lindu	87,30	15
Nokilalaki	-	93
Palolo	-	127
Gumbasa	-	33
Dolo Selatan	-	36
Dolo Barat	-	31
Tanambulava	-	27
Dolo	-	80
Sigi Biromaru	-	76
Marawola	-	7
Marawola Barat	-	-
Kinovaro	-	3
Sigi Kota	-	-
Kabupaten Sigi	87,30	623

Sumber: Kabupaten Sigi dalam Angka 2023, diolah kembali

Kawasan perikanan di Kabupaten Sigi adalah kawasan perikanan tangkap yang hanya ada di seluruh perairan danau lindu. Selain

perikanan tangkap, terdapat juga perikanan budidaya yang hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi. Jumlah produksi perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Palolo dengan hasil mencapai 127 ton. Pemerintah Kabupaten Sigi saat ini sedang mengembangkan budidaya perikanan air tawar untuk menopang pembangunan ketahanan pangan sekaligus sebagai upaya meningkatkan ekonomi warga.

e. Pariwisata Basis Alam

Pariwisata di Kabupaten Sigi merupakan sektor yang diunggulkan sebagai pilar penyangga pembangunan ekonomi daerah. Potensi alam, buatan dan budaya yang sangat beragam membuat Kabupaten Sigi menjadi salah satu tujuan wisata di Sulawesi Tengah. Posisi geografis yang diapit oleh Kota Palu sebagai pintu masuknya wisatawan melalui Bandar Udara Mutiara Sis-Aljufri dan Pelabuhan Pantoloan serta Kabupaten Donggala yang juga memiliki potensi wisata berskala internasional sangat menguntungkan bagi pengembangan wisata di Kabupaten Sigi. Namun demikian Kabupaten Sigi masih belum memiliki sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang memadai terutama dari sisi akomodasi wisata.

Adapun potensi wisata Kabupaten Sigi tersebar di 15 kecamatan ,
sebagaimana gambar berikut:

	Potensi wisata Kecamatan Dolo :	Potensi wisata Kecamatan Kulawi :	
	1. Wisata Pemancingan dan Koleksi Binatang Desa Maku	a. Wisata Budaya Kulawi Seni Tari Raego	Potensi wisata Kecamatan Tanambulava :
Potensi wisata Kecamatan Pipikoro :	2. Wisata Pemancingan Desa Pulo, Kota Tulo, dan Kababona.	b. Wisata Cagar Budaya Rumah Raja	1. Wisata Cagar Budaya Patung Batu
1. Wisata Goa Kalambu		c. Wisata Cagar Budaya Batu Lumpang	2. Wisata Alam Mata Air Bulava
2. Wisata Lumpang Batu Banasu		d. Wisata Cagar Budaya Makam Tadulako	3. Wisata Pemandian Air Panas Sibalaya
3. Wisata Arum Jerami Karawana Banasu		e. Wisata Cagar Budaya Batu Gula Merah	4. Wisata Alam Air Terjun Salu Manopo Povauua
4. Wisata Gunung 8 Bersaudara	Potensi wisata Kecamatan Dolo Selatan :	f. Wisata Alam Sungai Lonca Titik Arung Jeram	5. Wisata Alam Hutan Penyangga Pemancingan Danau Rompi
5. Wisata Air Terjun Kalamanta	1. Wisata Cagar Budaya Batu Pasambaya dan Batu Mpebere	g. Wisata Air Terjun Mataue	6. Wisata Budaya Panen, Povunja, dll
6. Wisata Air Terjun Karangana	2. Wisata Upacara Ritual Mantale	h. Wisata Cagar Budaya Batu Penduli	7. Wisata Alam Camping Ground Limpo
7. Wisata Lumpang Batu Mapahi	3. Wisata Alam Air Terjun Kaburua	i. Wisata Cagar Budaya Rumah Adat Lobo	8. Wisata Air Terjun Sibowi Ntua.
8. Wisata Pemandian Air Panas Uwekula	4. Wisata Alam Air Terjun Sipoi	j. Wisata Pemandian Air Panas.	
9. Wisata Upacara Ritual Mowunca	5. Wisata Alam Pegunungan Bawa Dolo	k. Wisata air panas karani	
10. Wisata Air Terjun Kulo Koa	6. Wisata Air Panas Vatu Tambangga	l. Wisata Jembatan Gantung Muara Sungai Lariang	Potensi wisata Kecamatan Nokilalaki :
11. Wisata Gua Kelelawar Pape.	7. Wisata Alam Air Terjun Saluki	m. Wisata muara sungai mewe	1. Wisata budaya pesta panen (Tunja)
	8. Wisata Cagar Budaya Batu Lesung Bangga		2. Wisata budaya Nompoura
	9. Wisata Cagar Budaya Kuburan Pue Bongo		3. Wisata Pemandian air panas Kadidia
	10. Wisata Alam Taman Hutan		4. Wisata Air Terjun Kamarora
Potensi wisata Kecamatan Sigi Biromaru :	11. Wisata Cagar Budaya Batu Lesung Ngata	Potensi wisata Kecamatan Kulawi Selatan:	5. Wisata Penangkaran Tarsius
1. Wisata Alam Permandian Air Panas Bora	12. Wisata Cagar Budaya Benteng Belanda	a. Wisata air panas karani	6. Wisata Alam Balai Taman Nasional
2. Wisata Balap Sirkuit Pacuan Kuda	13. Wisata Ada Pae	b. Wisata Jembatan Gantung Muara Sungai Lariang	7. Wisata alam Mountain Climbing Nokilalaki
3. Taman Makam Karajalemba	14. Wisata Air Panas Desa Pulu	c. Wisata muara sungai mewe	8. Wisata Peternakan Lebah Madu
4. Wisata Taman Purbakala Watunonju	15. Wisata Air Terjun Pulu	d. Wisata Alam Hutan Lore Lindu Desa Oparese	9. Wisata Sungai Rawa.
5. Wisata Alam Bendungan Air Tua Vuno	16. Wisata Cagar Budaya Gimba Mpoogo	e. Wisata Air terjun sungai dahanga	
6. Wisata Alam Camping Ground Paneki	17. Wisata Upacara Ritual Rego/Rano	f. Wisata Air terjun kana	
7. Wisata Bukit Soeharto	18. Wisata Air Panas Limba	g. Wisata Watu nonju	
8. Wisata Cagar Budaya Watunonju	19. Wisata Air Terjun Saponguntu	h. Wisata Air terjun huluvuwa	Potensi wisata Kecamatan Palolo :
9. Wisata Dayo Madika	20. Wisata Air Terjun Sara'a Rudi	i. Wisata air panas maima.	1. Wisata taman nasional Lore Lindu
10. Wisata Buva Bonga dan Buva langgai	21. Wisata Alam Bambu Keramat Bolowatu Mpelege		2. Wisata Alam Balai Taman Nasional Lore Lindu
11. Wisata upacara adat Barasanji	22. Wisata Cagar Budaya Batu Lesung Mpembere		3. Wisata Alam Air Terjun Berdikari
12. Wisata budaya Kesenian Raego	23. Wisata Cagar Budaya Batu Tempat Melahirkan	Potensi wisata Kecamatan Gumbasa :	4. Wisata Alam Air Terjun Petimbe
13. Wisata Kuliner Ayam Bakar Biromaru	24. Wisata Cagar Budaya Kuburan Povala	1. Wisata Alam Penangkaran Maleo	5. Wisata Alam Air Terjun Sigimpu
14. Wisata Pemancingan Kolam Ikan.	25. Wisata Alam Air Terjun Wunjala.	2. Wisata Alam Air Terjun Desa Omu	6. Wisata Cagar Budaya Luna Pelanti (Tempat Tidur Raja)
		3. Wisata Alam Taman Nasional Desa Omu	7. Wisata Alam Tracking Noki Lalaki.
		4. Wisata Alam Permandian Gumbasa	
		5. Wisata Alam Permandian Air Panas	
Potensi wisata Kecamatan Kinovaro :	Potensi wisata Kecamatan Marawola Barat :	6. Wisata Alam Air Terjun Rakuta	Potensi wisata Kecamatan Lindu :
1. Wisata Alam Hutan Lindung	1. Wisata Cagar Budaya Kuburan Keramat Tavalai	7. Wisata Alam Arum Jeram	1. Wisata Alam Air Terjun 7 Tingkat
2. Wisata Permandian Paradise	2. Wisata upacara adat Motamba	8. Wisata Alam Hutan Taman Nasional	2. Wisata budaya tarian Raego
3. Wisata Permandian Uwe Lera	3. Wisata Paralayang, Pompangonya	9. Wisata Alam Kebun Herbal	3. Wisata Alam Pulau Bola
4. Wisata alam permandian uwe manje	4. Wisata cagar budaya Vatu Mpobolo	10. Wisata Produk Kerajinan Pembuatan Kulit Kayu	4. Wisata Alam Danau Lindu
	5. Wisata Alam Kayu Palado	11. Wisata Alam Penangkaran Maleo	5. Wisata Alam Taman Nasional.
	6. Wisata Cagar Budaya Patung Batu Berbentuk Seekor Kuda	12. Wisata Cagar Budaya Mengalit Lumpang Batu	
	7. Cagar Budaya Pasargrahan Rumah Belanda.		

Gambar 2.3
Potensi Wisata Kabupaten Sigi

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan KLHS

Secara umum ekoregion adalah suatu bentang wilayah yang memiliki karakteristik khusus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa terdapat delapan pertimbangan untuk penetapan batas ekoregion, yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, ekonomi, kelembagaan masyarakat, sosial budaya, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kesamaan dinamika ekosistem menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kesamaan pada komponen biotik dan abiotik. Hal ini menyebabkan daerah tersebut memiliki kesamaan pada pola interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Kesamaan pada faktor lingkungan menunjukkan Kabupaten Sigi memiliki kondisi lingkungan yang serupa, kesamaan ini menyebabkan memiliki kesamaan pada jenis makhluk hidup yang dapat hidup di

dalamnya. Selain hal tersebut, keberadaan interaksi yang krusial menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki keterikatan antar komponennya. Hal ini menyebabkan memiliki kesatuan dan keteraturan yang khas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kabupaten Sigi memiliki sebelas jenis klasifikasi bentang lahan dengan kedalaman skala informasi 1:250.000 di dominasi oleh jenis Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam dengan luas 48,53% dan Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik dengan luas 34,26% dari total luas wilayah Kabupaten Sigi. Jenis dan distribusi luas bentang lahan Kabupaten Sigi selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.7
Deskripsi dan Karakteristik Fisik Satuan Ekoregion
Wilayah Ekologis Kabupaten Sigi

No	Bentang Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	253.186,86	48,53
2.	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	178.742,81	34,26
3.	Dataran fluvial bermaterial alluvium	22.510,90	4,31
4.	Dataran lakustrin bermaterial alluvium	17.752,65	3,40
5.	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	14.706,85	2,82
6.	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	10.090,41	1,93
7.	Lembah fluvial bermaterial aluvium	8.530,80	1,64
8.	Dataran marin berpasir bermaterial alluvium	8.260,48	1,58
9.	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	3.968,83	0,76
10.	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	2.278,88	0,44
11.	Dataran aluvial berombak bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	1.732,25	0,33
Jumlah		521.734,73	100,00

Sumber: Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2017, KLHS RPJPD diolah kembali

D. Gambaran Kebencanaan

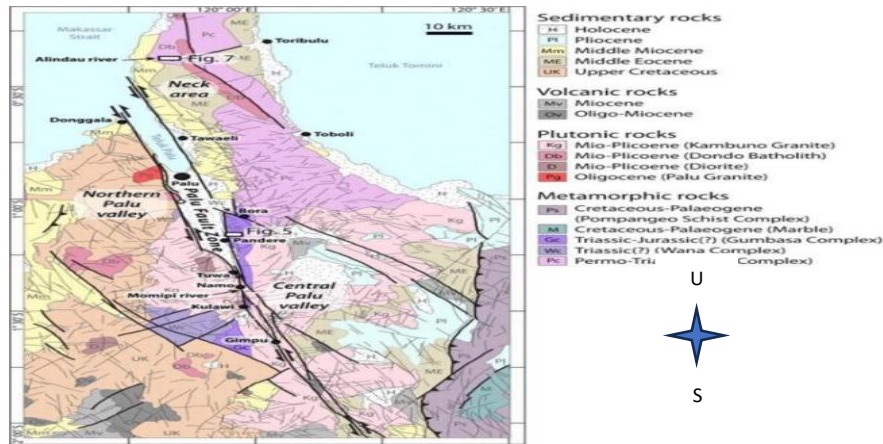
a. Ancaman Gempa Bumi

Wilayah Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah diguncang gempa besar berkekuatan magnitudo 7,4 Skala Richter, tanggal 28 September 2018. Berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer pada 27 kilometer timur laut Donggala. Gempa tersebut menyebabkan tsunami di beberapa wilayah di Palu dan Donggala.

Satu di antara sesar yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah Sesar Palu-Koro. Karena dimensinya yang besar, maka paling tepat disebut sistem atau zone Sesar Palu-Koro. Lajur sesar ini berarah hampir utara-selatan, memanjang mulai dari sekitar batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone. Panjangnya sekitar 500 km. Di darat, sesar ini mempunyai panjang sekitar 250 km, mulai dari Teluk Palu sampai pantai utara Teluk Bone, dan disekitar Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Semula sesar ini dinamakan Sesar Fossa Sarassina kemudian dinamakan Sesar Palu-Koro. Perubahan nama ini disebabkan karena lajur sesar memotong Lembah Palu dan Sungai Lariang pada Segmen Sungai Koro. Semua ahli geologi dan geofisika yang mengenal Sesar Palu-Koro sepakat bahwa sesar tersebut adalah sesar aktif, berciri sinistral atau pergeseran mengiri dengan kecepatan sekitar 14–17 mm/tahun. Pada segmen Palu - Kulawi, sesar ini berciri sesar normal dan membentuk graben yang menyebabkan Kota Palu sampai Kulawi diapit oleh 2 sesar normal. Sering pula segmen ini disebut "sistem Sesar Palu-Koro"

Ciri keberadaan sistem sesar ini adalah banyaknya dijumpai mata air panas di kedua sisi dataran antara Palu-Kulawi.



Gambar 2.4
Peta Sesar Palu-Koro

Sebagian besar gempa yang terjadi di wilayah ini, khususnya Lembah Palu dan perairan Selat Makassar merupakan kontribusi dari aktivitas sesar ini. Sejarah gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh aktivitas Sesar Palu-Koro seumur dengan awal mula terbentuk dan aktifnya sesar tersebut ribuan tahun yang lalu. Beberapa yang sempat tercatat, yang menimbulkan bencana adalah Gempa Lawe Tahun 1995, menimbulkan kerusakan lahan berupa retakan tanah, pelulukan, longsor dan kerusakan rumah terjadi di Kulawi, Gimpu, Lawe dan Kantewu; dan masih banyak lagi gempa bumi tektonik yang pernah terjadi akibat aktivitas Sesar Palu-Koro, Gempa Bora Tahun 2005, Gempa Lindu Tahun 2012, dan Gempa Pasigala Tahun 2018.

Wilayah Kabupaten Sigi dan sekitarnya merupakan suatu wilayah dataran aluvial yang memanjang berarah relatif utara-selatan dan

dibatasi oleh lereng dan punggung di kedua sisi lembah yang di tengah lembahnya mengalir Sungai Salo yang mengalir dari sebelah selatan bagian hulu dan ke arah Kota Palu bagian utara. Dataran ini didominasi satuan litologi aluvium berumur Holosen yang terdiri dari lumpur, lempung, pasir, kerikil. Kondisi geologi ini yang menjadikan Kabupaten Sigi memiliki potensi ancaman gempa bumi, Potensi gempa bumi di Kabupaten Sigi sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi atau batuan, struktur geologi, dan seismotektonik. Gambaran kondisi formasi geologi digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Kondisi Formasi Geologi Kabupaten Sigi

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Alluvium	14,621.88	2,80
2	Batuan Gunung Api Talaya	14,528.76	2,78
3	Batuan Terobosan	253,447.30	48,57
4	Danau	3,455.78	0,66
5	Endapan Danau	24,876.12	4,77
6	Formasi Lariang	5,035.53	0,96
7	Formasi Latu Mojong	124,856.72	23,93
8	Formasi Molasa Celebes Sarasin	26,904.88	5,16
9	Kompleks Batuan Metamorfosis	12,797.13	2,45
10	Kompleks Gumbasa	16,053.51	3,08
11	Kompleks Wana	25,240.96	4,84
	Kabupaten Sigi	521,818,57	

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041.

b. Ancaman Likuifaksi

Likuifaksi terjadi akibat air dalam pori batu pasir yang jenuh air, bercampur dengan material lain, jika diatasnya berupa bidang miring, maka bidang ini berperan menjadi bidang luncur yang menyebabkan longsor. Bila lapisannya tidak begitu miring, maka yang di atasnya amblas seolah tertelan oleh tanah yang bercampur

lumpur. Bencana Likuifaksi menjadi perhatian semenjak terjadi di Sulawesi Tengah. Likuifaksi terjadi setelah diguncang gempa 7,4 Skala Richter pada tanggal 28 September 2018. Likuifaksi terjadi di Desa Sibalaya Selatan dan Desa Jono Oge Kabupaten Sigi.

c. Tingkat Risiko Bencana

Risiko bencana dibentuk oleh tiga komponen yakni, Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas memiliki keterkaitan dalam menentukan tingkat risiko sebuah masyarakat. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Sigi Tahun 2020-2025 disimpulkan bahwa tingkat bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani secara partisipatif digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Tingkat Risiko dan Kecenderungan Bencana Kabupaten Sigi

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi Tingkat Kecenderungan
1	Banjir	Tinggi	Meningkat	Intesitas Kejadian Tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
2	Cuaca Ekstrem	Sedang	Meningkat	Intesitas Kejadian Tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
3	Banjir Bandang	Tinggi	Meningkat	Intesitas Kejadian Tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
4	Tanah Longsor	Tinggi	Meningkat	Intesitas Kejadian Tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
5	Kekeringan	Sedang	Tetap	
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tetap	Intesitas Kejadian Tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
7	Gempabumi	Tinggi	Tetap	Jalur Sesar Aktif
8	Likuifaksi	Sedang	Tetap	Zona Rawan Gempa

Sumber: Kajian Risiko Bencana tahun 2020, diolah Kembali.

Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 jenis ancaman bencana di Kabupaten Sigi, dimana 4 jenis bencana memiliki risiko bencana tinggi, antara lain : banjir, banjir bandang, tanah longsor gempa bumi.

Sedangkan cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan likuifaksi memiliki tingkat risiko sedang. Hasil analisis kecenderungan dan kemungkinan terjadi atas jenis ancaman bencana dengan kecenderungan meningkat secara intensitas kejadian, tinggi dan berulang, dampak besar dan luas antara lain : banjir, cuaca ekstrem, banjir bandang, tanah longsor sedangkan ancaman bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, likuifaksi dapat dikatakan tingkat kecenderungannya tetap dengan intensitas kejadian rendah serta dampak bencana yang kecil.

d. Ancaman Perubahan Iklim

Dengan kondisi wilayah yang berada tepat di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Sigi memiliki suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, sepanjang Tahun 2020, suhu udara rata-rata mencapai 27,65°C. Sedangkan rata-rata kelembaban udara pada Tahun 2020 mencapai 79,84 persen.

Selama Tahun 2020, intensitas curah hujan beragam setiap bulannya. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun mencapai 79,49 mm. Penyinaran matahari sepanjang Tahun 2020 berkisar 64,40 persen. Sementara itu, arah angin terbanyak selama Tahun 2020 yaitu dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar 1,87 knots.

Tabel 2.10
Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi
Mutiara Palu Tahun 2010-2022

No	Parameter Iklim	Satuan	Rata-rata Per Tahun			
			2010	2015	2020	2022
1	Suhu Udara <i>Temperature</i>	°C	27,71	28,34	27,65	27,65
2	Tekanan Udara <i>Air Pressure</i>	Mb	1.010,39	1,011,79	1.000,98	1.010,51
3	Kelembaban Udara <i>Humidity</i>	%	76,67	71,65	79,84	77,92
4	Penyinaran Matahari <i>Length of Daylight</i>	%	63,53	73,42	64,40	60,00
5	Curah hujan <i>Rain Falls</i>	Mm	71,61	41,06	79,49	72,61
6	Kecepatan Angin <i>Wind Velocity</i>	Knots	3,67	14,68	1,87	3,92
7	Arah Angin <i>The Most of Wind Velocity</i>		Barat Laut	Barat Laut	utara	utara

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2011 Tahun 2016, Tahun 2021 dan Tahun 2023 (data diolah kembali)

2.1.2 Demografi

Gambaran aspek demografi untuk Kabupaten Sigi sebagai berikut :

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Terjadinya kenaikan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kepadatan penduduk Kabupaten Sigi Tahun 2010–2022, dengan tingkat kepadatan antar kecamatan yang tidak merata. Peningkatan kepadatan ini dari Tahun 2010 mencapai 45 jiwa/km² menjadi 50 jiwa/km² pada Tahun 2020 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Marawola sebesar 729 jiwa/km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pipikoro dengan kepadatan sebesar 9 jiwa/km².

Data selengkapnya mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Sigi disajikan pada Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.11

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sigi Tahun 2010, 2015, 2020, 2021, 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah 2019- 2020	Luas Wilayah 2021-skrng	2010		2015		2020		2021		2022	
				JP (Jiwa)	KP Jiwa/ Km ²	JP (Jiwa)	KP Jiwa/ Km ²	JP (Jiwa)	KP Jiwa/ Km ³	JP (Jiwa)	KP Jiwa /Km ²	JP	KP
1	Pipikoro	956,13	956,13	7.817	8,2	8.346	9	8565	9	8.630	9	8.704	9
2	Kulawi Selatan	418,12	418,12	8.473	20,3	9.042	22	9616	23	9.724	23	9.839	24
3	Kulawi	1.053,56	1.053,56	14.172	13,5	15.125	14	16054	15	16.222	15	16.420	16
4	Lindu	552,03	552,03	4.690	8,5	5.028	9	5435	10	5.521	10	5.584	10
5	Nokilalaki	75,19	75,19	5.626	74,8	6.005	80	5799	77	5.809	77	5.824	77
6	Palolo	626,09	581,48	27.385	43,7	29.183	47	30067	48	29.873	48	30.221	52
7	Gumbasa	176,49	176,49	11.682	66,2	12.467	71	13338	76	13.493	76	13.663	77
8	Dolo Selatan	584,71	584,71	14.448	24,7	15.420	26	16869	29	17.104	29	17.355	30
9	Dolo Barat	112,18	112,18	12.576	112,1	13.422	120	14788	132	15.006	134	15.235	136
10	Tanambulava	56,33	56,33	7.866	139,6	8.396	149	9549	170	9.717	173	9.899	176
11	Dolo	36,05	21,79	20.591	571,2	21.973	610	24787	688	22.759	631	23.206	1065
12	Sigi Biromaru	289,6	175,29	42.857	148,0	45.736	158	58065	201	46.427	160	48.053	274
13	Marawola	38,65	38,65	20.991	543,1	22.404	580	2818	729	28.972	750	29.786	771
14	Marawola Barat	150,51	150,51	6.382	42,4	6.814	45	5822	39	5.825	39	5.871	39
15	Kinovaro	70,38	70,38	9.474	134,6	10.113	144	10651	151	10.764	153	10.878	155
16	Sigi Kota*		173,10							16.255	94	16.274	94
Kab. Sigi 2022		5.196,02	5.196,02	215.030	41,4	229.474	44	232.223	43	262.101	49	266.812	51

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2021, data diolah kembali Kecamatan baru

Komposisi Penduduk

Kabupaten Sigi pada Tahun 2022 dengan luas 521.818,56 Ha dengan jumlah penduduk 266.812 jiwa, penduduk ini tersebar di 16 kecamatan dimana penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru 48.053 atau 18,01 persen sedangkan Kecamatan Lindu memiliki penduduk terkecil yaitu 5.584 jiwa atau 2,09 persen.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sigi pada beberapa periode mengalami pertumbuhan yang bervariasi jumlah penduduk pada Tahun 2010 total penduduk 215.030 jiwa, Tahun 2015 total penduduk 229.474 dengan pertumbuhan 1,15 persen, Tahun 2020 total penduduk 257.585 dengan pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu 7,29 persen hal ini dipengaruhi oleh sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS, dan pada Tahun 2021 total penduduk 261.676 jiwa dengan pertumbuhan 2,21 persen dan pada Tahun 2022 total penduduk 266.812 jiwa dengan pertumbuhan 1,96 persen. Penduduk pada Tahun 2022 memiliki komposisi penduduk laki-laki sebanyak 136.677 jiwa atau 51,23 persen, penduduk perempuan sebanyak 130.135 jiwa atau 48,77 persen. Data jumlah penduduk di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	2010			2015			2020			2021			2022		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Jumlah Penduduk	110,767	104,263	215,03	111,794	111,68	229,474	132,317	125,268	257,585	134,233	127,443	261,677	136,677	130,135	266,812
2	Pertumbuhan Tahunan			1,14			1,15			7,29			2,12			1,96

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka, data diolah kembali

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sigi Tahun 2020 menunjukkan bahwa kurang dari sepertiga atau 36,1 persen penduduk masih berumur dibawah 15 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sigi masih tergolong penduduk muda.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berumur non produktif dengan penduduk umur produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 47.40 poin, artinya bahwa setiap 100 orang penduduk umur produktif 15–64 Tahun menanggung sebanyak 47 orang penduduk umur tidak produktif 0-14 Tahun dan 65 Tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2010, 2015, 2020, 2021, 2022

Kelompok Umur	2010			2015			2020			2021			2022		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0 – 4	11.844	10.902	22.746	12.026	11.230	23.256	11.821	11.240	23.061	11.884	11.303	23.187	12.000	11.424	23.424
5 – 9	13.048	12.313	25.361	11.046	10.390	21.436	11.947	11.142	23.089	12.009	11.230	23.239	12.126	11.349	23.475
10 – 14	11.496	10.706	22.202	11.089	10.395	21.484	11.916	11.143	23.059	11.953	11.247	23.200	12.038	11.410	23.448
15 – 19	9.628	8.874	18.502	11.089	10.153	21.242	11.313	10.501	21.814	11.284	10.494	21.778	11.326	10.554	21.880
20 – 24	8.852	8.429	17.281	9.836	9.256	19.092	10.800	10.458	21.258	10.787	10.467	21.254	10.774	10.484	21.258
25 – 29	9.591	9.174	18.765	9.565	9.045	18.610	10.886	10.394	21.280	11.027	10.522	21.549	11.192	10.683	21.875
30 – 34	9.374	8.798	18.172	9.824	9.457	19.281	10.727	10.173	20.900	10.887	10.347	21.234	11.089	10.550	21.639
35 – 39	8.921	8.308	17.229	9.717	9.122	18.839	10.385	9.591	19.976	10.543	9.742	20.285	10.754	9.944	20.698
40 – 44	7.384	6.997	14.381	8.469	8.143	16.612	9.690	9.167	18.857	9.849	9.327	19.176	10.031	9.503	19.534
45 – 49	5.923	5.519	11.442	7.013	6.650	13.663	8.727	8.061	16.788	8.962	8.292	17.254	9.231	8.551	17.782
50 – 54	4.811	4.631	9.442	5.572	5.471	11.043	7.146	6.903	14.049	7.352	7.134	14.486	7.592	7.401	14.993
55 – 59	3.548	3.193	6.741	4.439	4.183	8.622	5.767	5.488	11.255	5.969	5.711	11.680	6.187	5.951	12.138
60 – 64	2.515	2.380	4.895	3.146	2.889	6.035	4.382	4.192	8.574	4.570	4.402	8.972	4.789	4.645	9.434
65 - 69	1.787	1.771	3.558	4.963	5.296	10.259	6.810	6.815	13.625	3.270	3.196	6.466	3.416	3.363	6.779
70 – 74	1.011	1.065	2.076							2.039	2.073	4.112	2.184	2.231	4.415
75 +	1.033	1.203	2.236							1.848	1.956	3.804	1.948	2.092	4.040
TT	1		1												
Kabupaten Sigi	110.767	104.263	215.030	117.794	111.680	229.474	132.317	125.268	257.585	134.233	127.443	261.676	136.677	130.135	266.812

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2010,2015,2020,2021,2022, data diolah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah sebuah indikator yang memberikan representasi terhadap kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani diukur melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat kemampuan/daya beli petani, selain itu Nilai Tukar Petani juga dapat melihat daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi Nilai Tukar Petani, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan / daya beli petani. NTP Kabupaten Sigi Tahun 2020 berfluktuasi setiap bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum daya tukar petani di Kabupaten Sigi relatif rentan terhadap laju pertumbuhan tingkat harga barang/jasa di pasaran. Bila diperhatikan rata-rata Nilai Tukar Petani gabungan Kabupaten Sigi pada Tahun 2020 sebedar 94.01 yang menunjukkan bahwa petani mengalami defisit atau kenaikan harga hasil pertanian lebih besar dibandingkan harga untuk memproduksi produk tersebut ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap tingkat

kesejahteraan petani untuk Tahun 2020. Nilai NTP Kabupaten Sigi setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
NTP Kabupaten Sigi Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani	%	102.18	94.89	94.89	102.21	94.01

Sumber: BPS Kabupaten Sigi

b. Daya Beli atau Pengeluaran Perkapita Penduduk

Pengeluaran konsum si merupakan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pengeluaran konsumsi perkapita adalah variabel yang cukup penting sebagai alat pemantau perkembangan standar hidup penduduk di suatu wilayah.

Pengeluaran perkapita Kabupaten Sigi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana hingga Tahun 2022 Pengeluaran perkapita Kabupaten Sigi sebesar 10.150 (ribu rupiah/tahun). Namun angka ini masih berada di bawah Pengeluaran perkapita Provinsi maupun Nasional yang secara berturut-turut sebesar 11.013 (ribu rupiah/tahun) dan 11.479 (ribu rupiah/tahun).

Tabel 2.15
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
dan Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022

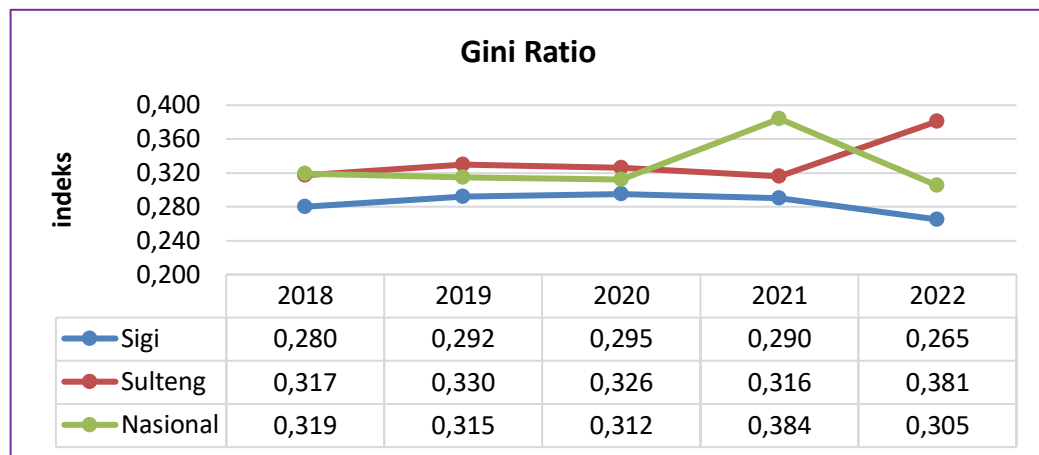
No	Uraian	2010	2015	2020	2022
1	Sigi	6.303	7.376	8.768	10.15
2	Sulteng	7.988	8.126	9.335	11.013
3	Nasional	9.437	8.498	9.696	11.479

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka 2011-2023
(Data Diolah Kembali)

c. Gini Rasio

Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni indeks Gini atau koefisien gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna. Perkembangan capaian indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini.

Tabel. 2.16



Gini Rasio Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional
Tahun 2018 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2012-2022 (Data Diolah Kembali)

Capaian Indeks Gini Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren kenaikan dari 0,280 sampai 0,295 poin, namun sejak tahun 2021-2022 memiliki kecenderungan penurunan, yakni 0,290 sampai 0,265 poin. Indeks Gini. Hasil analisi perkembangan Indeks Gini 5 tahun terakhir dapat dikatakan capaian Indeks tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dan Indeks Gini Nasional dengan kata lain ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Sigi lebih rendah dibandingkan Indeks Gini rata-rata provinsi dan nasional.

d. Angka Kemiskinan

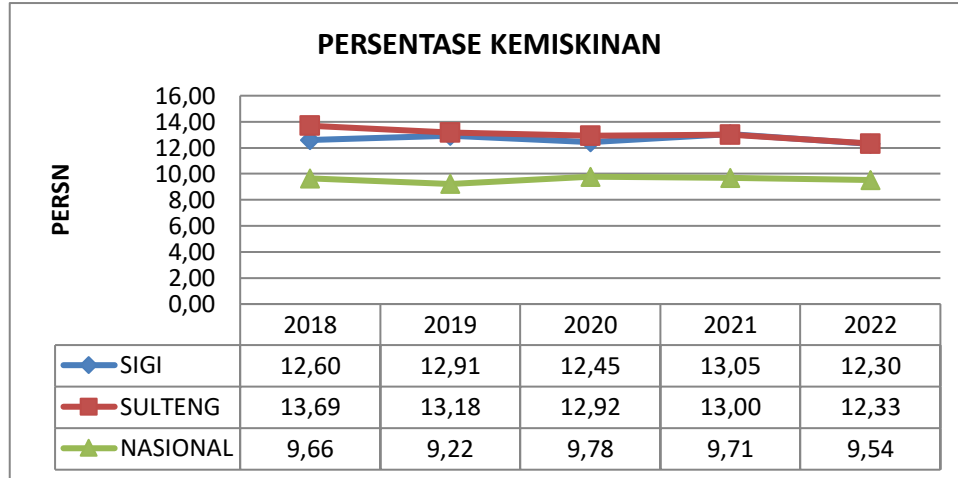
Masalah pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu

indikator umum dalam menilai kesejahteraan rakyat. Dalam ilmu ekonomi, Penduduk miskin akan menjadi “beban” suatu daerah karena penduduk miskin akan memperkecil pendapatan perkapita. Selain itu, penduduk miskin juga menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sigi pada tahun 2022, tercatat sebesar 29,94 ribu jiwa atau sekitar 12,30 persen dan pada tahun 2018 sebesar 12,60 persen. Perkembangan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sigi selama tahun 2018-2022 mengalami tren menurun dan dapat diartikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sigi relatif baik. Persentase kemiskinan di Kabupaten Sigi masih dibawah bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen pada tahun 2022 namun diatas persentase kemiskinan tingkat nasional sebesar 9,54 persen.

Perkembangan tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Presentase penduduk miskin Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah, Nasional Tahun 2018 – 2022



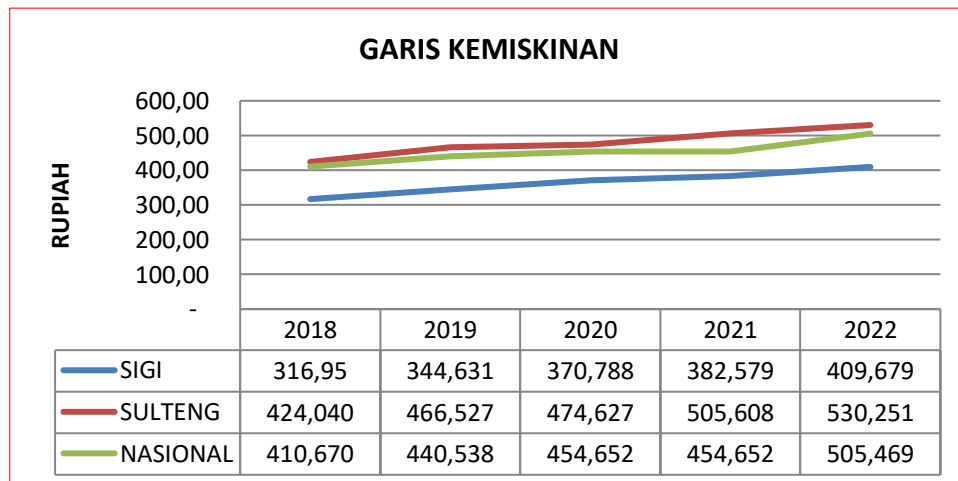
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2018-2022 (Data Diolah Kembali)

Garis Kemiskinan merupakan satu batas yang digunakan standar untuk menentukan individu masuk kategori miskin atau tidak. Di Kabupaten Sigi, Garis Kemiskinan dihitung dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Selama enam tahun terakhir garis kemiskinan Kabupaten Sigi selalu meningkat. Hal ini merupakan suatu fenomena yang sangat wajar terjadi karena harga kebutuhan pokok selalu meningkat akibat adanya inflasi. Pada tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Sigi perkapita perbulan berada disekitar 300 ribu rupiah, sedangkan tahun 2022 meningkat pada kisaran 400 ribu

rupiah perbulan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Sigi masih di bawah rata-rata kabupaten/kota disulawesi Tengah maupun Tingkat nasional. Ini menunjukkan Tingkat inflasi di Kabupaten Sigi masih rendah. Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 digambarkan pada table berikut ini.

Tabel 2.18
Garis Kemiskinan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,
Nasional Tahun 2018 – 2022

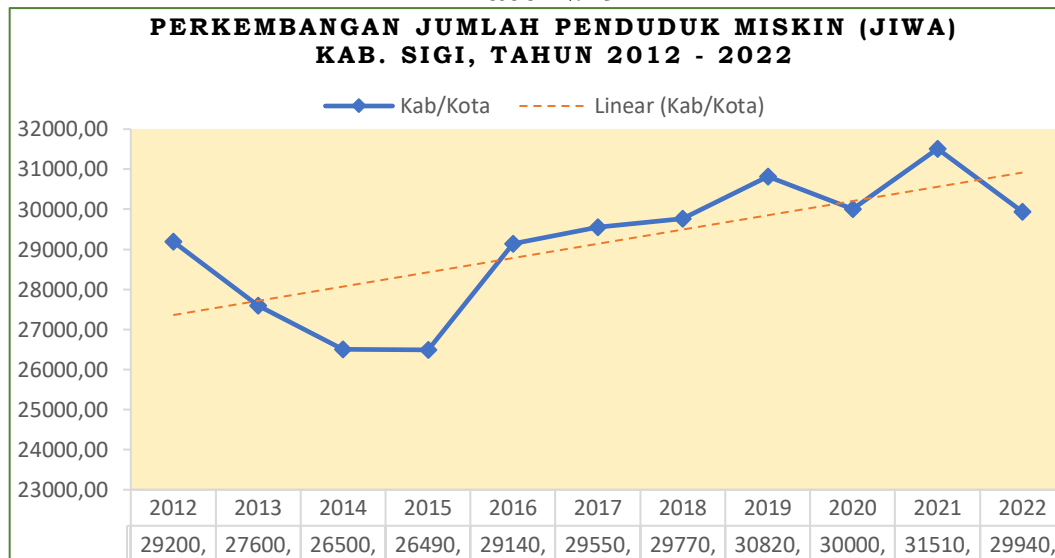


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2018-2022 (Data Diolah Kembali)

Kebijakan penurunan jumlah penduduk miskin merupakan tujuan nasional dan daerah, bukan hanya untuk kesejahteraan penduduk melainkan juga untuk memperkuat ekonomi daerah. Dengan tersedianya data perkembangan penduduk miskin diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan kedepannya. Selama 10 tahun terakhir, penduduk miskin di

Kabupaten Sigi mengalami fluktuatif dan tidak memiliki kecenderungan menurun. Jumlah penduduk miskin paling kecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 26.490 jiwa, sedangkan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk miskin selalu diatas 29.000 jiwa. Hasil analisis perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sigi menandakan kebijakan program pemberian bantuan sosial dan bantuan dana desa belum efektif dan efisien menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sigi. Gambaran perkembangan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2012-2022 (Data Diolah Kembali)

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sigi naik, yaitu sebesar 5,74 persen dan berada di atas angka Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan, yaitu berturut-turut sebesar 3,36 persen dan 3,02 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi pada umumnya masih di bawah angka Provinsi maupun Nasional, kecuali pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi yang sebesar 3,00 persen namun masih di bawah angka Nasional yang sebesar 5,85 persen.

Tabel 2.20

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022

No	Uraian	2010	2015	2020	2022
1	Sigi	4,59	5,74	3,36	3,02
2	Sulteng	4,61	4,10	3,77	3,00
3	Nasional	7,14	6,18	7,07	5,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya saing merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat atau menggambarkan perkembangan suatu wilayah. Makin tinggi daya saing suatu daerah, makin tinggi pergerakan dan aktivitas ekonomi yang dapat dicapai daerah tersebut. Keterbatasan infrastruktur daerah yang merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing daerah menjadi kendala atau hambatan dalam memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator ekonomi yang dapat menjelaskan kemajuan dan atau perkembangan ekonomi dari suatu wilayah atau daerah adalah pertumbuhan indikator Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sigi bila dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku. Sampai dengan Tahun 2020 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp. 6.118.113,- dan di Tahun 2022 mencapai Rp. 6.679.602,-. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Tahun 2020 mencapai Rp.9.029.080,- di Tahun 2022 mencapai Rp.10.600.722,-.

Tabel 2.21
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha

PDRB	TAHUN			
	2010	2015	2020	2022
ADH KONSTAN 2010	1.600.642	5.176.030	6.118.113	6.679.602
PERTUMBUHAN (%)	7,75	6,51	45,37	63,99
ADH BERLAKU	3.149.313	6.725.071	9.029.080	10.600.723
PERTUMBUHAN (%)	14,02	9,90	0,56	8,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

Tabel 2.22
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah),
Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.686,64	3.764,23	3.813,62	3.991,65	4.374,76
B	Pertambangan dan Penggalan	334,99	409,83	366,10	388,02	429,87
C	Industri Pengolahan	171,14	178,50	182,44	208,79	220,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0,74	0,77	0,80	0,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,09	9,63	10,15	12,24	12,76
F	Konstruksi	1.086,42	1.216,38	1.191,04	1.291,69	1.404,03

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.018,92	1.117,87	1.130,23	1.244,59	1.424,49
H	Transportasi dan Pergudangan	151,50	168,21	125,72	134,78	157,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,90	37,98	40,28	45,07	50,79
J	Informasi dan Komunikasi	158,28	183,28	197,85	216,55	226,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,43	249,07	276,95	327,07	343,33
L	Real Estate	206,31	215,69	229,84	254,72	280,19
M,N	Jasa Perusahaan	10,72	11,90	11,78	12,41	13,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719,41	762,47	775,39	854,15	884,17
P	Jasa Pendidikan	423,00	441,43	459,73	512,49	528,88
Q	Jasa Kesehatan dan	132,15	151,09	155,38	163,96	174,87
R,S,T,U	Kegiatan Sosial Jasa lainnya	55,58	60,71	61,87	70,72	74,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.422,17	8.979,02	9.029,08	9.729,70	10.600,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		8.422,17	8.979,02	9.029,08	9.729,70	10.600,73

Tabel 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah), Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.842,13	2.862,02	2.864,37	2.955,13	3.032,80
B	Pertambangan dan Penggalan	216,94	254,07	217,07	226,41	235,70
C	Industri Pengolahan	119,24	120,66	116,38	129,09	132,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,76	0,79	0,81	0,84	0,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,58	6,62	6,94	8,19	8,28
F	Konstruksi	664,30	742,34	721,66	772,58	808,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	691,07	709,46	679,46	734,22	794,15
H	Transportasi dan Pergudangan	110,66	116,95	84,50	90,06	96,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,13	24,81	24,77	27,29	30,32
J	Informasi dan Komunikasi	130,42	143,40	155,97	169,12	176,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	140	152,88	170,35	190,57	183,08
L	Real Estate	149,76	149,78	151,23	155,24	166,01
M,N	Jasa Perusahaan	7, 03	7,58	7,48	7,82	8,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,86	463,36	460,05	500,99	501,06
P	Jasa Pendidikan	307,56	314,12	313,17	348,53	351,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,1	102,56	103,77	104,05	107,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	38,60	39,59	40,14	44,22	46,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.993,14	6.211,00	6.118,11	6.464,34	6.679,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		5.769,99	5.993,14	6.118,11	6.464,34	6.679,60

Tabel 2.24
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,77	41,92	42,24	41,03	41,27
B	Pertambangan dan Penggalian	3,98	4,56	4,05	3,99	4,06
C	Industri Pengolahan	2,03	1,99	2,02	2,15	2,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,13	0,12
F	Konstruksi	12,90	13,55	13,19	13,28	13,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,10	12,45	12,52	12,79	13,44
H	Transportasi dan Pergudangan	1,80	1,87	1,39	1,39	1,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,42	0,45	0,46	0,48
J	Informasi dan Komunikasi	1,88	2,04	2,19	2,23	2,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	2,77	3,07	3,36	3,24
L	Real Estate	2,45	2,40	2,55	2,62	2,64
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,54	8,49	8,59	8,78	8,34
P	Jasa Pendidikan	5,02	4,92	5,09	5,27	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	1,68	1,72	1,69	1,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,66	0,68	0,69	0,73	0,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100	100	100	100	100

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi
Atas Dasar Harga (ADH) Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen),
Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,57	0,70	0,08	3,71	2,63
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	17,12	(14,56)	4,30	4,10
C	Industri Pengolahan	5,04	1,18	-3,55	10,91	2,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,04	5,06	2,51	2,97	7,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,67	0,58	4,86	17,93	1,10
F	Konstruksi	0,24	11,75	(2,79)	7,06	4,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,44	2,66	(4,23)	8,06	8,16
H	Transportasi dan Pergudangan	4,27	5,68	(27,75)	6,59	7,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,62	2,84	(0,19)	10,18	11,10
J	Informasi dan Komunikasi	9,91	9,96	8,76	8,43	4,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,03	9,20	11,43	11,87	(3,93)
L	Real Estate	4,29	0,02	0,96	2,65	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	5,66	7,90	(1,32)	4,52	4,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	2,77	(0,71)	8,90	0,01
P	Jasa Pendidikan	1,89	2,13	(0,30)	11,29	0,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	10,16	1,18	0,27	3,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,85	2,58	1,34	10,22	5,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,87	3,64	(1,50)	5,66	3,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		3,87	3,64	(1,50)	5,66	3,33

Tabel 2.26
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha, Tahun
2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	129,71	131,52	133,14	135,08	144,25
B	Pertambangan dan Penggalian	154,42	161,31	168,65	171,38	182,38
C	Industri Pengolahan	143,53	147,94	156,76	161,75	166,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	92,29	93,33	95,06	95,35	96,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	138,13	145,43	146,26	149,57	154,20
F	Konstruksi	163,54	163,86	165,04	167,19	173,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147,44	157,57	166,34	169,51	179,37
H	Transportasi dan Pergudangan	136,90	143,84	148,79	149,64	162,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144,67	153,08	162,44	165,15	167,53
J	Informasi dan Komunikasi	121,37	127,81	126,85	128,04	128,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	158,88	162,93	162,58	171,63	187,53
L	Real Estate	137,76	144,00	151,98	164,08	168,78
M,N	Jasa Perusahaan	152,51	156,99	157,42	158,67	164,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	159,56	164,55	168,54	170,49	176,46
P	Jasa Pendidikan	137,54	140,53	146,80	147,04	150,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	141,94	147,32	149,73	157,57	162,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	143,99	153,34	154,19	159,92	160,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		140,53	144,57	147,58	150,51	158,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		140,53	144,57	147,58	150,51	158,70

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2018–2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,99	1,40	1,23	1,45	6,79
B	Pertambangan dan Penggalian	7,47	4,46	4,55	1,62	6,42
C	Industri Pengolahan	3,97	3,09	5,97	3,18	3,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,52	1,12	1,85	0,31	1,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,46	5,29	0,57	2,26	3,10
F	Konstruksi	6,68	0,19	0,72	1,30	3,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,29	6,87	5,57	1,91	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	2,94	5,07	3,44	0,58	8,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	5,29	5,81	6,11	1,67	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	2,36	5,31	-0,75	0,94	0,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,45	2,55	-0,22	5,57	9,26
L	Real Estate	2,77	4,53	5,54	7,96	2,86
M,N	Jasa Perusahaan	2,89	2,94	0,28	0,79	3,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,50	3,13	2,42	1,16	3,50
P	Jasa Pendidikan	4,29	2,18	4,46	0,17	2,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,23	3,79	1,64	5,24	2,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,17	6,49	0,56	3,72	0,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,94	2,87	2,08	1,99	5,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		2,94	2,87	2,08	1,99	5,44
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)						

B. Perkembangan Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Berdasarkan nilai dan kontribusi dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2022 di Kabupaten Sigi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor dominan yakni sebesar Rp. 3.032,78,- atau 45,40 persen, kemudian sektor terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp.900,-. atau 0,01 persen.

Kontribusi dan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku juga didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 4.374,76,- atau 41.27 persen, demikian juga sektor terendah adalah sektor listrik dan gas sebesar Rp 870,- atau 0,01 persen. Namun secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi dan nilai Produk Domestik Regional Bruto pada sektor lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang disebabkan sudah semakin baiknya fondasi ekonomi Kabupaten Sigi, khususnya pada sektor konstruksi dan perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara lengkap nilai dan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku sebagai berikut :

Tabel 2.28
 Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022
 Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan 2010) Kabupaten Sigi (Milyar)

Kategori	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN			
		2010	2015	2020	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.900.605	2.507.371,5	2.864,37	3.032,78
B	Pertambangan dan Penggalian	124.076	188.243,6	217,07	235,7
C	Industri Pengolahan	73.712	98.778,3	116,38	132,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	381	660,4	0,81	0,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.374	5.860,0	6,94	8,28
F	Konstruksi	374.104	555.019,0	721,66	808,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	443.334	613.470,7	679,46	794,15
H	Transportasi dan Pergudangan	67.959	94.873,7	84,5	96,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.98	20.939,6	24,77	30,32
J	Informasi dan Komunikasi	70.622	100.059,0	155,97	176,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.364	92.334,8	170,35	183,08
L	Real Estate	89.827	130.843,0	151,23	166,01
MN	Jasa Perusahaan	4.212	5.819,0	7,48	8,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	251.652	391.978,0	460,05	501,06
P	Jasa Pendidikan	179.856	267.313,8	313,17	351,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47.502	71.591,9	103,77	107,89
RSTU	Jasa lainnya	22.979	30.874,0	40,12	46,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

Tabel 2.29
 Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022
 Atas Dasar Harga Berlaku (ADH Berlaku) Kabupaten Sigi (Milyar)

Kategori	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN			
		2010	2015	2020	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.900.605	3.072.954,3	3.813,62	4.374,76
B	Pertambangan dan Penggalian	124.076	264.058,8	366,1	429,87
C	Industri Pengolahan	73.712	130.323,4	182,44	220,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	381	520,3	0,77	0,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.374	7.473,0	10,15	12,76
F	Konstruksi	374.104	520,3	1.191,04	1.404,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	443.334	7.473,0	1130,23	1424,5
H	Transportasi dan Pergudangan	67.959	805.900,0	125,72	157,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.98	837.809,8	40,23	50,79
J	Informasi dan Komunikasi	70.622	121.261,5	197,85	226,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.364	27.481,3	276,95	343,33
L	Real Estate	89.827	114.425,4	229,84	280,19
MN	Jasa Perusahaan	4.212	135.094,8	11,78	13,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	251.652	165.673,9	775,39	884,17
P	Jasa Pendidikan	179.856	8.103,0	459,73	528,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47.502	560.042,1	155,38	174,87
RSTU	Jasa lainnya	22.979	40.750,2	61,87	74,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk 2010)

Kategori	SEKTOR/SUBSEKTOR	DISTRIBUSI PDRB ADH BERLAKU			
		2010	2015	2020	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,91	45,69	42,26	41,27
B	Pertambangan dan Penggalian	3,32	3,93	4,05	4,06
C	Industri Pengolahan	1,97	1,94	2,02	2,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,12
F	Konstruksi	10,02	11,98	13,19	13,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,87	12,46	12,52	13,44
H	Transportasi dan Pergudangan	1,82	1,8	1,39	1,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,4	0,41	0,45	0,48
J	Informasi dan Komunikasi	1,89	1,7	2,19	2,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	2,01	3,07	3,24
L	Real Estate	2,41	2,46	2,55	2,64
MN	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,74	8,33	8,59	8,34
P	Jasa Pendidikan	4,82	5,01	5,09	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,43	1,72	1,65
RSTU	Jasa lainnya	0,62	0,61	0,69	0,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, (data diolah)

C. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah biasa menggunakan pengeluaran per kapita, tetapi bisa juga menggunakan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Produk Domestik Regional Bruto per kapita dihitung dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Sigi Atas Dasar Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan terus mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2010 Produk Domestik Regional Bruto perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.13,726.618,- menjadi sebesar Rp.39.000.000,- pada tahun 2022. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 meningkat dari Rp.6.979.620,- pada Tahun 2010, menjadi Rp.25.000.000,- pada Tahun 2022.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan menjadi -1,50 persen pada Tahun 2020 yang disebabkan oleh masih adanya dampak dari bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor maupun dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menimpa

masyarakat Kabupaten Sigi. Akan tetapi pada Tahun 2022, masyarakat Kabupaten Sigi mulai bangkit yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,33%.

Tabel 2.31
PDRB Per Kapita ADH Berlaku dan ADH Konstan
Tahun 2010, 2015, 2020 dan Tahun 2022 (Ribu)

PDRB	TAHUN			
	2010	2015	2020	2022
ADH BERLAKU	13.726	29.000	35.000	39.000
ADHK 2010	6.979	23.000	24.000	25.000
PERUMBUHAN (%)	7,87	6,51	(1,50)	3,33
JUMLAH PENDUDUK (Ribu)	215.03	229.5	257.59	266.812

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

D. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara ekonomi dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga sangat sulit diperoleh. Dalam prakteknya indikator pendapatan sering menghadirkan masalah tertentu. Pendapatan sulit didefinisikan karena pendapatan mencakup banyak komponen yang berkaitan dengan moneter, misalnya pendapatan rumah tangga pertanian sulit dihitung karena sebagian besar konsumsinya berasal dari hasil produksi sendiri. Selain itu, individu cenderung membuat pernyataan yang

keliru tentang tingkat pendapatannya, yang umumnya di bawah perkiraan. Dengan keterbatasan tersebut dan juga karena alasan nilai tabungan yang rendah, pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan total pengeluaran rumah tangga.

Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mencirikan rumah tangga dengan memberikan gambaran pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat urgensi kebutuhan terhadap kedua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Jika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun menurun pada hampir semua rumah tangga. Keadaan seperti ini lebih dirasakan pada kalangan rumah tangga miskin. Hal ini memaksa mereka lebih banyak menekan pengeluaran dan menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keterbatasan mereka, maka sangat wajar apabila rumah tangga khususnya yang mengalami penurunan standar hidup secara drastis akan mengambil tindakan dengan memberikan prioritas utama pada pengeluaran untuk makanan. Dengan demikian, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi makanan.

Rumah tangga yang lebih mampu biasanya mempunyai barang non makanan lebih banyak dari pada rumah tangga yang relatif lebih miskin. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan bukan untuk makanan.

Tabel 2.32
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Tahun 2017- 2020 Kabupaten Sigi

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Total Pengeluaran Perkapita	606.08	862	867.21	880.80
2	Jumlah RT	57,369	58,044	58,722	56.31
3	Rasio (1/2)	0.011	0.015	0.15	0.16

Sumber: Merujuk pada BRS Kabupaten Sigi Maret Tahun 2021

E. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Jika penduduk sudah dapat memenuhi kebutuhan makanannya, mereka cenderung membelanjakan sisanya untuk pengeluaran lainnya. Kecenderungan menabung di Kabupaten Sigi masih relatif rendah. Dengan asumsi tersebut, jika pengeluaran non makanan semakin besar, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduk. Demikian sebaliknya jika pendapatan semakin rendah, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin tinggi dan pengeluaran untuk non makanan semakin rendah. Pengeluaran non makanan ini terdiri dari 6 kelompok konsumsi, yaitu:

1. perumahan dan fasilitas rumah tangga;
2. aneka barang dan jasa, termasuk di dalamnya biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya;
3. pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
4. barang tahan lama;
5. pajak, pungutan dan asuransi; dan
6. keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pada Tahun 2020 persentase pengeluaran non pangan penduduk Kabupaten Sigi didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar 57,01 persen, sebanyak 16,78 persen untuk aneka barang dan jasa. Sedangkan untuk pemenuhan pakaian, barang, pajak, retribusi dan keperluan pesta cenderung memiliki persentase pengeluaran yang hampir sama yakni pada kisaran 5-8 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sigi masih memprioritaskan pendapatannya untuk keperluan non pangan masih pada kebutuhan yang bersifat primer, sandang, pangan papan. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingkat pendapatan yang umumnya masih relatif rendah.

Tabel 2.33
Golongan Pengeluaran Non Pangan Tahun 2020
Kabupaten Sigi

No	Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	179.930	57,01
2	Aneka Barang dan Jasa	52.946	16,78
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	23.926	7,58
4	Barang yang tahan lama	17.745	5,62
5	Pajak Pungutan dan asuransi	18.410	5,83
6	Keperluan pesta dan upacara	22.659	7,18
	Jumlah	315.616	100

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2021 diolah kembali

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Pendidikan

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pembangunan Pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sigi telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis.

Rata-rata lama sekolah mengacu pada jumlah tahun yang dihabiskan oleh sekelompok individu atau kelompok penduduk

dalam pendidikan formal. Ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh suatu kelompok dalam hal durasi waktu yang dihabiskan dalam sistem pendidikan.

Secara umum Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sigi pada Tahun 2010 dan Tahun 2015, berada di atas Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi maupun Nasional, yaitu berturut-turut sebesar 7,99 dan 8,13. Sedangkan pada Tahun 2020 dan Tahun 2022, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi berada di bawah angka Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi yang sebesar 8,83 dan 8,89, namun masih berada di atas Angka Rata-Rata Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.34
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022

No	Uraian	2010	2015	2020	2022
1	Sigi	7,99	8,13	8,60	8,84
2	Sulteng	7,65	7,97	8,83	8,89
3	Nasional	7,46	7,84	8,48	8,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada metode lama, Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yaitu Angka Melek Huruf dan Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pada metode baru

Indeks pendidikan dihitung dari dua komponen yang berbeda yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sigi secara umum masih berada di bawah Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi maupun Nasional, akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sigi mencapai 12,97 atau berada di tingkat SMA/Kuliah semester awal.

Tabel 2.35
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2010, 2015, 2020
dan Tahun 2022

No	Uraian	2010	2015	2020	2022
1	Sigi	10,37	12,30	12,87	12,97
2	Sulteng	11,18	12,72	13,17	13,32
3	Nasional	11,38	12,55	12,98	13,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka 2010-2022
(Data Diolah Kembali)

3. Angka Harapan Hidup

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kondisi kesehatan penduduk tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi derajat kesehatannya dan dari sisi status kesehatannya. Derajat

kesehatan penduduk dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi sebesar 70,15 tahun lebih tinggi dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 68,93 tahun. Namun berada di bawah Angka Harapan Hidup Nasional yang sebesar 71,85 tahun.

Tabel 2.36
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2010, 2015,
2020 dan Tahun 2022

No	Uraian	2010	2015	2020	2022
1	Sigi	68,48	68,66	69,99	70,15
2	Sulteng	66,12	67,26	68,69	68,93
3	Nasional	69,86	70,78	71,47	71,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Sigi Dalam Angka Tahun 2011-2023 (Data Diolah Kembali)

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Tahun 2019, jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja sebanyak 110.138 penduduk 66,86 persen, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 54.585 penduduk 33,13 persen.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional dari total angkatan kerja pada Tahun 2019, penduduk Kabupaten Sigi yang

bekerja tercatat sebesar 94,26 persen sedangkan yang diklasifikasikan sebagai penganggur sekitar 5,73 persen.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Sigi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sigi pada Tahun 2019 sebesar 559 pekerja. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan jumlah pencari kerja sebanyak 532 orang. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, jumlah laki-laki terdaftar sebanyak 192 orang dan perempuan sebanyak 367 orang.

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada Tahun 2019 berpendidikan terakhir SD yaitu 232 pekerja.

Tabel 2.37
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2020

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
	Bekerja	Bekerja	Bekerja	Bekerja
Tidak Sekolah/Belum/Tamat SD/Sekolah Dasar	47,808	52,903	46,011	38,152
Sekolah menengah Pertama	22,927	19,881	25,851	14,078
Sekolah Menengah Atas	22,722	25,420	27,225	13,637
Sekolah Menengah Kejuruan	5,869	5,619	5,685	5,869
Diploma I/II/III/	2,585	3,191	3,573	2,219
Universitas	6,936	7,079	8,471	7,561

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2021, diolah kembali

C. Tingkat Ketergantungan

Situasi kependudukan di suatu wilayah, selain digambarkan melalui laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin. Semakin rendah proporsi penduduk usia tidak produktif, anak-anak dan lansia, menyebabkan angka ketergantungan semakin kecil. Rendahnya angka ketergantungan memberikan kesempatan bagi penduduk produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, yang terbagi menjadi kelompok penduduk usia produktif 15-64 Tahun dan penduduk usia tidak produktif 0-14 Tahun dan di atas 65 Tahun. Rasio ketergantungan di Kabupaten Sigi Tahun 2019 sebesar 234.89 atau dengan kata lain angka ketergantungan mencapai 48,73 persen. Hal tersebut berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 49 orang penduduk bukan usia produktif.

Tabel 2.38

Rasio Ketergantungan Tua dan Muda Tahun 2017-2020 Kabupaten Sigi

Umur	Rasio Ketergantungan	Prosentase Penduduk /Tahun											
		2017			2018			2019			2020		
			%	AK		%	AK		%	AK		%	AK
0 - 14	Rasio Ketergantungan Usia Muda (0 – 14)	66,176	28,84	43,24	65,465	28,20	42,04	66,205	27,7	41,13	66,205	27,65	41,13
15 - 64	Usia produktif (usia 15 – 64)	153,039	66,69		155,727	67,07		160.979	67,2		160.979	67,24	
65+	Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (65 +)	10,259	4,47	6,70	10,982	4,73	7,05	12,237	5,11	7,6	12,237	5,11	7,6
Jumlah Penduduk		229,474	100		232,174	100		234,89	100		234,89	100	
Jumlah Ketergantungan				49,94			49,09			48,73			48,73

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Konteks ketersediaan infrastruktur sebuah wilayah terhadap Aspek Daya Saing Daerah adalah semakin terpenuhinya kebutuhan infrastruktur sebuah Daerah tentunya akan meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah yang meningkat tentunya akan menjadi daya tarik terhadap pelaku ekonomi dalam berinvestasi di Kabupaten Sigi.

Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Sigi sejauh ini berdasar pada pengendalian dan pengawasan RTRW untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tata ruang yang direncanakan melalui keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian ketaatan terhadap tata ruang yang telah di koordinasikan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta melalui badan atau dinas terkait penataan ruang. Ketaatan terhadap RTRW mengacu pada peraturan zonasi untuk penetapan kegiatan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona, yaitu a) penetapan intensitas kegiatan pada setiap zona yang ditetapkan, b) penetapan luasan kawasan yang diijinkan untuk suatu fungsi tertentu selama masih berkesesuaian.

A. Ketaatan terhadap RTRW

Pada Tahun 2010 merupakan Tahun awal perencanaan Tata Ruang Wilayah dengan rencana peruntukan RTRW (kawasan budidaya) sebanyak 99,867 Ha. Dengan rasio ketaatan terhadap RTRW 0 persen ini menunjukkan bahwa pada awal perencanaan tata ruang rasio ketaatan secara umum sesuai rencana. Sedangkan pada Tahun 2017 di mana kebutuhan pembangunan daerah menyebabkan permintaan akan lahan

budidaya untuk kegiatan pembangunan meningkat sehingga rasio ketaatan terhadap RTRW dengan rasio sebesar 0,0003. Rasio ini menunjukkan telah terjadi perubahan pola penggunaan ruang di banding Tahun awal perencanaan. Secara umum rasio ketaatan terhadap RTRW digambarkan pada pada tabel dan gambar di bawah ini

Tabel 2.39
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2020
Kabupaten Sigi

Uraian	2017	2018	2019	2020
Realisasi RTRW	3	2	0	0
Rencana Peruntukan RTRW	9,763	9,536	9,323	8,229
Rasio (1/2)	0,0003	0,0002	0	0

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021

B. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan arahan penggunaan kawasan budidaya pada rencana pola ruang Kabupaten Sigi dapat digambarkan arahan kawasan yang dapat digunakan sebagai wilayah produktif yang dapat dikembangkan untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian, perkebunan, permukiman dan area penggunaan lain, sehingga wilayah produktif ini dapat difungsikan guna mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sigi yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan rasio wilayah produktif tahun 2016 sebesar 0,191 Tahun 2017 sebesar 0,191, sedangkan Tahun 2019 rasio pencapaian luas wilayah produktif adalah sebesar 0,215 Ha. Hal ini dapat diartikan pada Tahun 2016 setiap 1 Hektar lahan budidaya terdapat 0,24 Ha lahan yang produktif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Produktif	22130	22130	24150	24885
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	115.692,12	115.692,12	115.692,12	115.692,12
3	Rasio (1/2)	0,191	0,191	0,209	0,215

Sumber Data: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tahun 2021

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Salah satu indikator untuk menarik iklim investasi adalah kondisi keamanan, yang dapat dilihat pada tingkat kriminalitas di suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi menunjukkan pada Tahun 2016 jumlah kejahatan terhadap jiwa/badan menurun dibandingkan Tahun 2015. Tahun 2019 tercatat sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) kasus sedangkan pada Tahun 2020 terdapat 220 (dua ratus dua puluh) kasus. Pada kasus kejahatan terhadap barang/benda pada Tahun 2020 menurun dibanding Tahun 2019, yaitu dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) kasus menjadi 355 (tiga ratus lima puluh lima) kasus.

Pada kurun waktu Tahun 2017-2020, kejahatan terhadap badan menunjukkan penurunan kasus di Tahun 2019, yang terbesar adalah kasus pencurian kendaraan bermotor 252 (dua ratus lima puluh dua kasus, Pencurian berat 135 (seratus tiga puluh lima) kasus disusul pengeroyokan 41 (empat puluh satu) kasus.

Selain angka kriminalitas, capaian penyelenggaraan terhadap fokus iklim berinvestasi dapat dilihat pada realisasi indikator jumlah demo,

lama proses perizinan, jumlah perda yang mendukung iklim usaha serta persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Dalam rangka mengembangkan investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja diperlukan stabilitas sosial dan politik. Untuk menciptakan iklim daerah yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Sigi selalu melakukan pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda. Selain itu, setiap individu masyarakat harus membangun deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat. Hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah.

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda selama kurun waktu Tahun 2016-2022 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun 2016 - 2020 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi di Tahun 2022 telah mencapai 4 kali kegiatan. Selengkapnya terkait hal tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Realisasi indikator urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat
Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pembinaan Politik Daerah	0	0	32	32	38	0	9
Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	1	1	3	3	4

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sigi dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.42
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sigi Tahun 2020-2022

No	Nama Instansi Pemerintah	Indeks RB		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten Sigi	43,60	46,87	48,43

Gambaran indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi mengalami perubahan yang baik, terhadap delapan aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, sumber daya manusia, Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pola Pikir serta Budaya Kerja. Setiap tahun pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kabupaten Sigi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dokumen Evaluasi RPJPD merupakan dokumen evaluasi perencanaan daerah untuk periode 20 tahun sebelumnya. Pengendalian dan Evaluasi RPJPD 2005-2025 diukur melalui pencapaian sasaran pokok pada pelaksanaan 3 periode RPJMD.

2.5.1. Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD

Rekomendasi tindak lanjut dari capaian 12 misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 yang dirinci ke sasaran pokok beserta indikatornya dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini:

Misi 1: Meningkatkan dan Mengembangkan Pertanian melalui Intensifikasi, Diversifikasi dan Ekstensifikasi;

- a) perlu pengendalian alih fungsi lahan dengan mempedomani Perda RTRW dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keberlanjutan ketahanan pangan.
- b) reviu Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait dengan sebagian kawasan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan dalam RTRW tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan dan juga perlu adanya validasi luas lahan sawah.
- c) pengembangan korporasi petani.

Misi 2 : Meningkatkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbasis Pertanian, Budaya, Alam dan Lingkungan;

- a) perbaikan peraturan keberagaman aktivitas ekonomi kerakyatan yang meliputi kerajinan, kesenian, sauna, kuliner dan refleksi
- b) penguatan kelembagaan, pemenuhan anggaran dari Dana Alokasi Khusus
- c) peningkatan keamanan dan kebersihan di obyek wisata
- d) terbangunnya fasilitas di obyek wisata Wayu dan Bora

Misi 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai bagian dari Pilar Ekonomi;

- a) revisi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten mengikuti RTRW
- b) terus dilakukan pembinaan dan update data Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c) tersedianya informasi mengenai peta sebaran industri berdasarkan lokasi aktual
- d) mendorong semua koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tepat waktu
- e) fasilitasi Nomor Induk Berusaha
- f) tersedianya sumber data Sumber Daya Alam potensial dan informasi permintaan pasar
- g) penambahan anggaran pembinaan dan pendampingan Industri Kecil Menengah dan pelatihan perkoperasian
- h) penyediaan sarana prasarana setelah pelatihan
- i) membangun kerjasama antar instansi daerah maupun pusat terkait peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan
- j) pembentukan karakter Sumber Daya Manusia dibidang Industri
- k) informasi penganekaragaman produk dan diversifikasi produk
- l) pendampingan koperasi terus dilaksanakan dan fasilitasi legalitas pelaku usaha

Misi 4 : Meningkatkan Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Jaminan Pelayanan Kesehatan yang Merata bagi Seluruh Masyarakat.

- a) distribusi tenaga kesehatan sesuai kompetensi;

- b) perlunya dilakukan klasifikasi dan identifikasi secara detail pada sarana prasarana berkaitan dengan informasi ketahanan, perawatan, dan umur ekonomis aset untuk ditindak lanjuti dalam pemakaian dan perawatan yang benar dan aman melalui pembuatan Standar Operasional Prosedur;
- c) perlunya dilakukan survei kembali serta pendampingan dalam rangka mencapai status akreditasi lebih baik;
- d) perlunya pembuatan program inovasi untuk mendukung dalam mencapai target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- e) perlunya dukungan lintas sektor terhadap program kesehatan;
- f) perlu adanya regulasi yang mengatur distribusi tenaga kesehatan yang merata perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk pemenuhan layanan kesehatan terstandar;
- g) pemenuhan alat kesehatan yang sesuai standar meningkatkan kemitraan strategis dan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan lembaga riset pengembangan pendidikan berkelanjutan dan pemberdayaan profesi melakukan perubahan paradigma di masyarakat melalui pendidikan kesehatan oleh petugas kesehatan secara rutin;
- h) melakukan pemenuhan kebutuhan teknologi informasi untuk operasional seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;
- i) peningkatan pelayanan kesehatan berbasis teknologi;
- j) Pembangunan fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu tiap desa;
- k) penyusunan peraturan bupati mengenai posyandu;

- l) penyediaan anggaran untuk intervensi indikator keluarga sehat inovasi masing-masing;
- m) pelayanan kesehatan untuk mencapai 12 Indikator Keluarga Sehat;
- n) komitmen Kabupaten Sigi untuk peningkatan Indikator Keluarga Sehat; dan
- o) adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten sehat.

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

- a) keberlanjutan Program Sigi Masagena dan Sigi Religi;
- b) mendorong satuan pendidikan untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta menyamakan data pokok pendidikan dan data kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
- c) adanya kebijakan pemerintah daerah tentang penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat atau sekolah swasta;
- d) mendorong pemerintah untuk dapat mengalokasikan kembali beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik ;
- e) perbaikan data pokok pendidikan dan data peta pendidikan sehingga menghasilkan data yang sama;
- f) pengembangan situs sekolah;
- g) meningkatkan komitmen dari pengambil kebijakan di perangkat daerah terkait pengarusutamaan gender;
- h) memperluas media informasi perlindungan perempuan dan anak;
- i) terbentuknya satgas dan forum anak di desa;
- j) pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

- k) pembentukan Kabupaten Layak Anak menuju predikat paripurna; dan
- l) peningkatan sarana atau prasarana berupa Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Sigi dan kendaraan operasional yang dapat menjangkau calon peserta di daerah terpencil.

Misi 6 : Melestarikan dan Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal

- a) peningkatan kapasitas kelembagaan yang memberlakukan nilai budaya dan kearifan lokal;
- b) pengelolaan sistem informasi pembangunan kebudayaan; dan
- c) meningkatkan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Misi 7 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Wilayah Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan kepala daerah terkait;
- b) menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c) perlu perencanaan yang lebih matang serta didukung kemudahan dalam pengambilan data sekunder serta pendanaan yang terukur untuk dokumen perencanaan di bidang lingkungan hidup yang belum tersusun; dan
- d) rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup agar lebih mendukung data emisi karbon dan gas rumah kaca.

Misi 8 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara ideal dan merata pada seluruh wilayah;

- a) dukungan pembiayaan untuk pemenuhan spesifikasi Dana Alokasi Khusus sehingga pemenuhan persyaratan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus dapat terpenuhi;
- b) kedepan capaian penanganan jalan memerlukan penganggaran lebih maksimal untuk mencapai kinerja jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis sesuai dengan RTRW;
- c) sosialisasi terkait dengan zona pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, kesiapan lahan relokasi pasca bencana;
- d) perlu adanya peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan
- e) perlu adanya Desain Olahraga Daerah.

Misi 9 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada semua jenjang pemerintahan.

- a) meningkatkan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi;
- b) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c) meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam berdemokrasi; dan
- d) pencapaian opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dengan mengoptimalkan tanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan serta melakukan monitoring proses dan progresnya agar sesuai dengan persyaratan.

Misi 10 : Meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar sektor dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

- a) membuat aplikasi kerjasama;
- b) membuat regulasi yang mempermudah pelaksanaan kerja sama;
- c) kebijakan yang diterapkan dapat mempermudah pemohon dalam memperoleh izin;
- d) tersusunya cakupan standar operasional prosedur yang lebih luas, dan adanya pusat perbelanjaan pelayanan publik;
- e) penambahan menu pada aplikasi sistem perizinan secara elektronik yang mempermudah untuk pengklasifikasian jenis usaha;
- f) penambahan anggaran, merekomendasikan dan mengikutkan pameran skala nasional; dan
- g) perlu adanya dukungan perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan *Smart City*.

Misi 11 : Mempertahankan kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

- a) alokasi anggaran dalam penetapan, pembinaan dan pendampingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sigi, pembinaan sekolah alam yang terdapat di wilayah masyarakat hukum adat;
- b) melakukan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c) memberikan pelatihan dan uji kompetensi kepada petugas analisis sampel air dan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium agar lebih mempermudah dalam analisis sampel air.

Misi 12 : Meningkatkan harmoni sosial dan kesiapsiagaan bencana.

- a) perlu adanya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Forum

Kerukunan Umat Beragama;

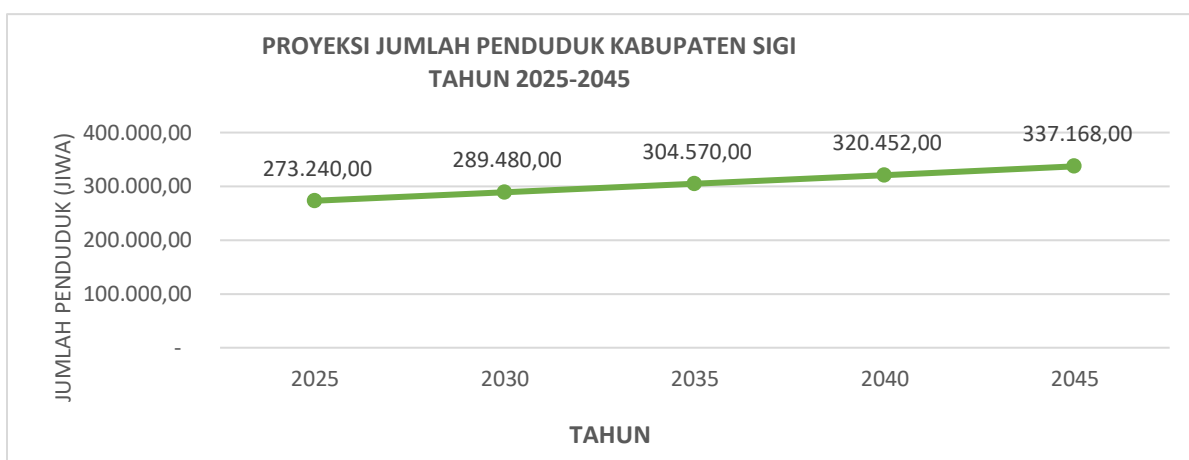
- b) perlunya diadakan forum dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sigi;
- c) semua pemangku kepentingan berperan aktif dan kerja sama untuk menyelesaikan persoalan batas antar desa;
- d) perlu adanya sosialisasi untuk menjaga situasi dan keamanan di wilayah potensi konflik;
- e) segera menaikkan status penetapan dan penegasan batas desa ke dalam peraturan bupati;
- f) meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- g) pemenuhan sarana dan prasarana pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- h) dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang mendukung Standar Pelayanan Minimal; dan
- i) penyaluran bantuan logistik sesuai identifikasi kebutuhan korban dan ketersediaan barang yang ada di gudang.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebanyak 273.240 jiwa. Jumlah penduduk bertambah sebanyak 63.928 jiwa menjadi sebanyak 337.168 jiwa pada tahun 2045. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2045 sebesar 1,02 persen setiap tahunnya.



Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035, BPS (data diolah)

TABEL 2.43
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2045

PENDUDUK TAHUN 2023 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6
266.812,00	273.240,00	289.480,00	304.570,00	320.452,00	337.168,00

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2035, BPS (data diolah)

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Sigi diproyeksikan meningkat dari sebanyak 139.600 jiwa pada tahun 2025 menjadi sebanyak 169.451 jiwa pada tahun 2045. Sedangkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan pada tahun 2045 sebanyak 167.717 jiwa meningkat dari sebanyak 133.640 jiwa tahun 2025.



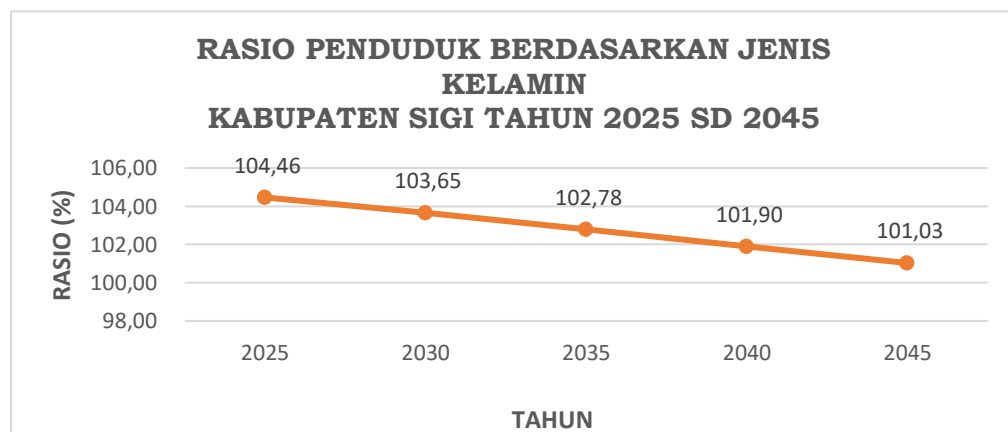
Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2035, BPS (data diolah)

Tabel 2.44
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045

JENIS KELAMIN	PENDUDUK TAHUN 2023 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
LAKI-LAKI	136.677,00	139.600,00	147.340,00	154.370,00	161.735,00	169.451,00
PEREMPUAN	130.135,00	133.640,00	142.140,00	150.200,00	158.717,00	167.717,00
RASIO	105,03	104,46	103,65	102,78	101,90	101,03

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2035, BPS (data diolah)

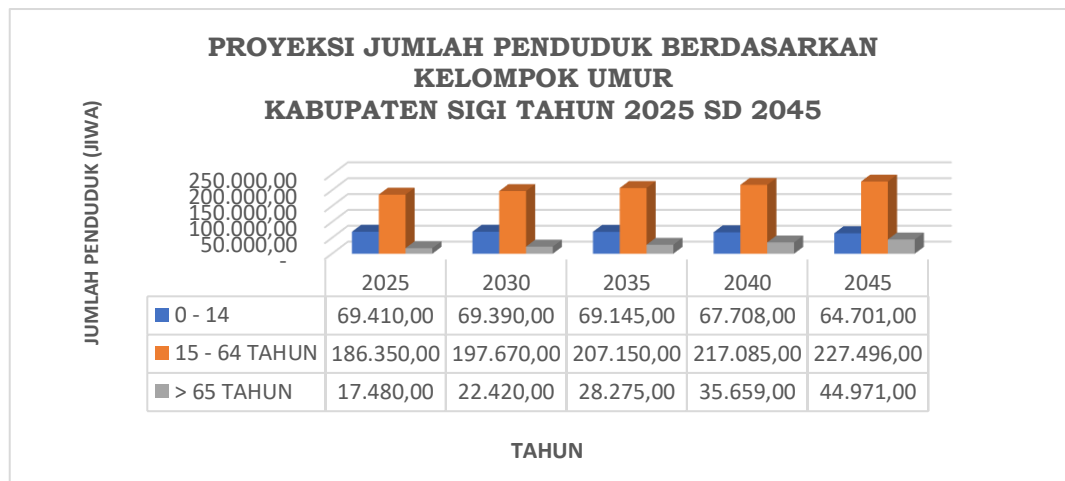
Pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sigi sebesar 101,03. Artinya terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio jenis kelamin semakin menurun sepanjang Tahun 2025–2045 menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki-laki.



Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2035, BPS (data diolah)

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk usia 0-14 tahun diproyeksikan turun dari 69.410 jiwa pada 2025 menjadi 64.701 jiwa pada 2045. Selama tahun 2025-2045, terjadi kenaikan penduduk usia 15-64 tahun dari 186.350 jiwa menjadi 227.496 jiwa. Terdapat peningkatan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 44.971 jiwa pada tahun 2045.



Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035, BPS (data diolah)

TABEL 2.45
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 SD 2045

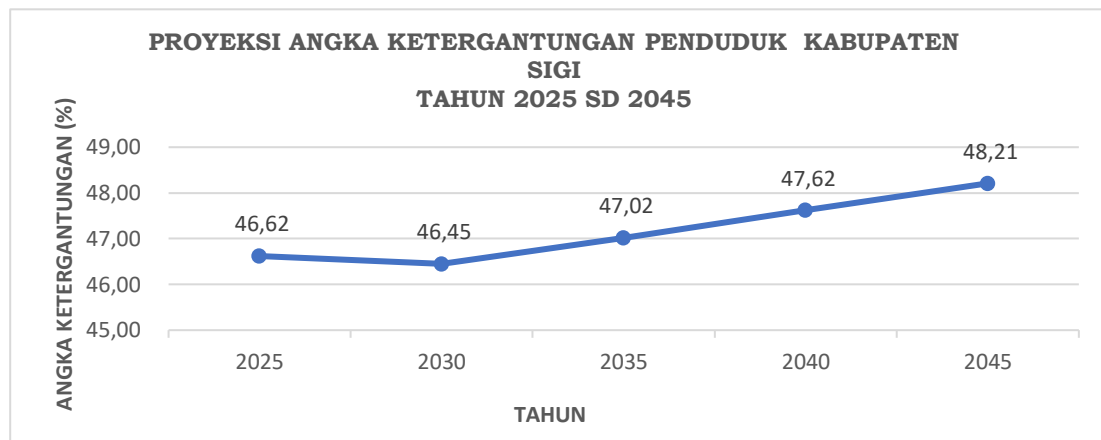
KELOMPOK UMUR	PENDUDUK TAHUN 2022 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
0 - 14	48.628,00	69.410,00	69.390,00	69.145,00	67.708,00	64.701,00
15 - 64 TAHUN	179.020,00	186.350,00	197.670,00	207.150,00	217.085,00	227.496,00
> 65 TAHUN	15.010,00	17.480,00	22.420,00	28.275,00	35.659,00	44.971,00
ANGKA KETERGANTUNGAN (%)	35,55	46,62	46,45	47,02	47,62	48,21

Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035, BPS (data diolah)

Pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sigi diproyeksikan meningkat menjadi 48,21 persen dari sebesar 46,62 persen pada tahun 2025. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64

tahun) menanggung sekitar 48 penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan sebesar 48,21 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 28,44 persen dan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia sebesar 19,77 persen. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif.



Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035, BPS (data diolah)

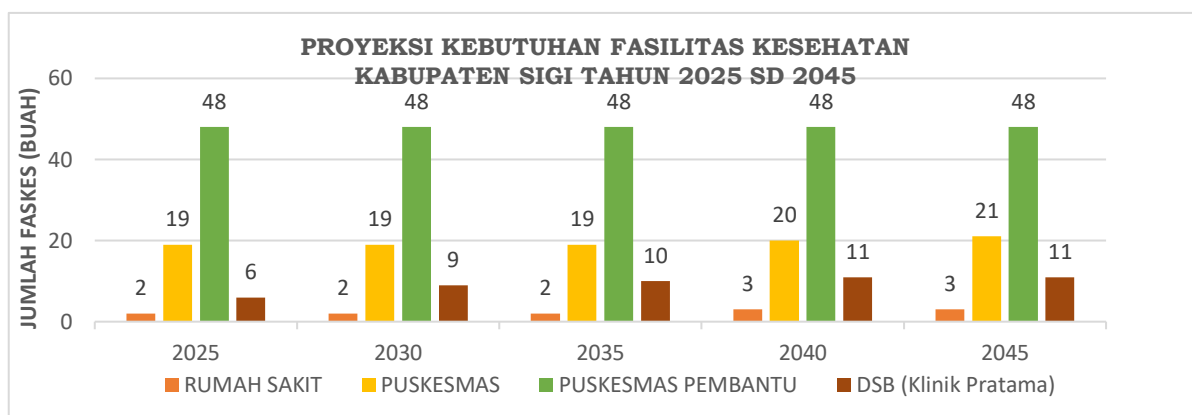
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

A. Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana bidang kesehatan hingga Tahun 2045 untuk Rumah Sakit bertambah menjadi 3 buah dari 2 buah pada Tahun 2025. Proyeksi Jumlah Puskesmas hingga tahun 2045 sebanyak 21 Puskesmas, meningkat dari 2025 yang sebanyak 19 Puskesmas.

Untuk proyeksi jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) tidak mengalami perubahan jumlah sebanyak 48 Pustu pada 2045. Selanjutnya proyeksi

Klinik Pratama tahun 2025 sebanyak 6 (enam) buah meningkat menjadi 11 buah pada 2045. Perhitungan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dihitung sesuai SNI 03 – 1733 – 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.



Sumber : Propil Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2022 (data diolah).

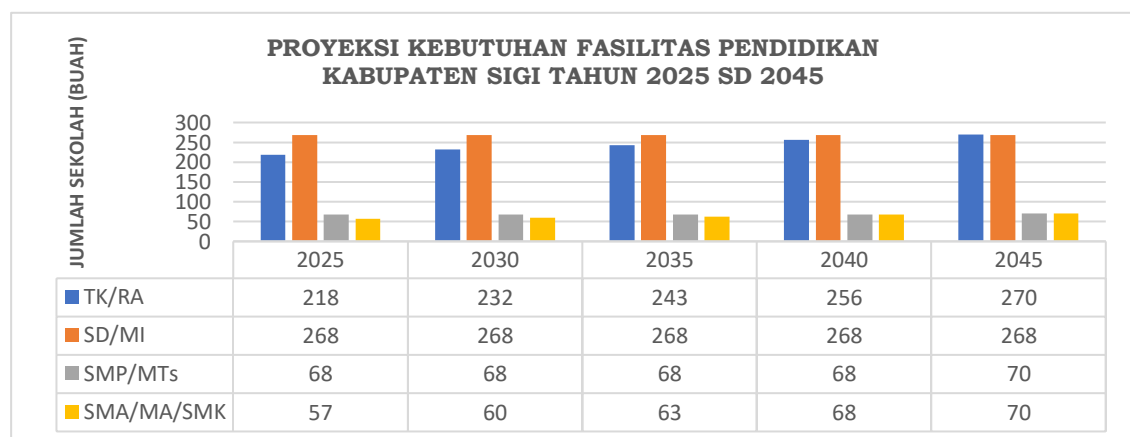
TABEL 2.46
PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 SD 2045

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH PENDUDUK	266.812,00	273.240,00	289.480,00	304.570,00	320.452,00	337.168,00
PROYEKSI FASILITAS KESEHATAN						
RUMAH SAKIT	2	2	2	2	3	3
PUSKESMAS	19	19	19	19	20	21
PUSKESMAS PEMBANTU	48	48	48	48	48	48
DSB (Klinik Pratama)	4	6	9	10	11	11

Sumber : Propil Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2022 (data diolah).

B. Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan

Proyeksi kebutuhan terhadap sarana prasarana pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak/Radhiatul Anfaal meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah anak didik setingkat TK/PAUD menjadi 270 buah pada 2045 dibandingkan 2025 sebanyak 218 buah. Untuk tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak mengalami perubahan hingga 2045 sebanyak 268 buah, karena jumlahnya telah melebihi dari jumlah siswa pada tingkat pendidikan tersebut. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada 2045 sebanyak 70 buah meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak 68 buah. Kemudian proyeksi untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan pada 2025 sebanyak 57 buah meningkat menjadi 70 buah pada 2045. Sama halnya dengan penghitungan kebutuhan sarana prasarana Kesehatan, perhitungan kebutuhan sarana prasarana bidang pendidikan dihitung sesuai SNI 03 – 1733 – 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.



Sumber : Data Dapodikdasmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi Tahun 2023 (data diolah).

Tabel 2.47
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Sigi Tahun 2025 Sd 2045

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH PENDUDUK	266.812,00	273.240,00	289.480,00	570,00	320.452,00	337.168,00
PROYEKSI FASILITAS PENDIDIKAN						
TK/RA	208,00	218,00	232,00	244,00	256,00	270,00
SD/MI	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
SMP/MTs	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	70,00
SMA/MA/SMK	32	57	60	63	68	70

Sumber: Data Dapodikdasmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi Tahun 2023 (data diolah).

C. Kebutuhan Sarana Prasarana Rumah/Tempat Tinggal

Rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Pertumbuhan penduduk memberikan dampak akan kebutuhan rumah dimana setiap orang akan berusaha untuk mempunyai rumah karena kebutuhan mereka, yang disesuaikan juga dengan selera dan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut. Kondisi saat ini tahun 2023 jumlah rumah di Kabupaten Sigi sebanyak 66.926 unit. Melihat dari Tren dinamika pertumbuhan penduduk dimasa akan datang dalam periode lima tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, kebutuhan akan prasarana rumah/tempat tinggal pasti akan bertambah. Analisis proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal untuk tahun 2045 sebanyak 76.926 unit rumah, ini meningkat jika dibandingkan analisis proyeksi awal tahun perencanaan 2025 sebanyak 66.926 unit rumah atau tren peningkatan sebanyak 10.000 unit rumah selama periode perencanaan. Proyeksi kebutuhan rumah dilakukan

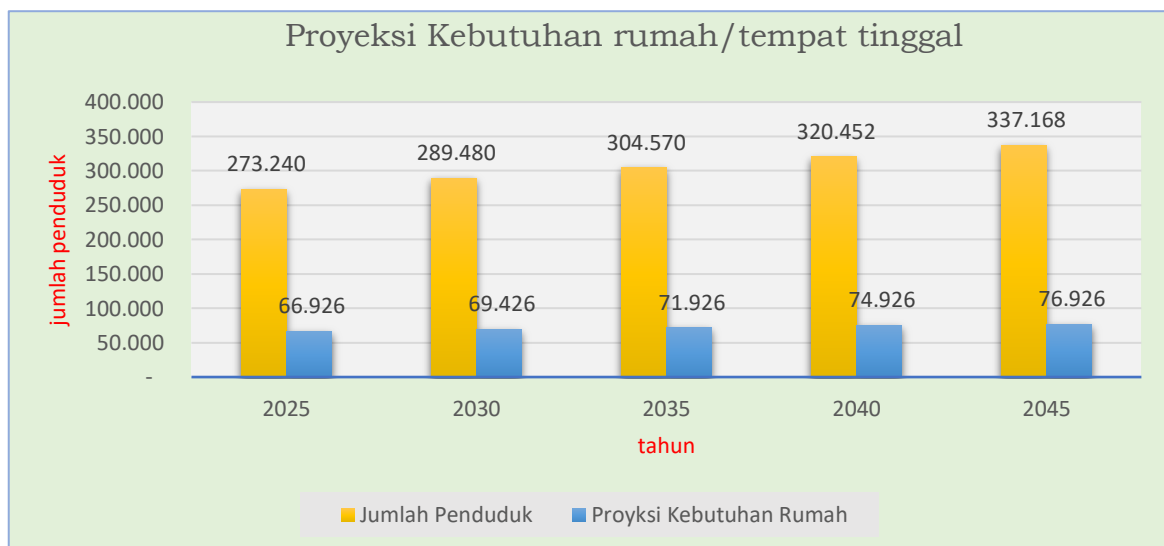
dengan asumsi standar perhitungan yang berlaku, bahwa setiap unit rumah

Tabel 2.48 Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal Kabupaten Sigi

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	266,812	273,240	289,480	304,570	320,452	337,168
Proyksi Kebutuhan Rumah	65,926	66,926	69,426	71,926	74,926	76,926

terdapat 5 jiwa yang menghuninya.

Grafik 3.x Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di kabupaten Sigi tahun 2025-2045



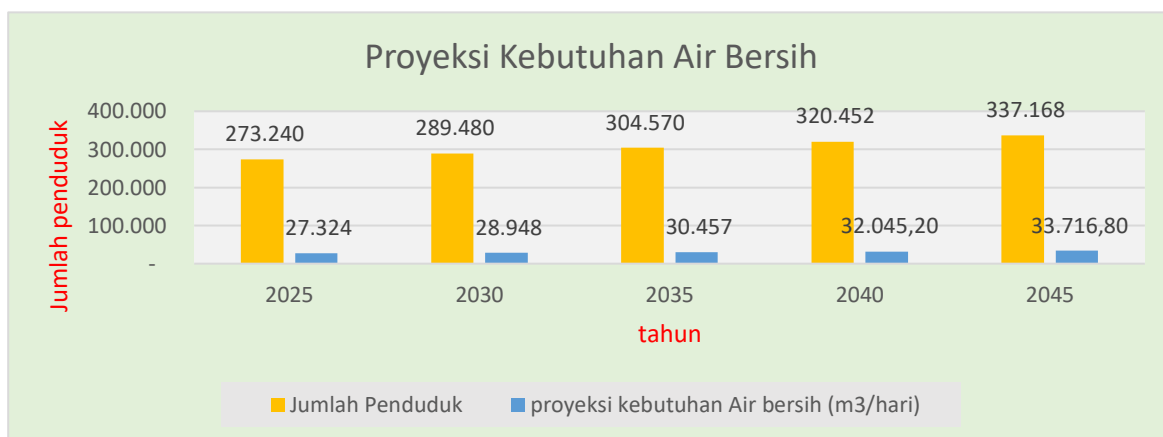
Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035 BPS, SNI (data diolah)

D. Kebutuhan Sarana Prasarana Air Bersih

Air bersih/air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan merupakan salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi, oleh karenanya penyediaan Air bersih/air minum dalam suatu kota sangat diperlukan, untuk pelayanan lingkungan perumahan dan fasilitas pendukungnya. Kondisi saat ini tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Sigi sebesar 266.812 jiwa dengan kebutuhan air sebanyak 26.681,20 m³/hari. Tren kebutuhan air

minum lima tahun kedepan sampai periode dua puluh lima tahun akan mengalami peningkatan. Berdasarkan standar SNI 19-6727.1-2002, pemenuhan akses air minum dihitung dengan asumsi standar kebutuhan jenis pemakaian perdesaaan 100 l/jiwa/hari. Analisis proyeksi kebutuhan air minum pada tahun 2045 sebanyak 33.716,80 m³/hari perjiwa penduduk sedangkan pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan air minum pada awal tahun perencanaan sebanyak 27.324 m³/hari perjiwa penduduk atau mengalami tren kenaikan kebutuhan sebesar 6.392,80 m³/hari perjiwa.

Grafik 3.x Proyeksi kebutuhan air minum di kabupaten Sigi Periode 2025-2045



Sumber : Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035
BPS, SNI (data diolah)

Tabel 2.49
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sigi

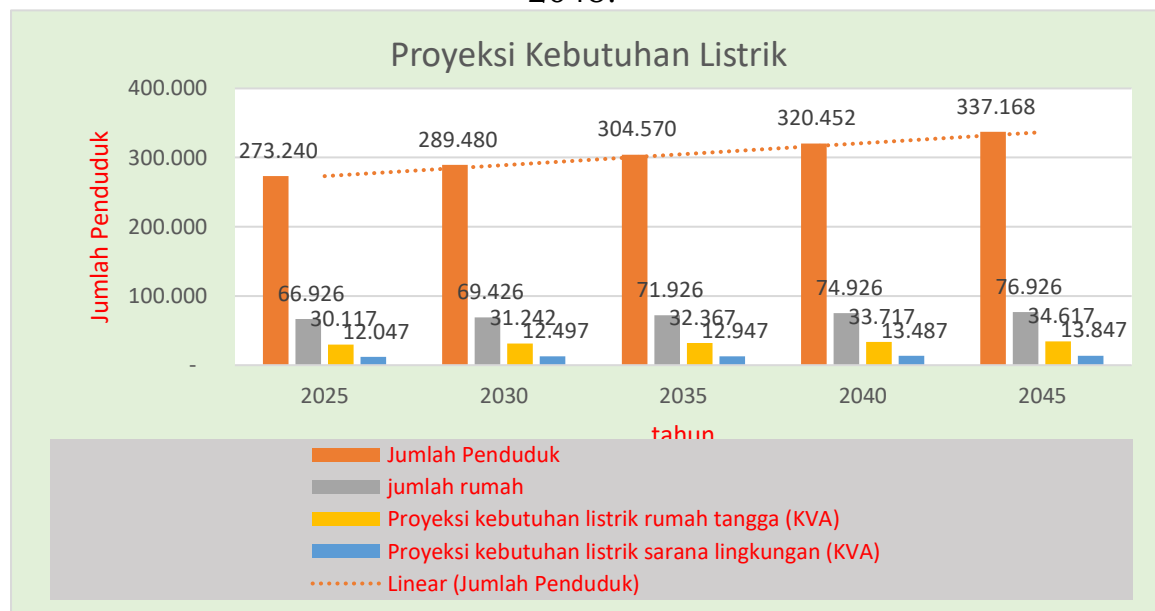
Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	266,812	273,240	289,480	304,570	320,452	337,168
proyeksi kebutuhan Air bersih (m ³ /hari)	26,681.20	27,324	28,948	30,457	32,045.20	33,716.80
						6,392.80

Standar: SNI 19-6727.1-2002, jenis pemakaian perdesaaan standar 100 l/jiwa/hari.

E. Kebutuhan Sarana Prasarana Energi/Listrik

Kebutuhan sarana prasarana Lingkungan perumahan seperti energi/Listrik harus dilengkapi perencanaan penyediaan jaringan listrik sesuai ketentuan dan persyaratan teknis. Proyeksi Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik energi/listrik harus juga memperhatikan dinamika kependudukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Kondisi saat ini tahun 2023 kebutuhan akses Listrik sebesar 29.667 KVA per rumah tangga. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana energi/Listrik per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan perhitungan standar (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Analisis kebutuhan perencanaan jaringan akses Listrik dilakukan dengan standar asumsi setiap rumah harus memiliki jaringan terpasang minimum 450 VA (0,450 KVA setelah dikonversi) kemudian ditambah 40 persen dari kebutuhan rumah tangga untuk perencanaan kebutuhan jaringan Listrik sarana lingkungan lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan Listrik pada tahun 2045 sebesar 34.617 KVA per rumah dan kebutuhan Listrik sarana lingkungan lainnya sebesar 13.847 KVA. Proyeksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan kebutuhan awal perencanaan tahun 2025 sebesar 29.667 KVA setiap rumah dan kebutuhan Listrik sarana lingkungan sebesar 11.867 KVA.

Grafik 3.x Proyeksi kebutuhan energi/listrik di kabupaten Sigi tahun 2025-2045.



Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035 BPS, SNI (data diolah)

Tabel 2.50
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sigi

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	266,812	273,240	289,480	304,570	320,452	337,168
jumlah rumah	65,926	66,926	69,426	71,926	74,926	76,926
Proyeksi kebutuhan listrik rumah tangga (KVA)	29,667	30,117	31,242	32,367	33,717	34,617
Proyeksi kebutuhan listrik sarana lingkungan (KVA)	11,867	12,047	12,497	12,947	13,487	13,847

*) standar: SNI 03-1773-2004, kebutuhan daya listrik 450 VA/RT dan 40 persen sarana lingkungan DTRT

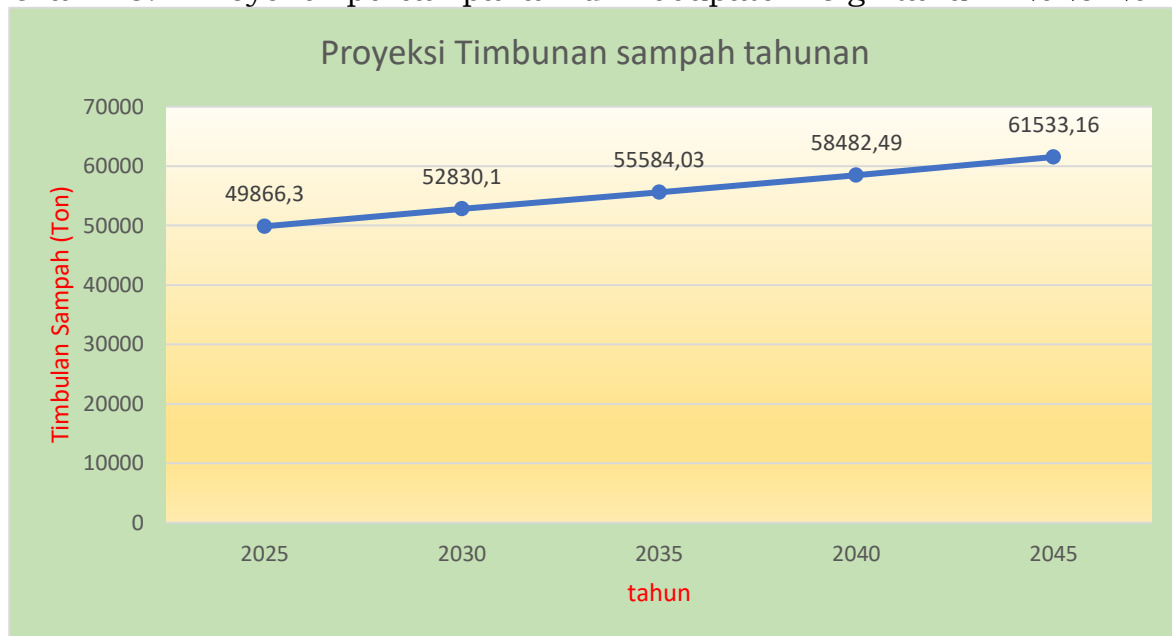
F. Kebutuhan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Proyeksi Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan persampahan harus juga memperhatikan dinamika kependudukan di Kabupaten Sigi. Kondisi saat ini tahun 2023 dari data dinas lingkungan hidup Kabupaten Sigi jumlah timbulan sampah tahunan sebanyak 47.755,88 ton.

Teknik operasional pengolahan sampah di Kabupaten Sigi sudah mengikuti standar SNI 19-2454-2002 yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah secara terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Analisis proyeksi jumlah timbulan sampah dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk dengan standar timbulan sampah rata-rata 0,5 liter/jiwa. Dari hasil analisis proyeksi diketahui pada tahun 2045 jumlah timbulan sampah tahunan di Kabupaten Sigi sebanyak 61.533,16 ton, sedangkan pada tahun 2025 awal tahun perencanaan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan penduduk sebanyak 49.866,3 ton pertahun. Berdasarkan hasil analisis proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Sigi secara tren mengalami peningkatan timbulan sampah oleh karena pertambahan jumlah penduduk antara kondisi tahun saat ini 2023 sampai tahun rencana 2045 sebesar 13.777,31 Ton.

Grafik 3.x Proyeksi persampahan di kabupaten Sigi tahun 2025-2045.



Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2020-2035
BPS, SNI (data diolah)

Tabel. 2.51
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	266,812	273,240	289,480	304,570	320,452	337,168
Proyeksi Timbunan sampah tahunan dalam Ton	47755.85	49866.3	52830.1	55584.03	58482.49	61533.16

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sigi

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kebencanaan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

A. Kebijakan Penataan Ruang

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Sigi, maka disusun kedalam kebijakan penataan ruang yang antara lain:

- a. pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat PKL, PPK dan PPL secara berjenjang dan merata diseluruh wilayah kabupaten
- b. peningkatan aksesibilitas dan sistem prasarana wilayah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana;
- c. pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- d. pengembangan komoditas sektor pertanian dan industri kecil menengah yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
- e. peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat dan pihak lainnya
- f. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
- g. pembangunan dan pengendalian kawasan berbasis mitigasi bencana; dan
- h. penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

B. Strategi Penataan Ruang

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa strategi penataan ruang untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi diantaranya:

C. Strategi Pengembangan Perkotaan

- a) mengembangkan Bora dan sekitarnya sebagai PKL yang mampu melayani seluruh wilayah kabupaten
- b) mengembangkan Makmur dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian timur
- c) mengembangkan Binangga dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian utara yang berbatasan dengan Kota Palu dan bagian barat Kabupaten Sigi
- d) mengembangkan Bolapapu dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian tengah; dan
- e) mengembangkan Peana dan sekitarnya sebagai PPK untuk mendorong pertumbuhan kawasan pada bagian selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

D. Strategi peningkatan aksesibilitas dan sistem prasarana wilayah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana

- a) menghubungkan antar PKL, PPK dan PPL melalui sistem jaringan transportasi darat
- b) membangun dan meningkatkan jaringan jalan kabupaten untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur evakuasi bencana
- c) mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan
- d) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan
- e) mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan

prasarana air baku hingga kawasan perdesaan

- f) mengembangkan sistem jaringan irigasi yang terhubung dan mengalir seluruh kawasan pertanian lahan pangan unggulan dan berkelanjutan; dan
 - g) mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan
- E. Strategi pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan
- a) mempertahankan kawasan hutan fungsi lindung di luar kawasan outline yang telah ditetapkan, dari kegiatan budidaya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami
 - b) membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perlindungan setempat
 - c) merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
 - d) mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
- F. Strategi pengembangan komoditas sektor pertanian dan industri kecil menengah yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar
- a) mengembangkan sistem pertanian dan perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam penyelenggaraan kegiatan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata
 - b) mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran

- c) memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budi daya pertanian lahan basah
 - d) menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - e) menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pengembalaan ternak;
 - f) menetapkan dan membangun industri kecil dan menengah;
 - g) mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang didukung sarana dan prasarana industri pada sentra industri kecil dan menengah maupun di luar sentra industri kecil dan menengah
 - h) meningkatkan infrastruktur strategis daerah yang mendukung majunya industri termasuk aksesibilitas pada sumber bahan baku dan logistik
- G. Strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat
- a) mengembangkan kegiatan pariwisata di kawasan konservasi secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
 - b) mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata permandian air panas, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - c) menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda

cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;

- d) menjaga dan mengembangkan festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
- e) mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul

H. Strategi peningkatan upaya pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

- a) meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b) meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; dan
- c) menyelenggarakan pembinaan dan penerbitan izin industri hasil hutan.

I. Strategi pembangunan dan pengendalian kawasan berbasis mitigasi bencana

- a) menetapkan fungsi dan peruntukkan ruang dengan memperhatikan kerawanan terhadap bencana likuifaksi, gerakan tanah, banjir, dan sempadan sesar
- b) melindungi kawasan rawan bencana dari pengembangan permukiman dan kegiatan budi daya lainnya untuk mengurangi resiko bencana; dan
- c) menyusun aturan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kebencanaannya

J. Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

- a) menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
- b) menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c) menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.7.2 Perwujudan Rencana, Struktur Ruang Dan Kawasan Strategis

Kabupaten Sigi

Secara umum perwujudan distribusi spasial rencana pengembangan wilayah sesuai tujuan penataan ruang di Kabupaten Sigi dijabarkan sebagai berikut:

A. Rencana Struktur Ruang

a) Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sigi berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan Masyarakat terbagi:

1. Desa Bora Kecamatan Sigi Kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal
2. Desa Binangga Kecamatan Marawola sebagai Pusat Pelayanan Kawasan
3. Desa Makmur Kecamatan Palolo sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

4. Desa Peana Kecamatan Pipikoro sebagai Pusat Pelayanan Kawasan
5. Desa Tomado Kecamatan Lindu sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
6. Desa Kamarora A Kecamatan Nokilalaki sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
7. Desa Kota Rindau Kecamatan Dolo sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
8. Desa Kaleke Kecamatan Dolo Selatan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
9. Desa Balane Kecamatan Kinovaro sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
10. Desa Dombu Kecamatan Marawola Barat sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
11. Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
12. Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
13. Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
14. Desa Lawua Kecamatan Kulawi Selatan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan

b) Sistem Jaringan Transportasi

1. Sistem jaringan jalan nasional
 - I. pembangunan jalan baru dengan fungsi jalan arteri primer (JAP), meliputi ruas jalan By Pass Palu Sigi Parigi dan ruas jalan Lingkar

Palu-Sigi-Donggala-Parigi

- II. usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer tiga (JKP-3) menjadi jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi ruas jalan Kalukubula – Kalawara, ruas jalan Kalawara – Kulawi, dan ruas jalan SP. Kulawi – Gimpu
- III. usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer empat (JKP-4) menjadi jalan kolektor primer satu (JKP-1), pada ruas jalan Gimpu – Peana
- IV. usulan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer satu (J K P - 1) , pada ruas jalan Peana – Kalamanta - Seko (Bts Sulsel)

2. Jaringan jalan provinsi

- I. usulan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi ruas jalan Pombewe – Oloboju; dan ruas jalan Biromaru – Paneki
- II. usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer (JKP-4) kewenangan Kabupaten menjadi jalan kolektor primer tiga (JKP-3), yaitu ruas jalan Tanggarawa – Batas (Wugaga)
- III. usulan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer tiga (JKP-3), meliputi ruas jalan Boladangko – Towulu, ruas jalan Towulu – Banggaiba – Rio Pakava (Kab. Donggala), dan ruas jalan Palolo – Manggalapi (Batas)

3. Sistem Jaringan Jalan Kabupaten yang tersebar di Kabupaten Sigi.

a. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api, berupa rencana pembangunan jaringan kereta api Pulau Sulawesi jalur Palu – Sigi – Parigi – Poso – Malili

- b. Sistem Jaringan Sungai Danau dan Penyeberangan Danau Lindu Kecamatan Lindu
- c. Sistem Jaringan Energi
- d. Sistem jaringan energi berupa jaringan infrastruktur ketenaga listrikan, meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya antara lain:
 - I. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bora Pulu (FTP 2)
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Lariang
 - c. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kulawi
 - d. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Danau Lindu
 - e. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Lariang
 - f. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Morowo
 - g. pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Gumbasa; dan
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Sopo
 - I. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Sigi ke incomer 1 phi (Palu Baru – Mauro/Parigi) dan SUTT 150 KV Bora Pulu ke incomer 2 phi (Palu Baru – Poso);
- b. gardu induk Sigi 150/20 KV sebagai bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik;
- c. jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR tersebar diseluruh wilayah kecamatan

b) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan Telekomunikasi Kabupaten Sigi, meliputi:

- a. Jaringan Tetap berupa sistem jaringan kabel di PKL Bora, PPK Binangga, PPK Makmur, PPK Bolapapu, dan PPK Peana
- b. Jaringan Bergerak yaitu jaringan bergerak seluler berupa pengembangan BTS di setiap kecamatan.

c) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

I. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, terdiri dari:

- a) Wilayah Sungai Palu – Lariang, meliputi DAS Palu, DAS Lariang, DAS Sulung, DAS Surumana, DAS Buluri, dan DAS Owenumpu; dan

- b) Wilayah Sungai Parigi – Poso meliputi DAS Tambarana

II. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, meliputi:

- a. air permukaan diseluruh sungai dan danau di Kabupaten Sigi

- b.* embung meliputi Embung Miu dan Embung Wuno
- c.* air tanah pada cekungan air tanah (CAT), meliputi CAT Palu, CAT Bobo, CAT Langko, CAT Watutua

III. prasarana sumber daya air, terdiri atas:

- a.* sistem jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan nasional pada DI Gumbasa; sistem jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi pada DI Kekeloe dan DI Paneki
- b.* sistem jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi pada DI Kekeloe dan DI Paneki
- c.* sistem jaringan irigasi di seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten, terdiri atas DI Kecamatan Sigi Biromaru, DI Kecamatan Dolo, DI Kecamatan Dolo Barat, DI Kecamatan Dolo Selatan, DI Kecamatan Gumbasa, DI Kecamatan Kulawi, DI Kecamatan Kulawi Selatan, DI Kecamatan Lindu, DI Kecamatan Marawola, D I Kecamatan Nokilalaki, dan DI Kecamatan Pipikoro
- d.* sistem pengendali banjir berupa normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul banjir, rehabilitasi bronjong penguat tebing, dan pembangunan sabo dam diseluruh sungai yang berada pada kawasan rawan banjir

d) Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Lainnya

- I. Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan pada SPAM regional dan ibu kota Kecamatan (IKK)
- II. Sistem penyediaan air limbah (SPAL) di Desa Ngatabaru

Kecamatan Sigi Biromaru

- III. Sistem jaringan persampahan wilayah untuk penampungan sementara di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Marawola serta pengelolaan akhir di Kecamatan Sigi Biromaru

B. Rencana Pola Ruang

Distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Sigi terdiri atas:

a. Kawasan Lindung

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar di Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kulawi, Dolo Selatan, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat.
- Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan Sungai yang tersebar di Kabupaten Sigi
- Kawasan konservasi pada kawasan rawan bencana, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

b. Kawasan peruntukan budidaya

- Kawasan hutan produksi yang tersebar di Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Pipikoro dan Kecamatan Sigi Biromaru
- Kawasan pertanian terdapat diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Marawola Barat
- Kawasan perikanan untuk pengembangan potensi budidaya diseluruh wilayah Kecamatan

- Kawasan pertambangan dan energi berupa pertambangan mineral logam di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Sigi Biromaru
- Kawasan peruntukkan industry berupa sentra industry kecil dan menengah
- Kawasan pariwisata pada kawasan kebun raya Desa Sidondo yang berfungsi sebagai perlindungan plasma nuffah dan potensi wisata lainnya di beberapa Kecamatan
- Kawasan permukiman
- Kawasan pertahanan dan keamanan
- Kawasan peruntukan lain

C. Kawasan Strategis Kabupaten

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Sigi berdasarkan sudut kepentingan pengembangan wilayah berupa:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- Kawasan Perkotaan Bora
- Kawasan Perkotaan Binangga
- Kawasan Perkotaan Makmur
- Kawasan Perkotaan Bolapapu
- Kawasan Perkotaan Peana

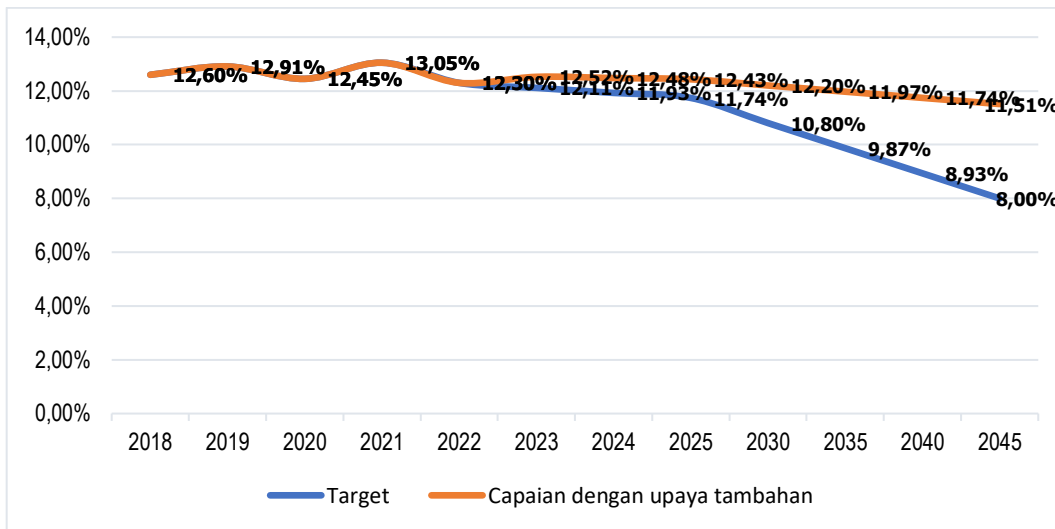
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya yang berada di Desa Toro, Desa Namo, Desa Boladangko, dan Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi

c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup pada taman kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

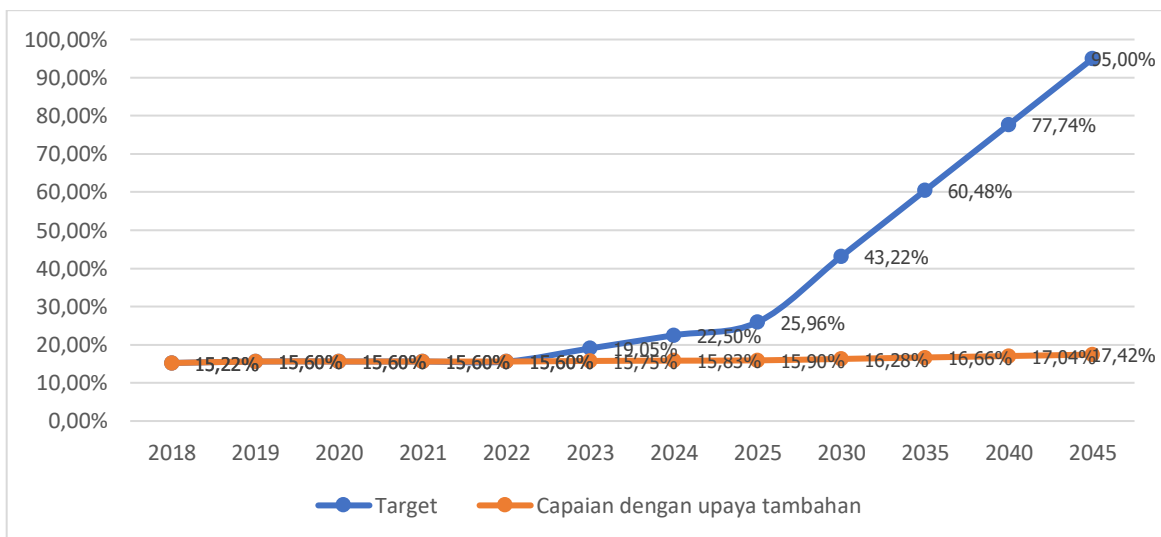
2.8. Integrasi KLHS RPJPD dan RPJPD tahun 2025-2045

Alternatif Skenario dan Rekomendasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Upaya Tambahan.

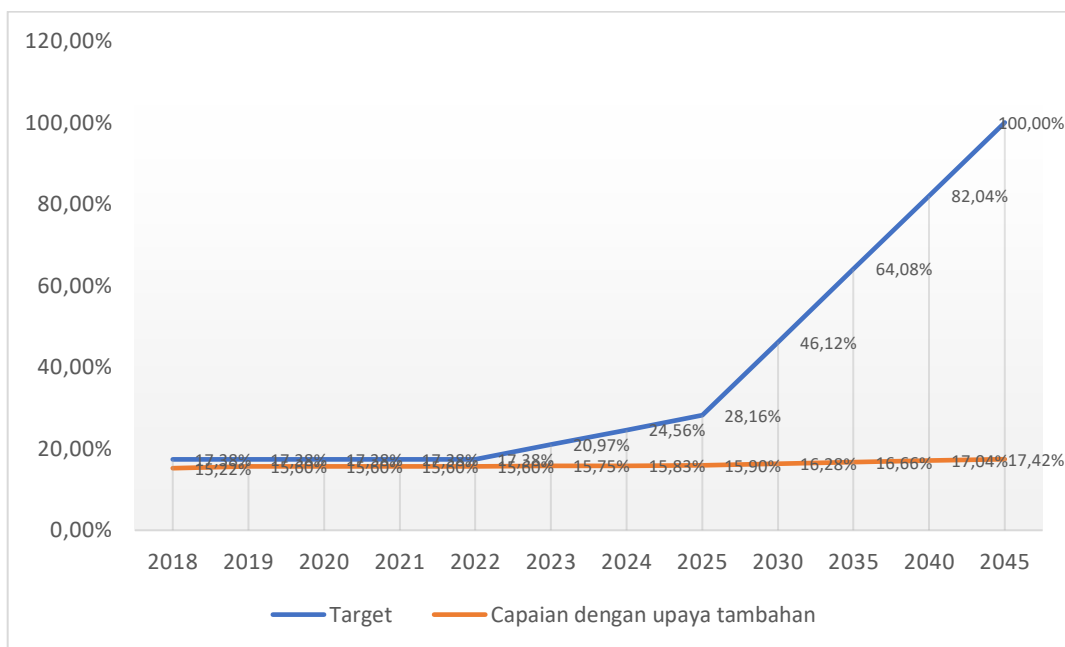
1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur



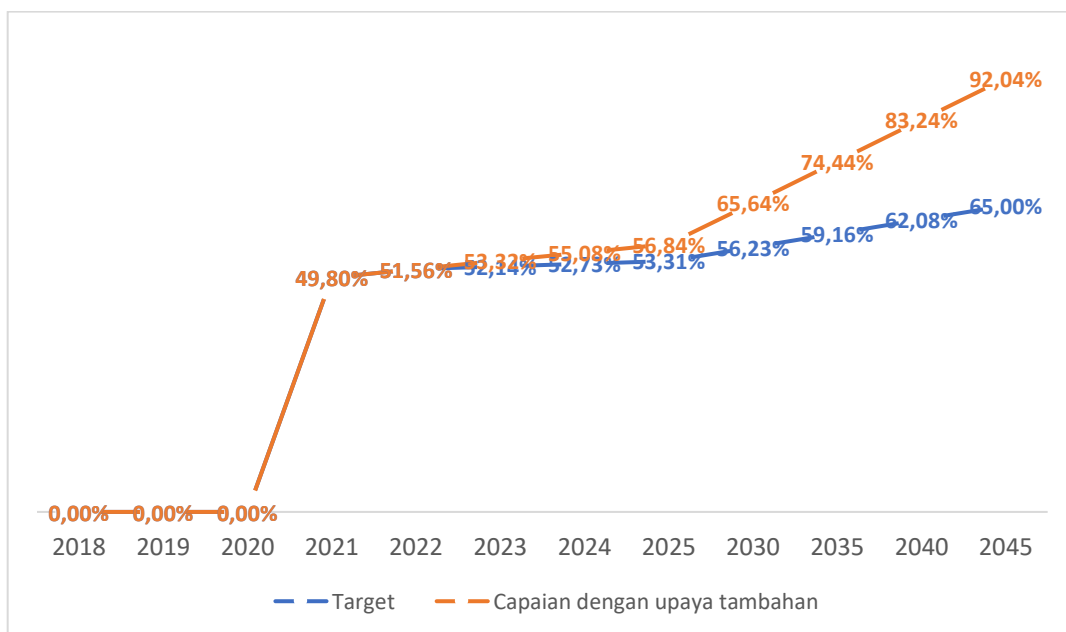
2. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan



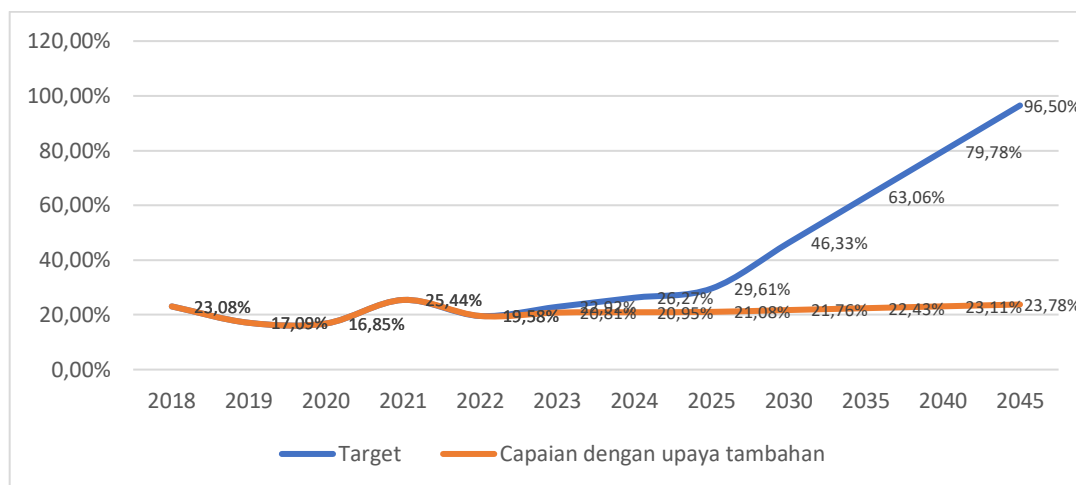
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan



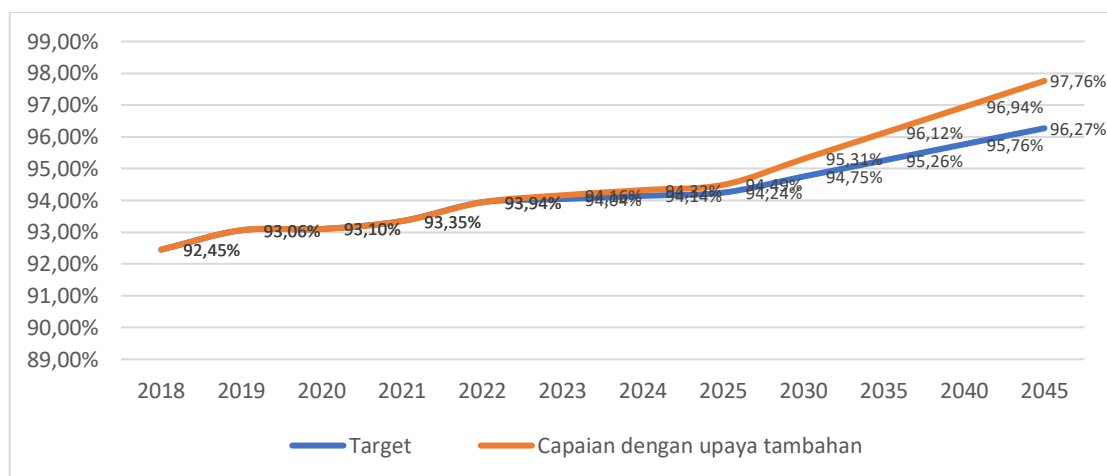
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin



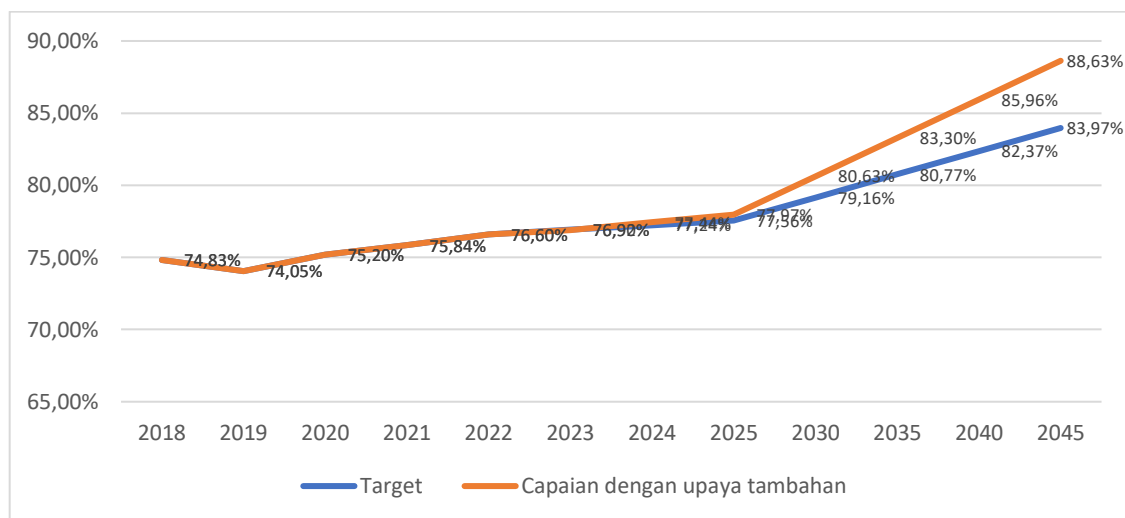
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (Persentase rumah tinggal bersanitasi)



Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat



Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 1:

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan

produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.6 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*.

10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya

12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak

17.12.Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan *World Trade Organization* termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (*rules of origin*) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.

17.13.Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menurunkan angka kemiskinan	Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan daya saing; Pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		Meningkatkan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Menurunnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial Meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan	Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			bantuan/Program Keluarga Harapan.	
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki- laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta		Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan; Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		Meningkatkan proporsi rumah tinggal bersanitasi layak Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. Meningkatkan proporsi rumah tangga pengguna listrik	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif; Meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan; Meningkatkan pemenuhan Anggaran Pendidikan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan;

1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		Meningkatkan jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Meningkatkan jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/	Peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi bencana; Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan daya saing; pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis
-----	---	--	---	--

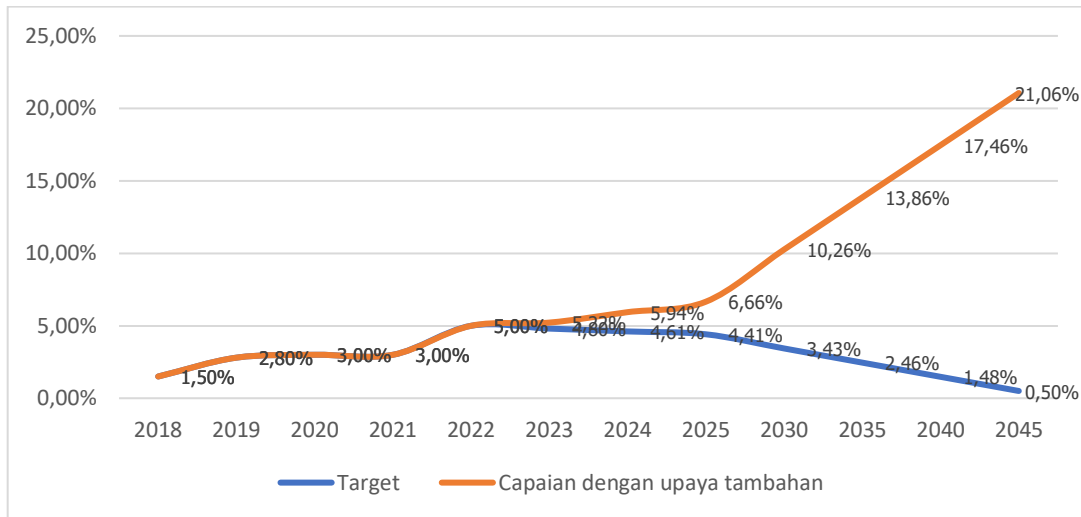
			Madrasah Aman Bencana) Meningkatkan ketahanan untuk menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Meningkatkan ketahanan untuk menurunkan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan; Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan vokasi dan relevansi keahlian tenaga kerja; Menjaga Stabilitas Pertumbuhan yang Memihak Masyarakat Miskin dan Rentan serta Menstimulasi Pertumbuhan Masyarakat Kelompok Menengah; Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi
--	--	--	--	---

				lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi; Memperkuat perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi; Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, inklusif, dan bernilai tambah tinggi; Peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi bencana
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber,		Meningkatkan proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program	Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan daya saing;

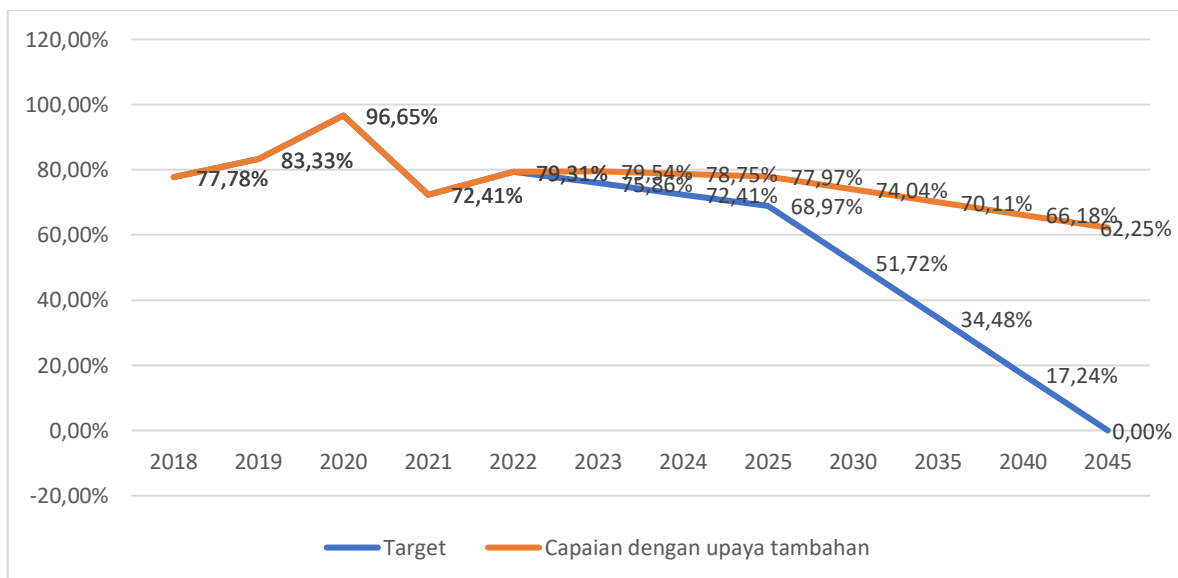
termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		pemberantasan kemiskinan. Memastikan tersedianya anggaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Meningkatkan pemenuhan Anggaran Pendidikan dan sosial; Meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan;
--	--	--	---

Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk

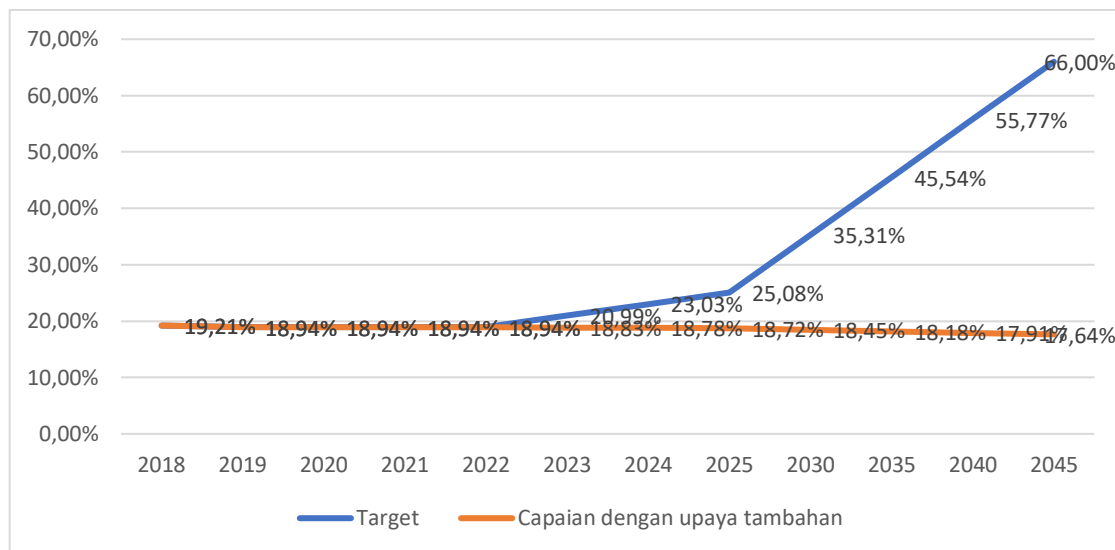
Prevalensi HIV pada populasi dewasa



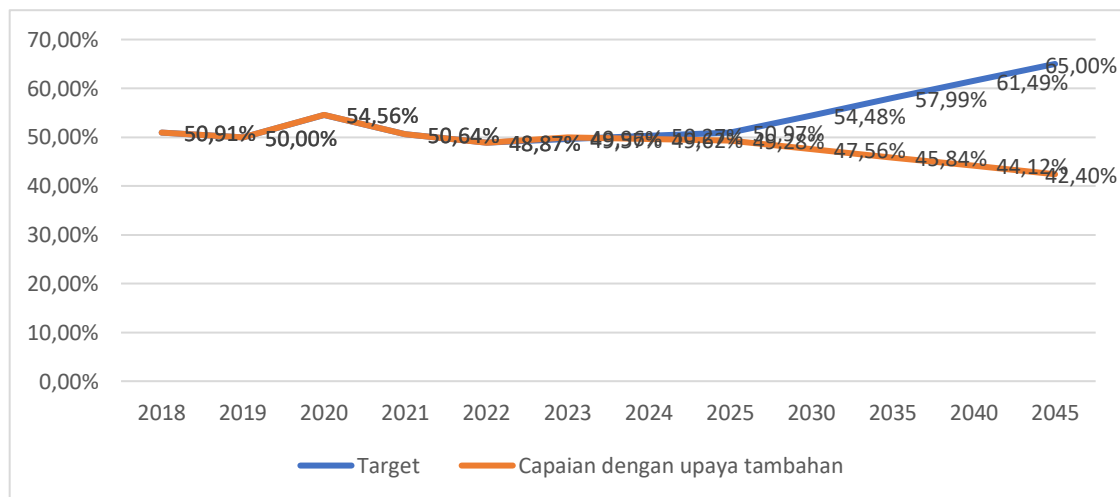
2. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)



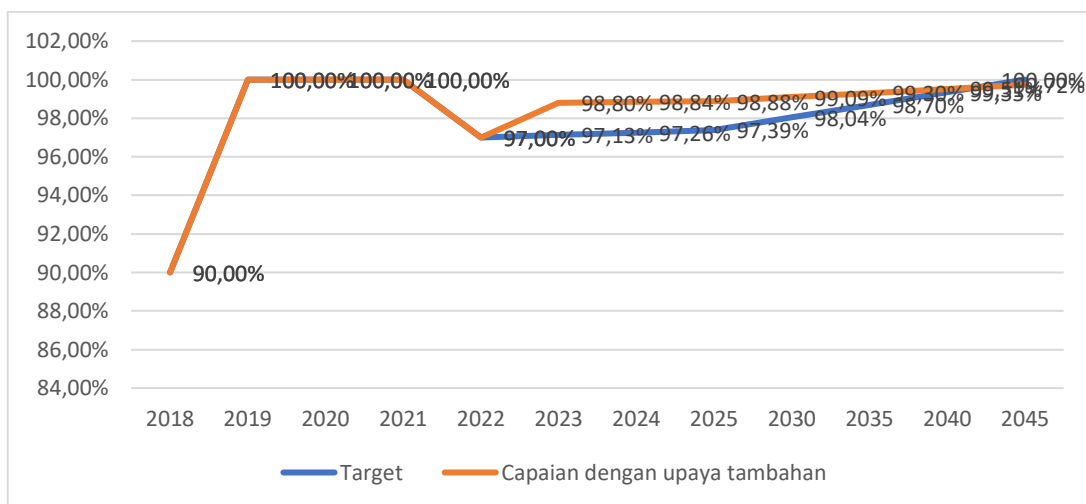
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern



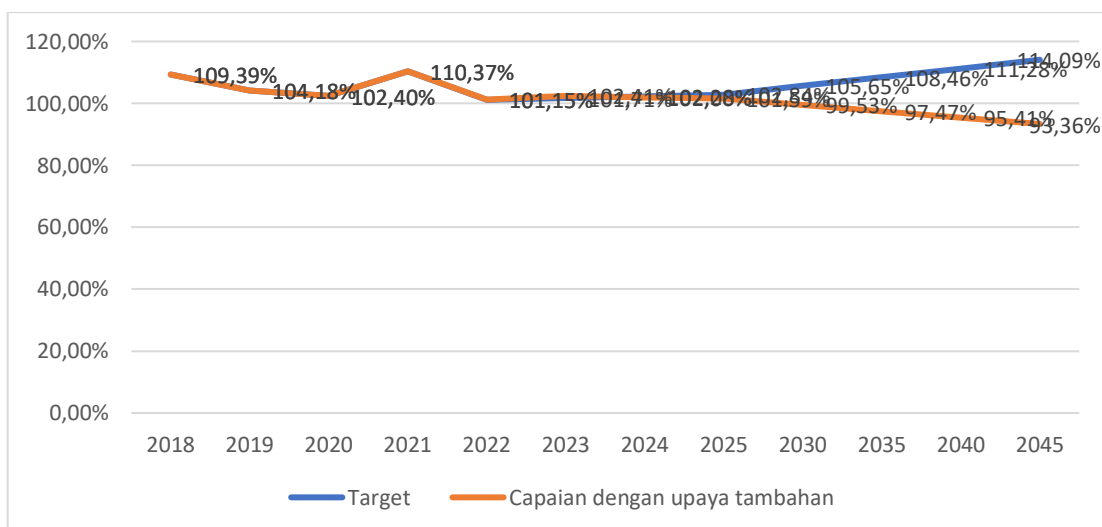
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin



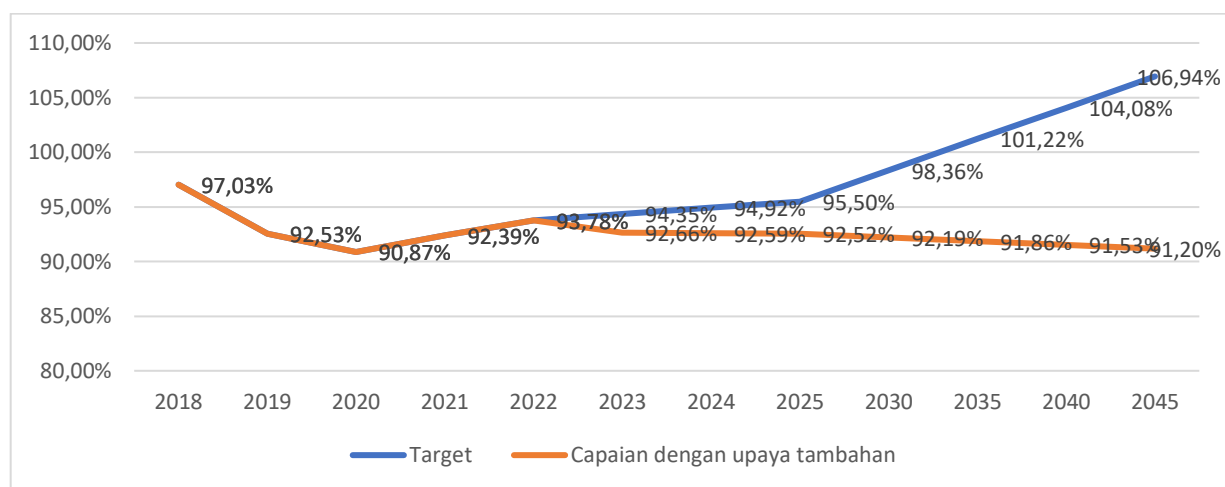
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk



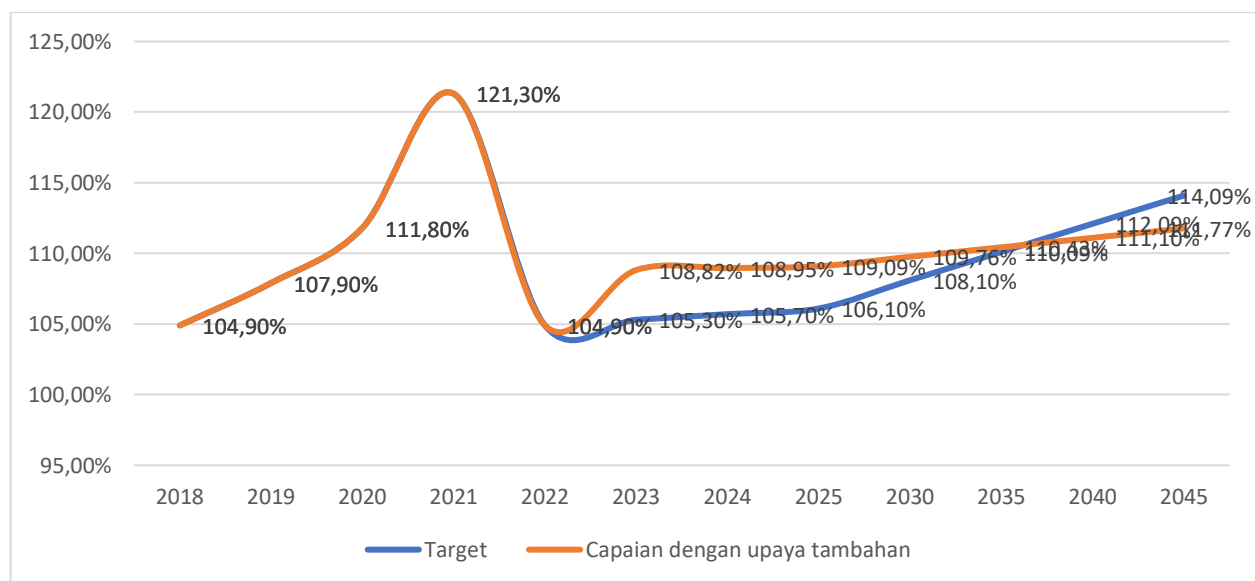
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat



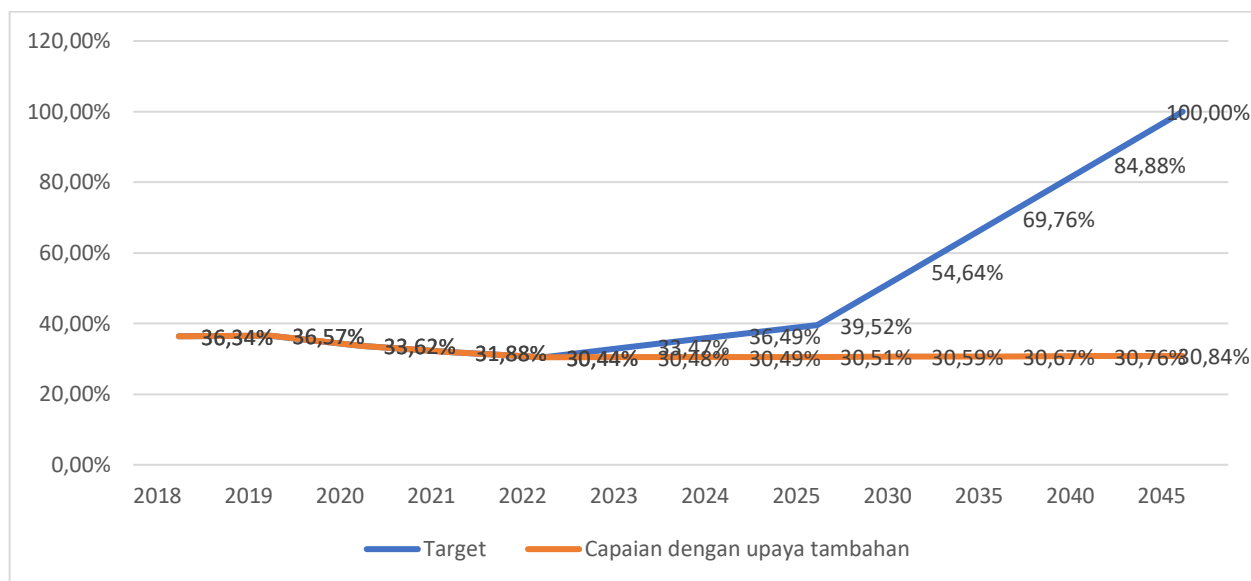
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat



Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat



Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 3:

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan

produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance* bagi negara kurang berkembang

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*.

10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.

15.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains,

teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020

17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan *World Trade Organization* termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (*rules of origin*) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar

17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menurunkan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; Meningkatkan status gizi masyarakat; Meningkatkan kesehatan ibu, anak; Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan tentang penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan; Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

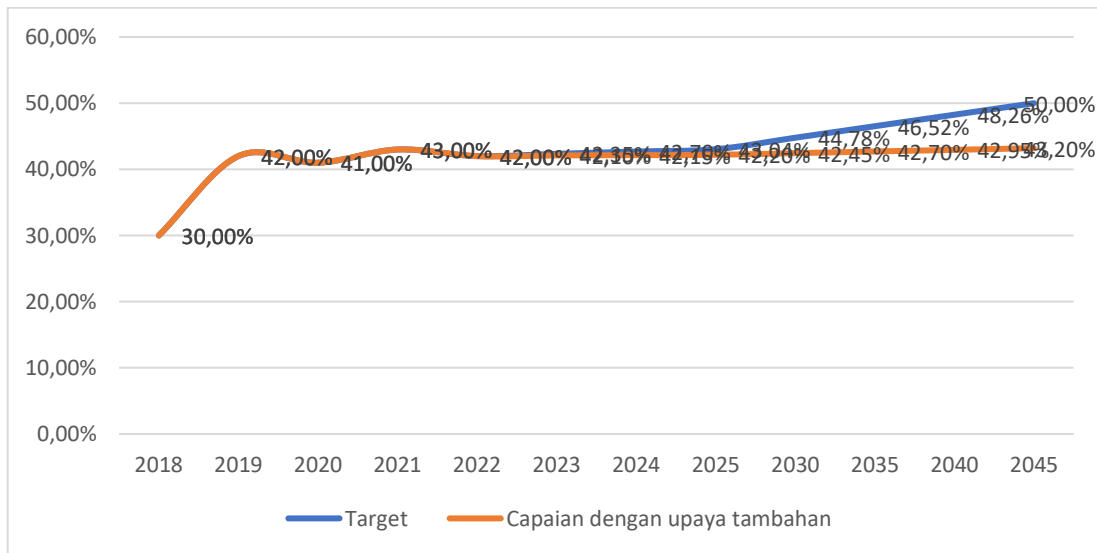
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup)		Menurunkan angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; Meningkatkan status gizi masyarakat; Meningkatkan kesehatan ibu, anak;

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.			
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air,		Mitigasi terhadap penyakit menular berbahaya	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan tentang penyakit berbahaya; Meningkatkan status keshatan masyarakat; Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	serta penyakit menular lainnya.			Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.		Menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan tentang penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan; Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah

Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah



2. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 5:

- 1,2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- 2,3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani,

penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

- 3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
- 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan

untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

- 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
- 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 4,5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
- 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,

memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

- 7,3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
- 8,10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
- 9,5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
- 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.
- 11,1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

- 17,6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- 17,8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- 17,17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- 17,19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

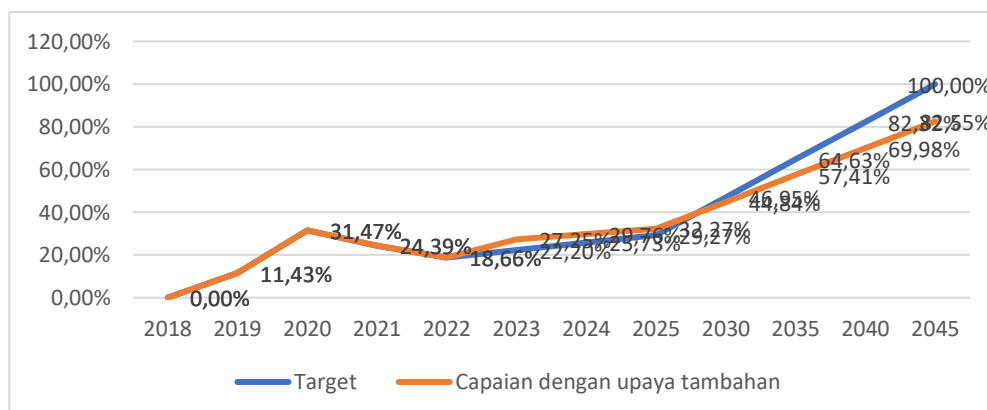
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Mengakhiri semua bentuk diskriminasi, kekerasan, terhadap perempuan dan anak Meningkatkan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh dalam semua aspek kehidupan	Mendorong perubahan sosial dan budaya yang menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk mengatasi norma sosial yang merugikan. Meningkatkan akses perempuan dan anak perempuan ke layanan pendidikan,	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan

			kesehatan, dan keuangan yang bermanfaat bagi mereka. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang teratur terhadap kemajuan dalam mencapai SDG 5 dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.	
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik	Mengakhiri semua bentuk diskriminasi, kekerasan, terhadap perempuan dan anak	Melaksanakan reformasi hukum yang mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan dan	Mendorong kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

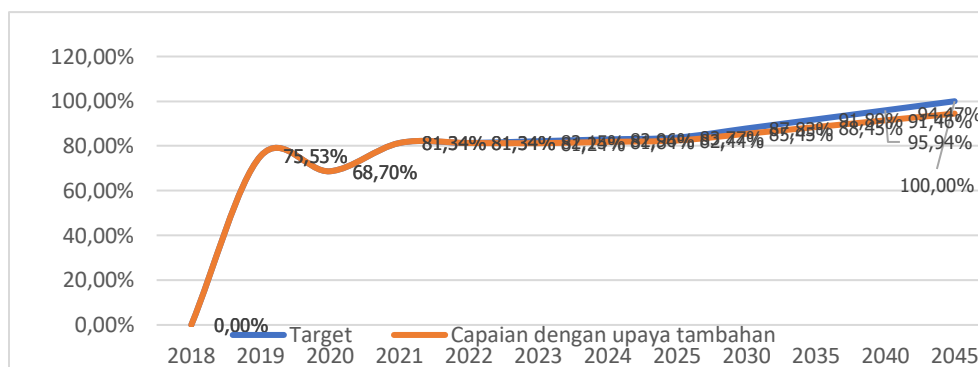
	dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		anak perempuan	
--	--	--	-------------------	--

Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

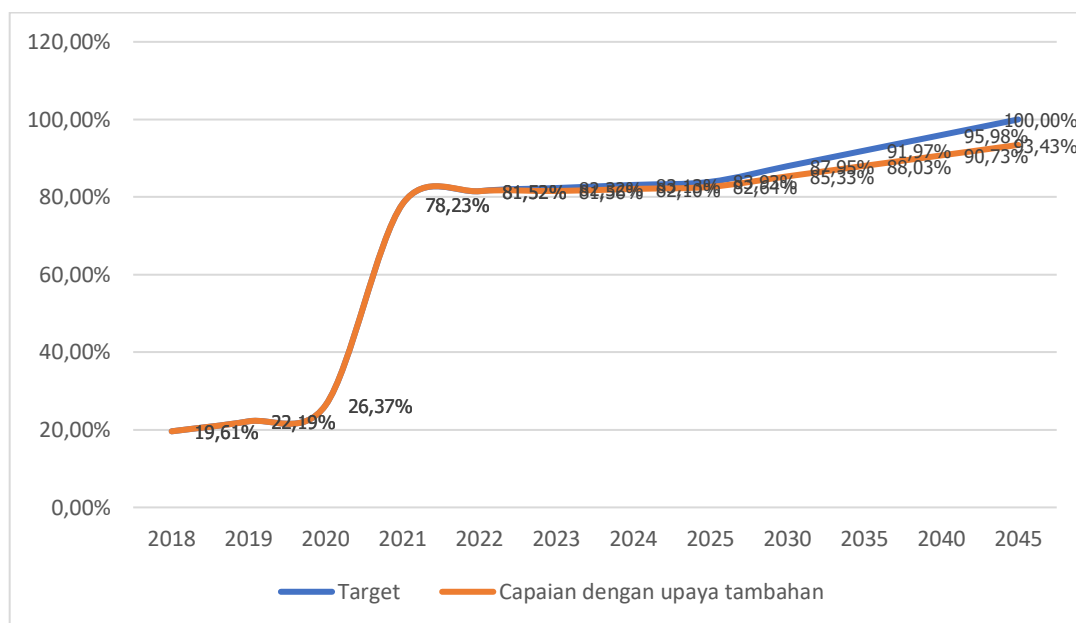
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan.



2. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan



Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 6 :

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak

Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.

10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

14.5 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

15.4 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

17.3 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.6 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan) Meningkatkan proporsi populasi yang memiliki akses layanan	Peningkatan pencapaian akses air minum layak 100% dan akses air minum aman yang terus meningkat; Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan; Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman; Tata kelola berkelanjutan sumber daya air terpadu;

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Tata kelola berkelanjutan untuk perlindungan dan restorasi sumber daya air;
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,		Meningkatkan proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Pelibatan para pihak termasuk masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.

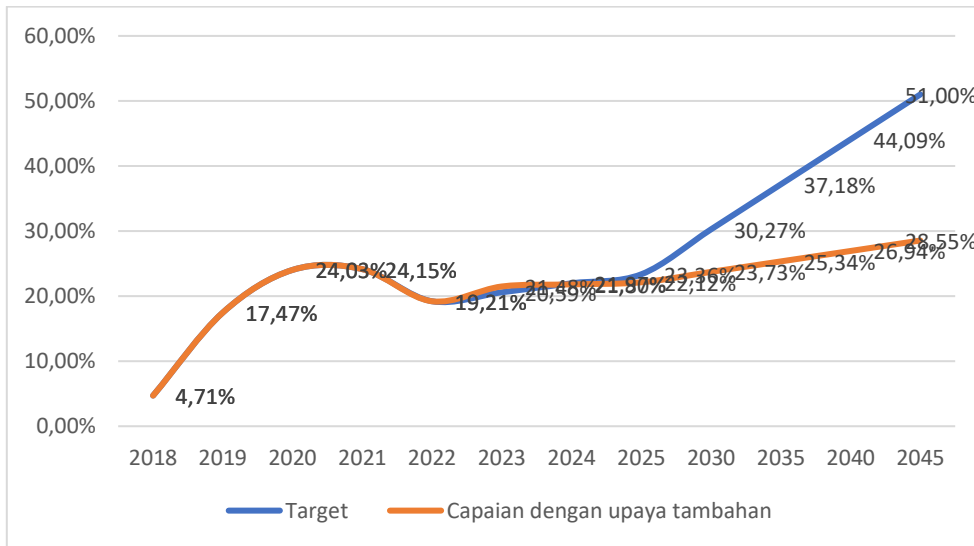
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan		Meningkatkan kualitas air danau. (Indeks Kualitas Air) Meningkatkan kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.			

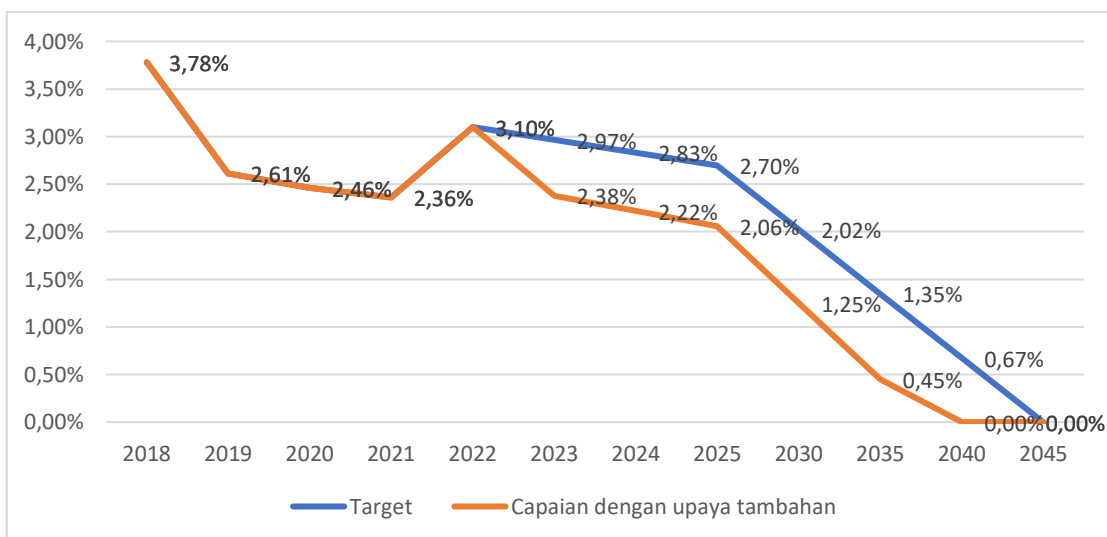
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas batas yang tepat.		Meningkatkan jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Meningkatkan Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	

Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

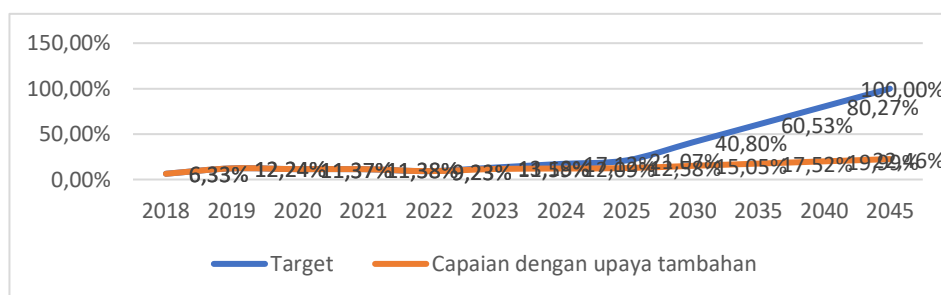
1. Persentase tenaga kerja formal



2. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

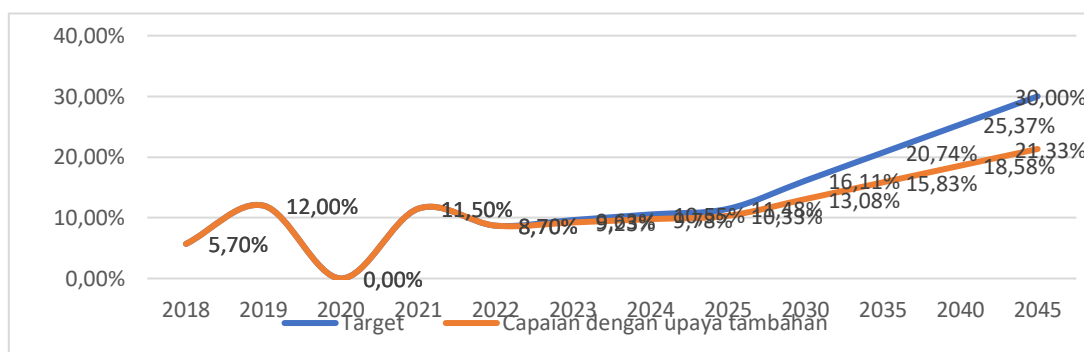


3. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)



4. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja

Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 8 :



1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk

menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air,

desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.

10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.

10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*.

10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional.

10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.

12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien

12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan

15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

17.11 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

17.13 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

17.19 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatkan Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; Peningkatan Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan; Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	tinggi dan padat karya.			Peningkatan Daya Saing pariwisata; Peningkatan Keragaman Wisata
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan		Meningkatkan Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	

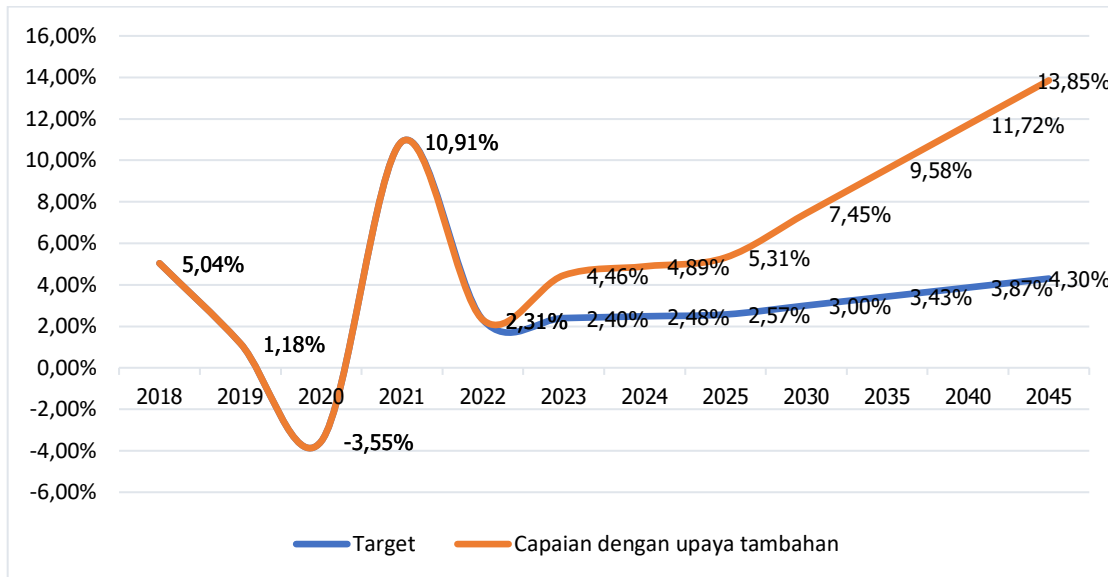
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.			
8.6	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi		Menurunkan Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.		bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan		Meningkatkan Jumlah wisatawan mancanegara. Meningkatkan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.(Kunjungan wisata)	

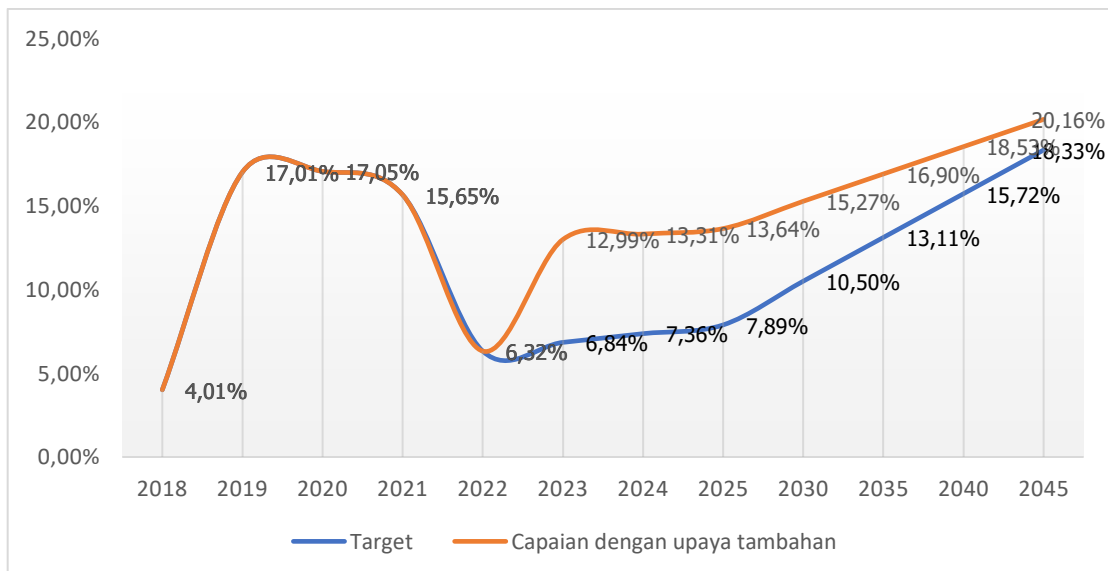
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		Meningkatkan Jumlah devisa sektor pariwisata. Meningkatkan Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Meningkatkan Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	

Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur



Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 9 :

- 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
- 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga

kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

- 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

- 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

- 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada,
- 17.19 untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

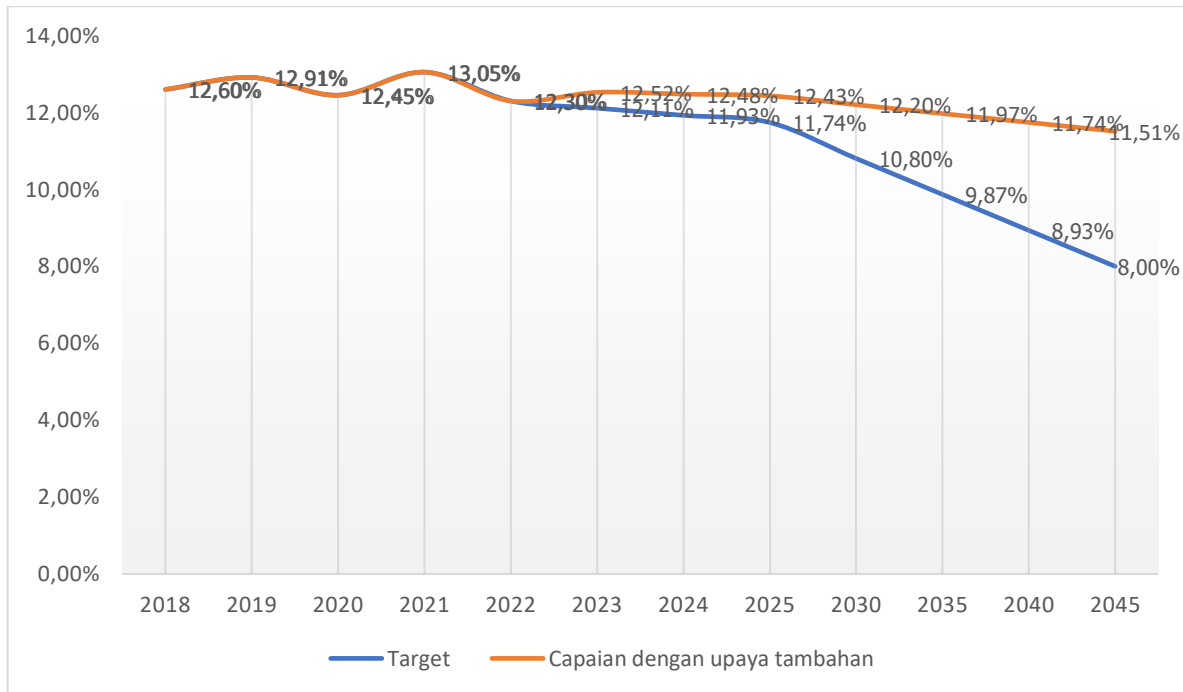
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja	Membangun infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan, dan tahan bencana untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat manusia	Mendorong investasi baik dari pemerintah maupun sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur yang mencakup transportasi, energi, dan jaringan komunikasi. Memfasilitasi pertumbuhan sektor industri, termasuk manufaktur, dengan menerapkan kebijakan yang mendukung investasi, akses ke pembiayaan, dan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM).	Peningkatan industri, inovasi, dan infrastruktur berkelanjutan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		Memperbarui dan meningkatkan industri dan infrastruktur untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta, serta Memperbarui dan meningkatkan industri dan	

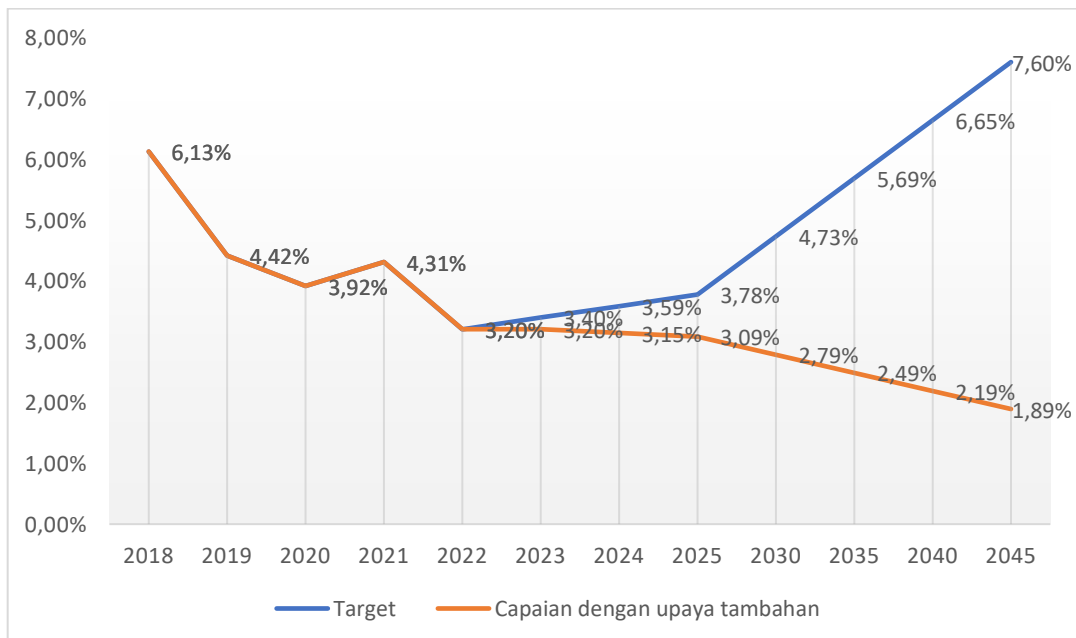
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			infrastruktur untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur dan industri yang berkelanjutan	

Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

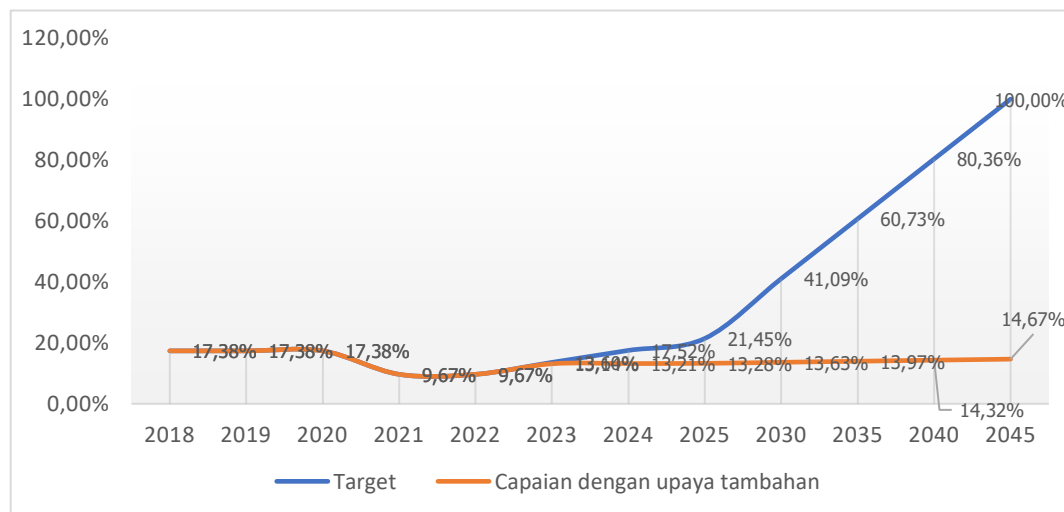
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur



Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal



Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 10 :

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi

rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk

meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance* bagi negara kurang berkembang.

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.

12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.

15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (*Official Development Assistance - ODA*), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/ GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang

17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.

17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.

17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan *World Trade Organization* termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (*rules of origin*) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.

17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

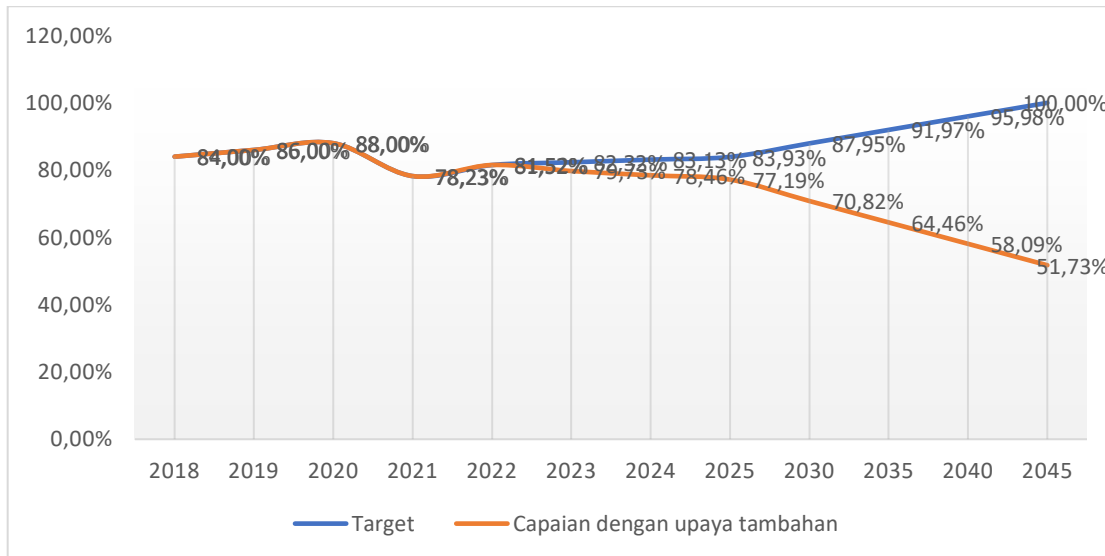
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
10. 1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari	Mengurangi Kesenjangan	Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan; Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan vokasi dan relevansi keahlian tenaga kerja; Menjaga Stabilitas Pertumbuhan yang Memihak Masyarakat Miskin dan Rentan serta	Meningkatkan pertumbuhan pendapatan penduduk

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	rata-rata nasional.		Menstimulasi Pertumbuhan Masyarakat Kelompok Menengah; Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi; Memperkuat perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi; Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak,	

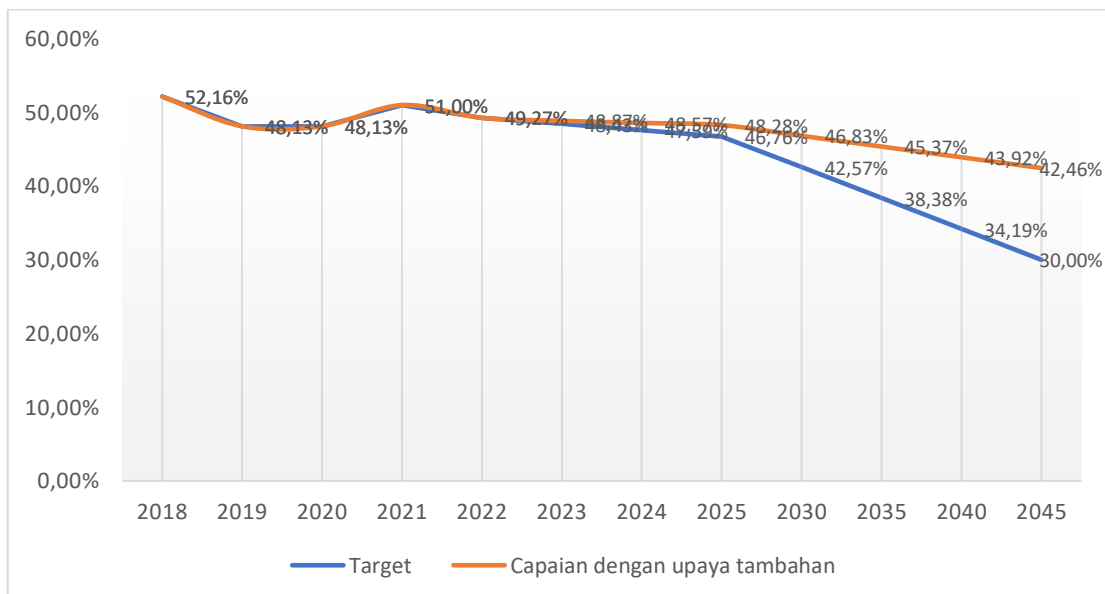
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			inklusif, dan bernilai tambah tinggi	

Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau



Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)



Persentase sampah perkotaan yang tertangani



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 11 :

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk

asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang

terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*

14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Menjadi kan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjuta n	Meningkatkan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta		Meningkatkan Rata-rata institusi yang berperan secara	

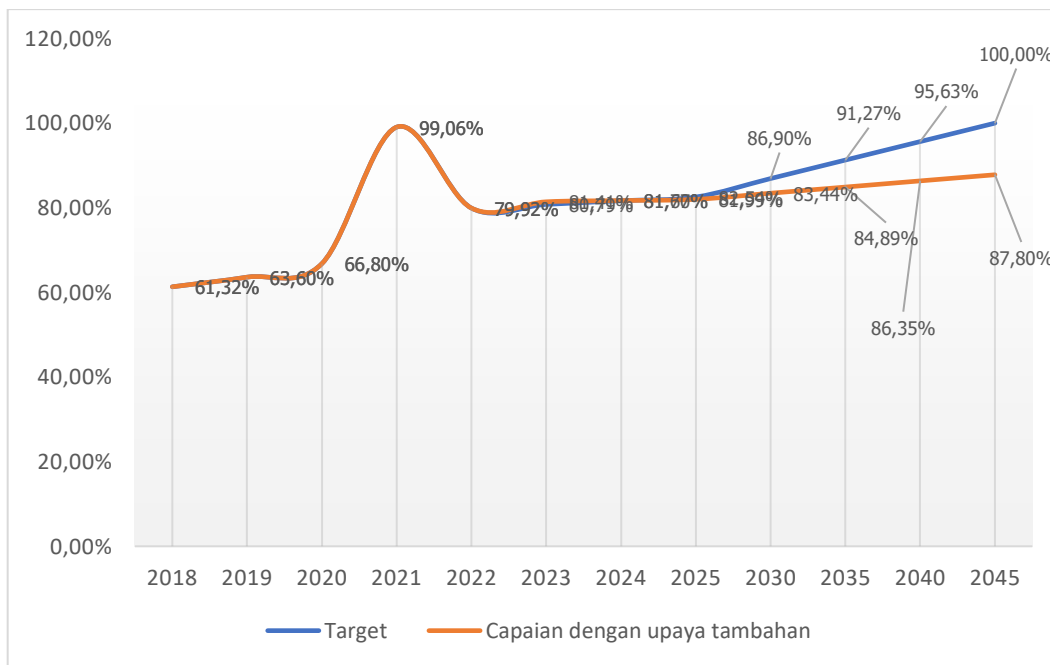
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.		aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah;
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		Menekan/Menurunkan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Menurunkan kelar risiko tinggi Indeks Risiko	Peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi bencana; Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar;

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Bencana Indonesia (IRBI). Mitigasi dan meningkatkan ketahanan terhadap Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan daya saing; pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan; supremasi hukum dan perlindungan masyarakat miskin dan rentan.
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada		Meningkatkan hingga 100% Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		Menurunkan Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	

Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 16:

- 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara

penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance* bagi negara kurang berkembang.

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.

9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara -negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*.

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.

10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.

12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.

14.4 Pada tahun 2030, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat

yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.

15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan

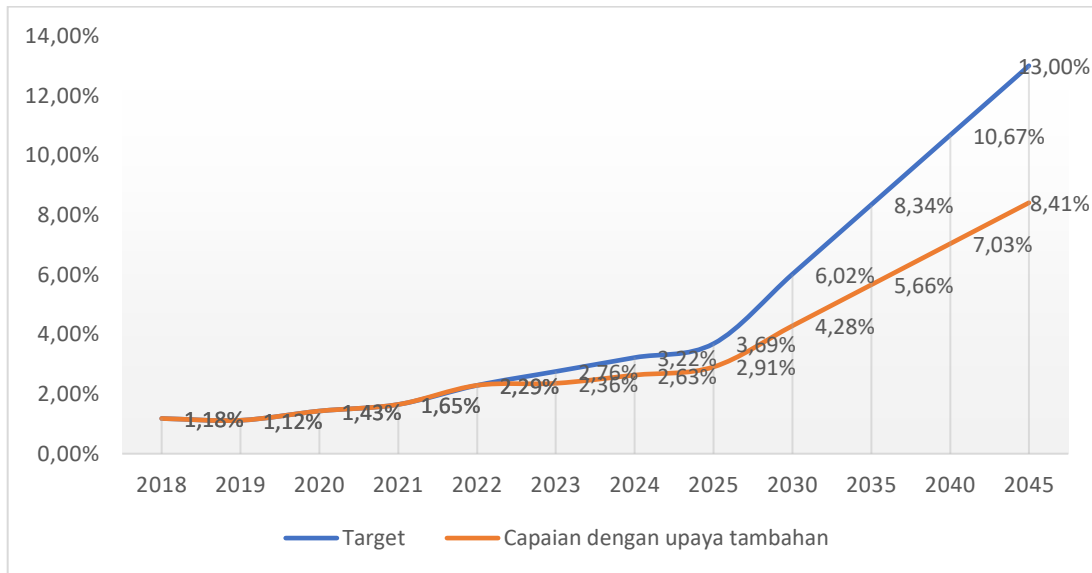
Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembanguna n Berkelanjuta n, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menekan / menurunkan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Perlindungan berkelanjutan terhadap perempuan dan anak; Penguatan Sistem Anti Korupsi; Mengoptimalkan Penguatan Integritas Masyarakat, dan Penegakan Hukum; Memperkuat kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan koordinasi dan kolaborasi pemangku

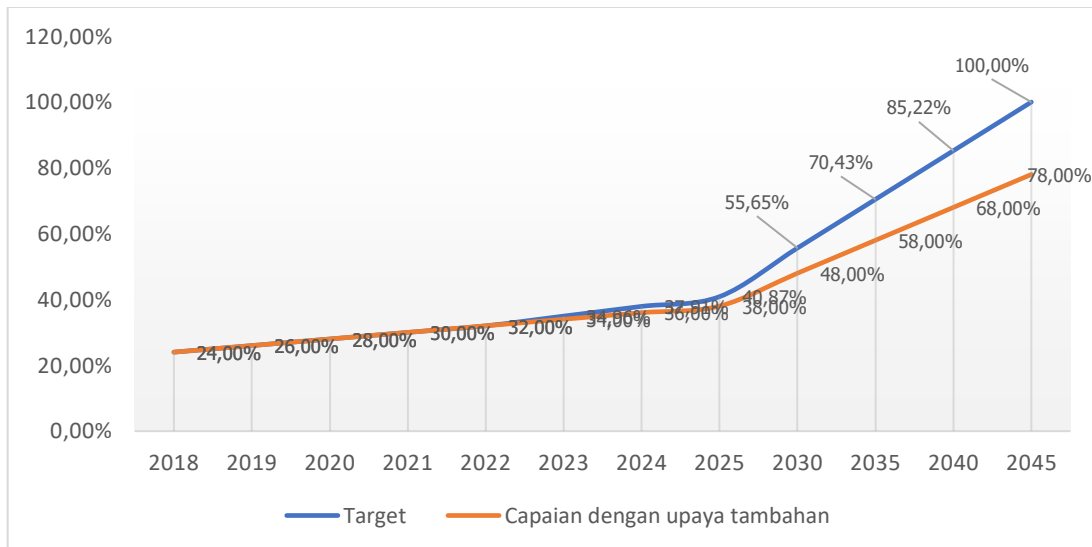
No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.		Menurunkan/menekan Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	kepentingan di daerah; Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah

Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

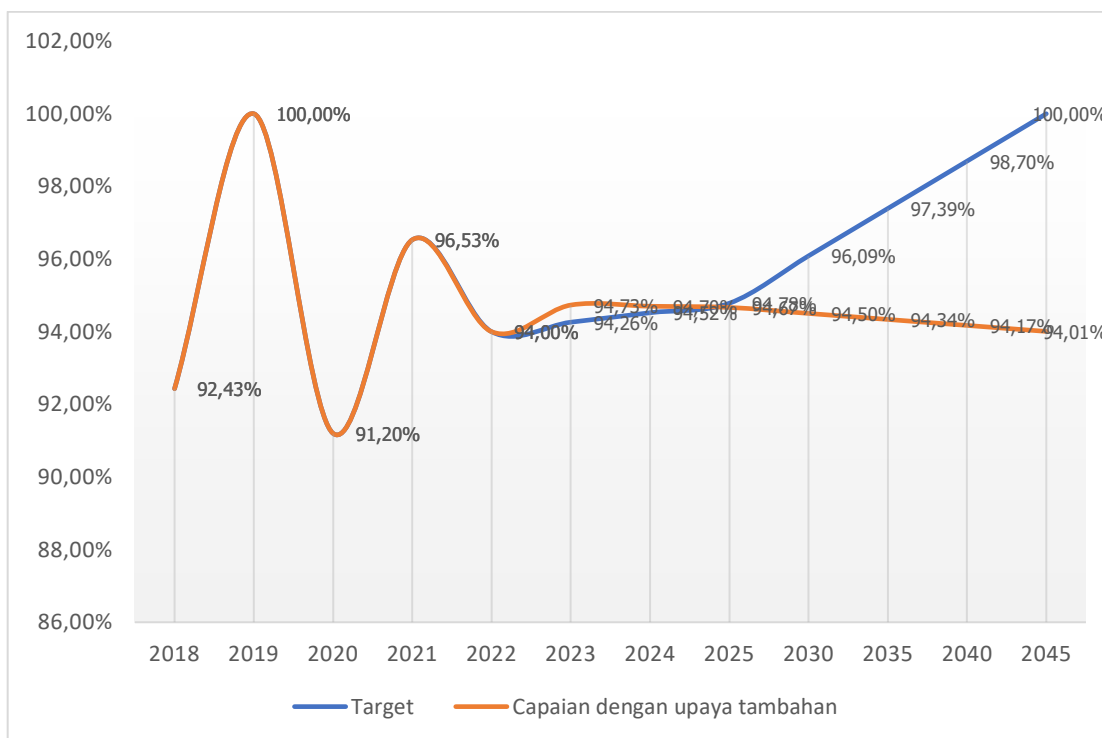
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB



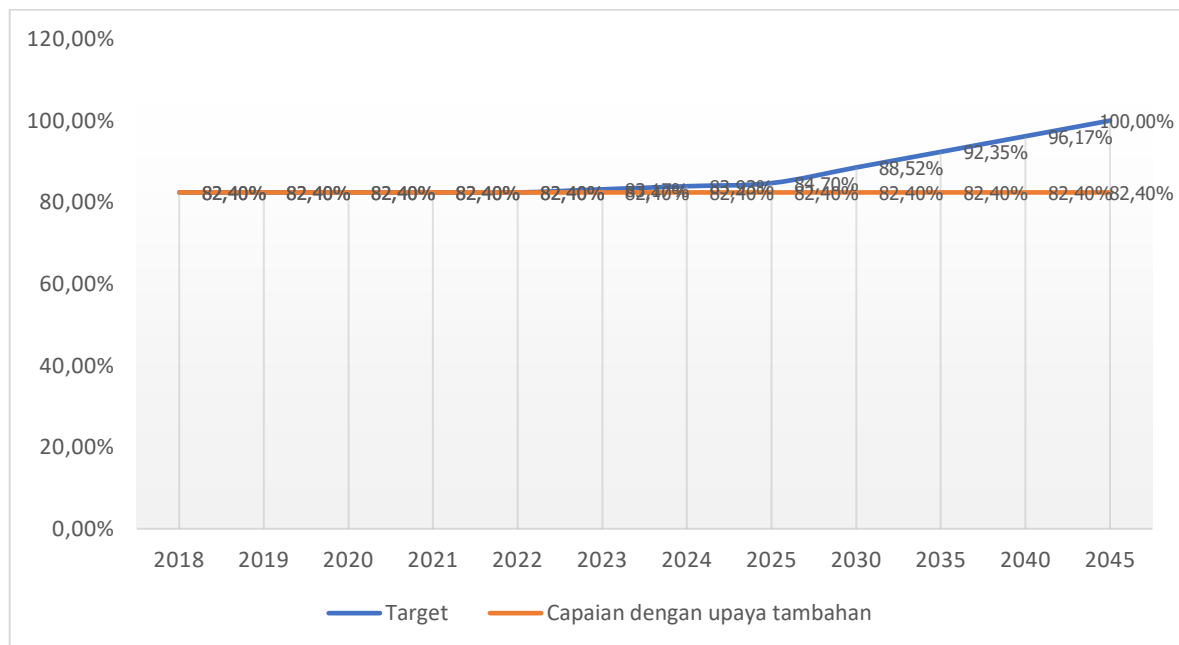
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband



Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik



Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target



Target TPB Lainnya yang Berkorelasi dengan TPB 17:

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan

pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di

tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

6.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the*

Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.

10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.

10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*

10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka

10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja

12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.

14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.

15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan

15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.

15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

Rekomendasi Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Meningkatkan Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Meningkatkan anggaran domestik yang didanai oleh pajak	Peningkatan PDB dari berbagai sektor, potensi pendapatan daerah, dan penerimaan pajak; Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan internet; Pengembangan Jangkauan mobile broadband;

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			domestik.(Pendapata n Asli Daerah)	Peningkatan Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); peningkatan kualitas data dan akses data BPS; peningkatan jumlah indikator SDGs terlaksana dan
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara- Selatan, Selatan- Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar		Meningkatkan jumlah cakupan Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Meningkatkan jumlah cakupan Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.			mencapai target nasional
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-		Meningkatkan Jumlah proyek yang ditawarkan untuk	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	
17.18	Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara		Meningkatkan jumlah konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya		Meningkatkan jumlah Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Meningkatkan Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	yang relevan dengan konteks nasional.			
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan		Meningkatkan Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	

No. TARGET	TARGET	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kapasitas statistik di negara berkembang.			

Alternatif Skenario dan Rekomendasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tanpa Upaya Tambahan.

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Alternatif skenario untuk TPB tersebut adalah dengan mempertahankan TPB yang telah menyamai atau melampaui target nasional. Target-target tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Target TPB yang telah mencapai target nasional di Kabupaten Sigi

No Indikator	Indikator
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan)
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (umur 0-18)
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Prevalensi Balita Gizi Kurang)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).

No Indikator	Indikator
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. (Angka rata-rata lama sekolah)
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. (persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki/menguasai handphone)
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
6.3.2.(a)	Kualitas air danau. (Indeks Kualitas Air)
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.(Kunjungan wisata)
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.

No Indikator	Indikator
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. (proporsi anggaran litbang terhadap APBD)
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet (penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet)
10.1.1*	Koefisien Gini. (Indeks Gini)
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.(Pendapatan Asli Daerah)
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

No Indikator	Indikator
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan

3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah ditemukan berdasarkan hasil evaluasi capaian atas kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Di sisi lain, mandatori pembangunan dari level nasional maupun global sebagai tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan baik. Dimana, kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di suatu daerah pada masa mendatang disebut sebagai isu strategis daerah. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis atas isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif terhadap berbagai kondisi yang tidak ideal, atau permasalahan yang akan dihadapi, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2045 merupakan keberlanjutan dari pembangunan dari tahun sebelumnya sehingga dari arah perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian perencanaan pembangunan RPJPD periode sebelumnya.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Sigi Tahun 2010-2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA PERIODE PERENCANAAN					PERTUMBUHAN/ PENURUNAN (%)	KETERANGAN
		2010	2015	2020	2021	2022		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,61	65,35	68,12	68,84	69,05	2,13%	
2	Gini Ratio	0,406	0,330	0,295	0,290	0,265	-34,73%	
3	Angka Kemiskinan	15,00	12,75	12,45	13,05	12,3	-18,00%	
4	Angka Pengangguran	4,59	5,74	2,46	2,36	3,01	-34,42%	
5	Pertumbuhan Ekonomi	7,22	6,27	-1,5	5,66	3,33	-53,88%	
6	PDRB Per Kapita (juta)	13.726	27.289	35.191	37.417	40.254	193,27%	
7	Pengeluaran Perkapita sebulan (Rupiah)	525,25	603,17	677,17	680,92	708,17	34,82%	

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi meliputi:

a. masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia terlihat dari perkembangan data indeks pembangunan manusia yang berkisar 68,49 point di tahun 2021, sudah berada pada kategori tinggi namun secara kualitatif kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih maju.

Empat masalah pokok yang dapat menentukan keuntungan atau kerugian bagi Kabupaten Sigi yaitu: kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, dan kebijakan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan pendidikan. Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2014 pekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar dan bahkan tidak lulus Sekolah Dasar mencapai 47,70%, sedangkan pendidikan Sarjana

sebesar 7,20%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sigi tergolong rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal baru terutama di bidang teknologi yang semakin lama semakin canggih.

Dalam masalah ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun harus segera direalisasikan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pun harus dilaksanakan. Pemerataan akses pendidikan terutama di pelosok negeri harus menjadi perhatian. Sebab, pendidikan dan kecerdasan masyarakat merupakan investasi jangka panjang suatu bangsa.

Masalah bonus demografis mencakup beberapa indikator yang berpengaruh terhadap bonus demografi seperti :

1. masalah kependudukan meliputi:

- a) masih tingginya angka pertumbuhan penduduk;
- b) ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah perkotaan;
- c) tingkat ketergantungan penduduk masih tinggi;
- d) belum optimalnya dukungan terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- e) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;

- f) masih rendahnya pengetahuan tentang keluarga berencana dan alat kontrasepsi; dan
- g) masih rendahnya pengetahuan tentang isu kependudukan dan pembangunan keluarga.

2. masalah pendidikan :

- a) masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi;
- b) masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
- c) belum optimalnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, sebagai tuntunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d) masih rendahnya rasio jenjang pendidikan terhadap peluang kerja;
- e) masih rendahnya angka harapan lama sekolah;
- f) masih kurangnya sarana pendidikan yang layak;
- g) belum meratanya sebaran tenaga pendidik;
- h) belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan;
- i) belum meratanya akses pendidikan meliputi angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka melanjutkan sekolah;
- j) masih rendahnya kualifikasi tenaga pendidik dilihat dari tingkat pendidikannya; berdasarkan data masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi Diploma IV/Strata1;
- k) belum meratanya distribusi tenaga pendidik, sekolah dengan jumlah peserta didik paling banyak Tingkat Sekolah Dasar,

menyebabkan guru honorer di Kabupaten Sigi yang tidak memiliki kualifikasi guru tetapi tetap diberdayakan terutama di desa pinggiran dan terpencil; dan

- l) belum terpenuhinya guru mata pelajaran dan guru kelas untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama baik secara kuantitas maupun kualitas.

3. masalah kesehatan :

- a) masih rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan;
- b) masih kurangnya infrastruktur layanan kesehatan di daerah terpencil;
- c) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan terutama kesehatan ibu, bayi dan anak;
- d) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah desa dan kecamatan;
- e) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;
- f) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
- g) angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan masih relatif tinggi;
- h) angka harapan hidup masih rendah di bawah rata-rata usia harapan hidup provinsi dan nasional;
- i) akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum terpenuhi;

- j) capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan rendah salah satu indikator pencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang masih rendah dan indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - k) kasus stunting dan balita gizi buruk masih tinggi rendahnya capaian standar pelayanan minimal dari indikator pelayanan kesehatan balita menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kasus balita gizi buruk;
 - l) kurang representatifnya keberadaan rumah sakit umum Daerah dalam memberikan layanan kesehatan penerapan pola hidup bersih dan sehat masyarakat masih rendah; dan
 - m) masih kurangnya kompetensi petugas kesehatan dan dokter ahli.
4. masalah perlindungan perempuan dan anak :
- a) pemberdayaan perempuan masih sangat terbatas terutama yang berkaitan dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan;
 - b) seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - c) belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - d) belum optimalnya penanganan berbagai penyakit sosial;
 - e) masih ditemukannya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak;
 - f) masih rendahnya pemenuhan indikator kabupaten layak anak; dan
 - g) masih ditemukannya kasus tindak pidana perdagangan orang pada perempuan dan anak.

b. masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi masih rendah terutama daerah pegunungan yang masyarakatnya masih berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila dalam keluarga tersebut telah terpenuhi segala kebutuhan hidupnya tidak mengalami kekurangan sandang, pangan dan papan serta memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi.

Kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

c. masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten yang sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian. Terbatasnya pengetahuan, akses perlengkapan dan peralatan pertanian membawa efek domino bagi petani. Hal tersebut mengakibatkan produktifitas yang rendah, bisa juga mengakibatkan rendahnya kualitas panen untuk komoditi yang dihasilkan yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani. Hal lain yang dihadapi petani adalah tingginya alih fungsi lahan menjadi perumahan dan aktifitas ekonomi lainnya yang lebih menguntungkan. Pengurangan lahan pertanian juga bisa berkurang karena lahan pertanian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya. Gangguan suplai air irigasi juga dapat berpengaruh pada peningkatan produktifitas pertanian akibat menurunnya debit air sehingga dapat berpengaruh pada rencana

Kabupaten Sigi sebagai salah satu kawasan penyangga pangan Ibu Kota Nusantara dan juga mewujudkan swasembada pangan.

Sektor pertanian dianggap kebanyakan masyarakat sebagai salah satu sektor yang tidak menjanjikan disebabkan kebanyakan ekonomi petani masih termasuk kelas menengah kebawah dibuktikan dengan nilai tukar petani masih rendah. Kabupaten Sigi tidak memiliki laut sehingga mengandalkan hasil perikanan air tawar yang kebanyakan dikembangkan di Danau Lindu.

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensinya disebabkan masih terbatasnya aksesibilitas dan kapasitas pengelolaan penerapan pariwisata keberlanjutan yang memanfaatkan potensi ekonomi kreatif.

d. belum optimalnya tata kelola pemerintahan/reformasi birokrasi

Tata kelola diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Kabupaten Sigi untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta mempertahankan ego sektoral.

e. pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah belum maksimal.

Kabupaten Sigi memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan guna membantu perekonomian. Pengembangan produk unggulan dapat dimaksimalkan dengan melakukan pembinaan dari hulu ke hilir.

3.1.2 Permasalahan Hasil KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Tujuan pembangunan berkelanjutan hasil dokumen KLHS RPJPD 2025-2045. Penilaian atas capaian TPB dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian TPB yang diintegrasikan dalam dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi tersebut merupakan komitmen pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Gambaran umum permasalahan pembangunan Kabupaten Sigi yang diperoleh melalui telaah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam RPJPD sebelumnya tahun 2005- 2025, yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, berkaitan dengan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta berkaitan tujuan pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, akan diuraikan pada bagian berikut :

a. perubahan iklim

Perubahan iklim menjadi agenda internasional saat ini dan dimasa mendatang, tidak terkecuali di Kabupaten Sigi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan iklim diantaranya : efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan *Cloro Flour Carbon* dan gas buangan industri.

Kabupaten Sigi sebagai satu satunya kabupaten daratan di Sulawesi Tengah, memiliki karakteristik wilayah yang spesifik, jika dikorelasikan dengan permasalahan perubahan iklim. Sebagian wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan data dari Balai Besar Taman

Nasional Lore Lindu, merupakan area Cagar Biosfer (54,8%) dari total luas Taman Nasional Lore Lindu. Sisa luasannya berada di wilayah Kabupaten Poso. Persentase luas Taman Nasional Lore Lindu terhadap luas total wilayah Kabupaten Sigi sebesar 21,7 persen. Potensi cagar biosfer yang ada di Kabupaten Sigi ini disamping sebagai potensi untuk menjaga kestabilan iklim dan siklus hidrologi, juga menjadi ancaman penyebab perubahan iklim jika tidak dijaga kelestariannya. Laju kerusakan hutan primer di kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang masuk ke wilayah Kabupaten Sigi sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022 sebesar 0,07 persen. Terjadi penambahan kerusakan areal hutan sebesar 171,5 hektar selama 3 tahun.

Potensi permasalahan lainnya yang berpengaruh pada perubahan iklim di Kabupaten Sigi disamping kerusakan hutan adalah efek gas rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena alami yang disebabkan oleh gas tertentu yang berada di atmosfer, seperti CO_2 , CH_4 dan H_2O . Gas ini dapat meneruskan cahaya matahari ke bumi melalui atmosfer, tetapi dapat menghalangi atau membatasi jumlah panas yang keluar dari atmosfer. Peristiwa ini menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi dan terjadi pemanasan global. Kabupaten Sigi berpotensi menyumbang pemanasan global dan perubahan iklim jika beberapa hal berikut tidak ditangani secara berkelanjutan untuk 20 tahun yang akan datang, meliputi : Penanganan sampah, pembakaran di areal kebun kebun, penggundulan hutan, dan konversi sistem pertanian dari sistem konvensional ke sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan, untuk mengurangi emisi CO_2 , CH_4 dan N_2O . Berdasarkan

Standar Nasional Indonesia Nomor 6729 Tahun 2016 tentang Sistem Pertanian Organik, dilarang melakukan pembakaran langsung sisa biomassa di lahan, kecuali dalam keadaan tertutup untuk keperluan khusus. Disebutkan pula pelarangan penggunaan bahan kimia anorganik dan beracun untuk mengurangi emisi gas ke atmosfer dan menjaga keamanan pangan.

Kabupaten Sigi untuk 20 tahun yang akan datang juga berpotensi hadirnya industri khususnya Agroindustri. Antisipasi untuk hal ini juga sangat penting, jika proses industri menghasilkan emisi gas CO² ke udara. Industri pengolahan *cocopeat*, arang briket atau arang batok kelapa dan pengolahan kopra juga berpotensi menyumbang emisi karbondioksida ke udara.

b. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau atau pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tangguh yang mempertimbangkan permasalahan lingkungan hidup, mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Penerapan praktek ekonomi hijau tidak terbatas pada penanganan limbah dan industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, tetapi lebih kepada filosofi hijau yang berasal dari dunia pertanian, perkebunan dan kehutanan. Ketiga sektor ini menghasilkan hamparan bumi berwarna hijau dan manfaatnya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan generasi di masa depan.

Kabupaten Sigi adalah satu satunya kabupaten daratan di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki wilayah laut. Aktivitas di daerah ini didominasi oleh pertanian, perkebunan dan kehutanan dan tercatat sebanyak 36.543 orang bekerja pada tiga bidang tersebut. Ada 48 desa dari delapan kecamatan di daerah ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu, dan sebagian besar di samping sebagai petani, mereka bekerja memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber aktivitas ekonomi. Potensi tenaga kerja dan populasi tanaman di sektor ini merupakan modal dasar pembangunan ekonomi yang berbasis pada konsep ekonomi hijau, dan menjadi penyumbang serapan jejak karbon di udara.

Kabupaten Sigi memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep ekonomi hijau 20 tahun yang akan datang, meskipun beberapa ancaman juga perlu dilakukan penanganan serius melalui kebijakan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam penerapan konsep ekonomi hijau di Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. ancaman deforestasi dan degradasi hutan primer pada Taman Nasional Lore Lindu, dan hutan sekunder;
2. penurunan aktivitas pertanian dan perkebunan pada lahan kering dan kritis akibat kekurangan pasokan air irigasi dan ancaman perubahan iklim;
3. praktek sistem pertanian konvensional yang banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca;
4. pengetahuan dan praktek pertanian alami yang ramah lingkungan di komunitas petani tertentu belum terpublikasi dengan baik;

5. sosialisasi dan praktek penguasaan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan belum dilakukan secara masif;
 6. sosialisasi konsep dan penerapan ekonomi hijau di masyarakat masih kurang; dan
 7. konversi dari sistem pertanian menggunakan input tinggi ke sistem pertanian input rendah masih menjadi tantangan tersendiri ke depan setelah 40 tahun lebih petani terbiasa dengan pertanian input tinggi.
- c. sektor pertanian terbarukan

Sektor pertanian menjadi sektor pembangunan yang sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi dan menjadi salah satu penentu baik buruknya kualitas lingkungan hidup untuk menjaga bumi tetap lestari. Periode pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan, peranan sektor pertanian memiliki tantangan baru di samping sebagai penyedia pangan. Peranan baru sektor pertanian masa depan di samping sebagai penyedia pangan (*food*), juga sebagai penyedia pakan ternak (*feed*) dan bahan bakar berbahan baku biomassa tanaman (*fuel*). Konsep 3F ini adalah tantangan sektor pertanian dimasa depan untuk mendukung ketahanan pangan, mengatasi perubahan iklim dan penerapan konsep ekonomi hijau. Meninggalkan sumber bahan bakar yang bergantung pada bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca yang sangat tinggi adalah solusi dimasa depan.

Kabupaten Sigi memiliki potensi pembangunan sektor pertanian yang besar dari aspek luas lahan, jumlah tenaga kerja, dukungan zona

penyangga, dukungan infrastruktur dan kapasitas produksi tanaman, ternak dan ikan air tawar. jumlah petani, peternak, pembudidaya ikan serta potensi luas lahan usaha cukup besar. Potensi yang mendukung ini dapat dijadikan modal dasar untuk menyusun rencana strategis pembangunan Kabupaten Sigi dimasa depan. Meskipun dari aspek potensi cukup besar, Kabupaten Sigi juga memiliki tantangan permasalahan di sektor pertanian yang memerlukan kebijakan strategis pembangunan daerah. Beberapa permasalahan penting sektor pertanian di Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. berdasarkan data curah hujan bulanan selama lima tahun terakhir (2018-2023) yang terpantau melalui 13 stasiun penakar curah hujan se-Kabupaten Sigi milik BMKG, ditemukan variasi besaran curah hujan yang berbeda pada setiap wilayah. Curah hujan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu dan Kecamatan Kulawi, sedangkan curah hujan terendah berada di wilayah Desa Sidondo Kecamatan Sigi Biromaru, dan Kecamatan Marawola. Wilayah lainnya tergolong berada pada kisaran curah hujan sedang. Jumlah curah hujan berpengaruh pada suhu udara, suhu tanah dan kelembapan udara. Penyebaran curah hujan yang tidak merata ini dengan jumlah terendah mencapai rata rata 93 mm/bulan (Marawola), menyebabkan perbedaan jenis komoditi dan jadwal tanam masing masing wilayah. Data curah hujan ini juga menunjukkan pengaruh yang sangat nyata dari Taman Nasional Lore Lindu sebagai kawasan konservasi yang mengatur siklus hidrologi atau siklus tata air. Permasalahan yang ditimbulkan dari

- minimnya curah hujan di wilayah tertentu yakni peningkatan luas lahan kritis dan mengurangi luas lahan produksi yang memerlukan penanganan khusus;
2. kerusakan ekosistem pertanian sebagai dampak dari kerusakan hutan dan praktek pertanian input tinggi menyebabkan penurunan kualitas tanah pertanian akibat kekeringan dan residu bahan bahan anorganik yang menyebabkan ketidakstabilan pH tanah dan pelepasan emisi gas rumah kaca khususnya N_2O ke udara. Di samping itu ketidakstabilan ekosistem juga menyebabkan ledakan hama dan penyakit tanaman. Pada jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan produksi tanaman jika tidak dilakukan penanganan yang serius;
 3. kapasitas sumberdaya tenaga kerja di sektor pertanian beserta kelembagaannya (petani, peternak, pembudidaya ikan dan kelompok tani) menjadi permasalahan tersendiri untuk menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa depan. Modernisasi pertanian yang mengarah pada konversi pertanian melalui skema 3F dan mengacu pada sistem pertanian ramah lingkungan, memerlukan penguasaan teknologi yang lebih tinggi dalam menggunakan peralatan dan perangkat lunak untuk mengembangkan komoditas; dan
 4. hilirisasi produk pertanian yang memanfaatkan teknologi pengolahan yang berbasis pada industri rumah tangga rendah emisi karbon juga menjadi permasalahan tersendiri. Pengolahan tanaman menjadi produk pangan, pakan dan bahan bakar biogas memerlukan penguasaan dan fasilitas teknologi dan peralatan yang

spesifik. Jika konsep 3F tidak didukung oleh sarana dan prasarana produksi yang memadai, maka akan sulit tercapai target yang telah ditentukan.

Disamping kegiatan *on farm* dan *off farm* (khusus proses pengolahan), aspek pemasaran juga masih menjadi kendala di kalangan petani, khususnya kepastian harga dan jaringan pemasaran yang menguntungkan produsen. Pengaturan tata niaga hasil hasil yang diintervensi oleh pemerintah daerah masih menjadi permasalahan khusus.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

3.2.1 Isu Strategis Global Terkait Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015-2030 secara resmi merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millenium Development Goals*. tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program *Millenium Development Goals*. Berbeda dengan *Millenium Development Goals* yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169

target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu: manusia, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di Tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :

- a. tanpa kemiskinan;
- b. tanpa kelaparan;
- c. kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
- d. pendidikan berkualitas;
- e. kesetaraan gender;
- f. air bersih dan sanitasi layak;
- g. energi bersih dan terjangkau;
- h. pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi;
- i. industri, inovasi dan infrastruktur;
- j. kesenjangan;
- k. kota dan pemukiman;
- l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- m. penanganan perubahan iklim;
- n. ekosistem bawah lautan;
- o. ekosistem daratan;

- p. perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Sigi memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bupati memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah dan bagaimana SDGs diarus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Sigi.

3.2.2 Isu Strategis Perubahan Iklim

Berdasarkan data Iklim dari BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, data kondisi terkini area Taman Nasional Lore Lindu dan data prediksi perubahan iklim di Kabupaten Sigi dari Badan Kerja Sama Internasional Jerman untuk program *Forclime*,

beberapa isu strategis yang perlu ditangani di Kabupaten Sigi selama 20 tahun yang akan datang sebagai berikut

1. Kesimpulan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika berdasarkan data iklim di sejumlah stasiun pemantau cuaca (curah hujan, suhu dan kelembaban) di Kabupaten Sigi :
 - a) memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumberdaya air yang siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan maupun sebaliknya
 - b) melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol serta melakukan program penghijauan secara lebih masif;
 - c) mengencarkan sosialisasi, edukasi dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait mengenai perubahan iklim sebagai bentuk pengurangan resiko bencana yang terjadi akibat adanya perubahan iklim; dan
 - d) penggunaan energi terbarukan sebagai supply listrik serta penerapan teknologi bersih, *fuel switching*.
2. Rekomendasi Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu berdasarkan data kerusakan hutan primer selama 3 tahun terakhir dan perkembangan program pembinaan masyarakat di zona tradisional:
 - a) pembinaan dan pendampingan aktivitas masyarakat dalam zona tradisional melalui kerjasama kemitraan konservasi, berupa pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Kegiatan ini

diprioritaskan di 40 desa yang berbatasan langsung dengan areal Taman Nasional Lore Lindu seluas 1.450 hektar.

- b) sosialisasi ke Sekolah sekolah di zona tradisional untuk pendidikan konservasi dan pentingnya hutan sebagai penyangga kehidupan.

3. Rekomendasi GIZ terkait prediksi perubahan iklim 2020-2041:

- a) periode 2020-2041 pada Cagar Biosfer Lore Lindu terjadi peningkatan luas tutupan pada pertanian lahan kering, agroforestri/kebun campuran, lahan terbangun, dan pertambangan. sementara itu yang mengalami penurunan adalah hutan primer, hutan sekunder, tanah terbuka.
- b) prediksi deforestasi/degradasi pada Cagar Biosfer Lore Lindu berdasarkan skenario RTRW tahun 2041 adalah 229,909.7 ha deforestasi dan 56,611.07 ha degradasi. hal ini berimbas pada perubahan iklim Kabupaten Sigi.
- c) strategi manajemen dan monitoring Nilai Konsevasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi dilakukan dalam bentuk konservasi, restorasi dan produksi berkelanjutan yang fokus pada zona penyangga dan transisi dari Cagar Biosfer Lore Lindu. kajian Nilai Konsevasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi ini merekomendasikan strategi pengelolaan dan monitoring melalui rekomendasi manajemen tindakan/aksi, manajemen adaptif Nilai Konsevasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi, dan rekomendasi monitoring.

4. Rekomendasi berdasarkan SNI 6729:2016 yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional tahun 2016, tentang Sistem Pertanian Organik terkait perubahan iklim :

- a) keseluruhan tahapan pada manajemen produksi tanaman tidak diperbolehkan menggunakan bahan kimia anorganik dan beracun. dianjurkan menggunakan bahan organik seperti benih bersertifikat organik, pupuk dan obat-obatan bersertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik.
- b) dianjurkan menggunakan limbah hasil pertanian yang segar maupun yang sudah terfermentasi berbentuk kompos, pestisida nabati dan sistem rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan kontaminasi bahan berbahaya.
- c) dilarang melakukan pembakaran di area terbuka di lahan untuk menjaga kesegaran bahan organik dan mencegah emisi CO² ke udara.

3.2.3 Isu Strategis Ekonomi Hijau

Implementasi konsep ekonomi hijau memerlukan kebijakan pembangunan daerah yang tepat berdasarkan data potensi yang tersedia untuk dikembangkan ke depan. Kabupaten Sigi berdasarkan data yang tersedia, memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan konsep ekonomi hijau dalam setiap kebijakan pembangunan. Semua sektor pembangunan ekonomi diharapkan mengacu pada implementasi ekonomi hijau yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup tetap lestari 20 tahun ke depan. Beberapa isu strategis yang bisa diajukan Kabupaten Sigi sebagai berikut :

1. perlindungan kawasan konservasi yang meliputi hutan primer, hutan sekunder dan hutan produksi berkelanjutan menjadi

prioritas yang sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah yang berbasis pada konsep ekonomi hijau. Mempertahankan bahkan meningkatkan Nilai Konsevasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi pada kawasan penyangga menjadi prioritas pada program pembangunan daerah 20 tahun yang akan datang. Keberhasilan dalam penanganan kawasan penyangga ini akan berpengaruh pada peningkatan luas tutupan lahan lahan pertanian dan perkebunan di wilayah produksi usaha tani, yang disebabkan oleh kestabilan iklim dan keberlanjutan pasokan air irigasi untuk mendukung produksi;

2. konversi Sistem Pertanian Konvensional ke Sistem Pertanian Organik yang lebih ramah lingkungan sesuai SNI 6729:2016, menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Isu strategis ini sangat penting untuk mengurangi efek gas rumah kaca, meningkatkan kesehatan masyarakat/petani, peternak dan petambak serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi menjadi lebih ekonomis. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai melalui penerapan sistem ini; dan
3. sosialisasi konsep ekonomi hijau melalui kurikulum pendidikan formal dan pendidikan non formal sangat mendukung proses peningkatan pengetahuan masyarakat tentang konsep ekonomi hijau. Intervensi pada kurikulum sekolah sekolah dasar dan menengah bahkan sampai perguruan tinggi, secara nyata dapat mengubah persepsi pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan hidup.

3.2.4 Isu Strategis Peranan Baru Sektor Pertanian

Beberapa permasalahan penting di atas memerlukan kebijakan pembangunan daerah yang tepat untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan, khususnya pembangunan sektor pertanian. Dalam pencapaian sasaran pembangunan melalui implementasi kebijakan pemerintah daerah, maka isu strategis dari sektor pertanian melalui peranan baru sektor pertanian di masa depan adalah sebagai berikut :

1. peningkatan luas tutupan lahan di areal pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. penerapan model sistem pertanian terpadu untuk mengintegrasikan antara usaha tani, ternak dan perikanan darat agar terjaga siklus energi dalam ekosistem dan praktek pertanian rendah karbon;
3. konversi sistem pertanian konvensional ke sistem pertanian modern yang lebih ramah lingkungan (rendah emisi gas rumah kaca) melalui gerakan pertanian organik yang didukung oleh peraturan daerah tentang sistem pertanian organik;
4. pengembangan jenis komoditas tertentu yang dapat dijadikan bahan baku energi terbarukan berbahan baku biomassa tanaman dan limbah pertanian, peternakan dan perikanan (*biofuel*);
5. penataan kembali tata ruang pertanian untuk menata areal lahan berdasar pada skema 3F;

6. mengeksplorasi sumber daya genetik jenis jenis tanaman spesifik lokal dari beberapa jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan peningkatan nilai tambah ekonomi bahan pangan dan perkebunan;
7. peningkatan sumberdaya manusia pelaku ekonomi di sektor pertanian; dan
8. penataan sistem tata niaga hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang melibatkan pemerintah daerah.

3.2.5 Isu Strategis Kemitraan Multipihak

Kemitraan multipihak merupakan isu penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat global, nasional dan lokal. Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 17 dikhususkan tentang pentingnya kemitraan dan tata kelola kolaboratif. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang sukses membutuhkan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan yang bersifat inklusif harus dibangun di atas prinsip, nilai, visi, dan tujuan bersama yang menempatkan manusia dan planet sebagai fokus utama yang sangat dibutuhkan di tingkat global, regional, nasional, dan lokal.

Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom yang relatif masih muda, memiliki kewenangan serta penting menggalang kerjasama dengan pihak lain, baik sesama Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara/pihak swasta, baik Penanaman Modal

Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, lembaga pendidikan dan profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dunia internasional. Kerja sama dengan ragam pihak sangat penting dilakukan karena merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, kapasitas fiskal, teknologi, masuknya aliran modal/investasi, tersedianya informasi pembangunan/pengetahuan dan informasi pasar yang dilakukan secara terbuka, egaliter, synergis, konstruktif dan saling menguntungkan serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Melalui kerja sama, daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, penanaman modal, termasuk yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan filantropi wajib berbagi peran agar seluruh target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. Salah satu prasyarat kolaborasi adalah koordinasi internal. Kemitraan multi pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, pembentukan kemitraan multi pihak membutuhkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Namun, hal ini bergantung pada masalah dan konteks yang dihadapi dan hubungan antar pemangku kepentingan.

Oleh karena itu berikut ini beberapa peluang isu strategis penting yang perlu didorong menjadikan solusi permasalahan di Kabupaten Sigi sebagai berikut:

1. pemecahan masalah bersama dan masalah kesetaraan gender

Kemitraan multipihak dapat membantu mewujudkan pemecahan masalah bersama meliputi kemiskinan, ketahanan pangan, pendapatan, bencana, perubahan iklim dan masalah kesetaraan gender. Salah satu peluang besar pelaksanaan kemitraan multi pihak di Kabupaten Sigi adalah keikutsertaannya dalam mengatasi ketimpangan gender. Tanpa tindakan nyata yang melibatkan seluruh pihak, kesetaraan gender di Kabupaten Sigi akan sulit diwujudkan. Jika kaum perempuan memiliki kesempatan bekerja, maka ekonomi akan tumbuh pesat antara lain melalui peningkatan produktifitas, diversifikasi ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Selain masalah kesetaraan akses bagi kelompok perempuan, perlu dilihat juga kelompok rentan lainnya, misalnya disabilitas, miskin, komunitas adat terpencil, anak terlantar, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Dengan pola kemitraan multi pihak di Kabupaten Sigi dapat menjawab permasalahan minimnya akses bagi penyandang kesejahteraan sosial pada sektor publik di Kabupaten Sigi;

2. modal sosial para pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan memiliki dan membawa aset, pengalaman, serta metode kerja yang dapat disumbangkan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Keunggulan

komparatif menjadi ciri khas masing-masing pemangku kepentingan. Misalnya, ada pihak yang memiliki kapasitas dalam hal penyediaan barang publik, dalam hal produksi dan diseminasi pengetahuan serta dalam hal advokasi/perubahan kebijakan. Seluruh pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam kemitraan multi pihak. Masing-masing memiliki ide dan gagasan, cara dan metode, pengalaman, jaringan kerja, aset sosial, modal sosial, dan keahlian. Melihat kenyataan tersebut, Kemitraan Multipihak berupaya merangkum dan menghimpun para pemangku kepentingan ini sebagai sebuah modal sosial dalam satu tujuan dan satu komitmen untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

3. pendanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan membuka peluang insentif

Kebijakan Kabupaten Sigi sebagai kabupaten dengan kapasitas fiskal kecil namun memiliki komitmen besar akan pembangunan daerah melalui penguatan reforma agraria, Sigi Hijau, Sigi Masagena dan Sigi Religi dituntut untuk menguatkan kolaborasi kemitraan multipihak. Salah satu upaya untuk membentuk kemitraan multipihak ke depan adalah dengan berperan serta dalam hal pendanaan atau seluruh pemangku kepentingan dimungkinkan untuk turut ambil bagian dalam upaya memperkuat tambahan investasi di bidang tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan berbagai terobosan pendanaan. Sumber dana dapat berasal dari dana swasta dan filantropi yang jumlahnya masih sangat besar. Sumber dana

lainnya antara lain dana pensiun, perbankan, dana asuransi, perusahaan multinasional, dan juga dana kekayaan negara. Salah satu mekanisme atau instrumen keuangan yang banyak direkomendasikan adalah pembiayaan campuran. Dengan pembiayaan campuran diharapkan dana swasta akan dapat dikerahkan untuk investasi jangka menengah (5–15 tahun) dan jangka panjang (15–30). Pembiayaan campuran telah dimanfaatkan oleh banyak negara berkembang. Dana tersebut telah ditanamkan terutama di empat bidang, yaitu:

- a) budi daya pangan yang berkelanjutan;
- b) pembangunan perumahan di perkotaan untuk warga kurang mampu;
- c) sumber energi listrik terbarukan; dan,
- d) pencegahan wabah penyakit yang mudah diobati dan perbaikan fasilitas Kesehatan.

Pembiayaan campuran dipercaya akan membawa dampak langsung kepada tiga bidang, yaitu:

- a) ekonomi riil–imbangan kepada kinerja konstruksi;
- b) sektor keuangan–akses pendanaan; dan
- c) realisasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. peningkatan kapasitas

Kelembagaan multipihak dapat mendorong tujuan bersama mendukung pencapaian tujuan pembangunan Sigi Hijau yang berkelanjutan dan inklusif, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemitraan multipihak

dapat merumuskan rencana kerja antara lain : menyusun perencanaan, meningkatkan investasi lestari, melakukan advokasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyediakan bank data kemitraan multipihak.

Secara kelembagaan kemitraan multipihak dapat mendukung peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menindak pelanggaran/polisi hutan, penguatan kapasitas masyarakat adat, dukungan kapasitas petani/pekebun untuk agroforestri kakao, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk membuat sistem informasi rantai pasok komoditi unggulan basis alam guna mencapai visi Kabupaten Sigi yang berkelanjutan.

3.2.6 Isu Strategis Bonus Demografi

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi adalah percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari penurunan tingkat kematian dan kesuburan di suatu negara dan merupakan perubahan selanjutnya dari perubahan struktur usia dari sebuah populasi. Dengan tingkat kelahiran yang lebih kecil setiap tahunnya, jumlah penduduk usia di bawah produktif akan tumbuh lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi penduduk usia kerja. Dengan lebih sedikit jumlah penduduk lanjut usia, maka sebuah

negara memiliki jendela peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat jika kebijakan pembangunannya dapat dirumuskan dengan tepat. Untuk Kabupaten Sigi, indikasi ini ditunjukkan dengan perkembangan komposisi kelompok umur rentang 15 tahun sampai 64 tahun yang tinggi dibandingkan komposisi umur penduduk di bawah usia 15 tahun dan di atas usia 64 tahun. Pada era bonus demografi ini, akan muncul dan berperan besar ke depan pasca generasi Y dan generasi milenial, adalah generasi Z dan generasi Alfa, dengan ciri dan tantangan zamannya tersendiri.

3.2.7 Isu Strategis Pemindahan Ibukota Negara

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, *green economy*, *green energy*, *smart transportation*, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai *milestone* transformasi besar Bangsa Indonesia. IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa *multiplier effect* dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna

mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045. Kaitannya dengan eksistensi dan pembangunan Kabupaten Sigi, keberadaan IKN di Kalimantan Timur memberikan peluang Kabupaten Sigi sebagai daerah penopang sekaligus sebagai kawasan yang diharapkan mendapat manfaat *multifier effect* baik secara geo politik dan ekonomi, baik dalam proses persiapan pembangunan IKN maupun pada tahap berfungsi IKN sebagai pusat pertumbuhan dan stimulus pemerata pembangunan di luar Jawa.

3.2.8 Isu Strategis Kabupaten Sigi Basis Kearifan Budaya Lokal

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten basis kearifan budaya lokal di Sulawesi Tengah/Indonesia, memiliki ragam khazanah warisan budaya yang berwujud maupun tak berwujud sangat kaya yang tercakup dalam ragam potensi dan objek pemajuan budaya daerah, yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, ragam bahasa, permainan rakyat maupun olahraga tradisional, telah terbukti mampu membangun relasi harmonis dan damai antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam dan antara warga dengan negara. Di antaranya tercermin pada arsitektur rumah tradisional Sigi yang ramah lingkungan dan tahan gempa, pengetahuan/kearifan lokal tentang mitigasi bencana, resolusi konflik dan pemeliharaan harmoni sosial serta mewujudkan *non-western publik management/administration* dan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

3.2.9. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui penataan reformasi birokrasi. Penataan Reformasi dimaksudkan agar organisasi pemerintahan berjalan dengan baik dimana semua unsur dalam organisasi dapat menjalankan fungsi dan perannya.

Tata Kelola pemerintahan dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu penataan kelembagaan birokrasi menekankan pada beberapa prinsip yakni kemampuan sumber daya manusia, Penataan organisasi berupa kejelasan peran dan fungsi aparat dalam melaksanakan tugas, menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Permasalahan birokrasi kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini adalah tatanan organisasi dan manajemen pelayanan, desentralisasi kewenangan, kompetensi aparatur pemerintahan yang masih belum optimal.

Dalam kaitannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan aparatur khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja.

Reformasi Birokrasi perlu dilakukan utamanya pada aspek penataan Kelembagaan yang kuat berdasarkan pada pemahaman organisasi sebagai suatu struktur yang memperlihatkan pada fungsi organisasi sebagai pelayanan pada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan Kabupaten Sigi, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi ditekankan pada pemahaman

organisasi yang kuat sebagai organisasi birokrasi pemerintah yang menekankan pada aspek pelayanan dan menjunjung tinggi nilai profesional, transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu aspek pelayanan publik yang berkualitas menjadi sasaran pokok sebagai bagian penting penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang menekankan pada kualitas pelayanan publik pada masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1. Visi

Visi RPJPD merupakan pernyataan mengenai keadaan yang ingin dicapai dimasa depan dalam 20 Tahun, yang menunjukkan gambaran ideal masa depan bagi Kabupaten Sigi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanahkan bahwa Visi RPJPD harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Kabupaten Sigi.

4.1.1 Visi Indonesia 2025-2045

Visi RPJPN 2025-2045 mengusung filosofis dan makna 5 Pancasila, 100 tahun Indonesia Merdeka yang dijabarkan menjadi 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangunan dengan 45 Indikator Utama Pembangunan 17-8-45.

Visi RPJPN 2025-2045 adalah: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Visi RPJPN atau Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mempunyai pokok visi sebagai berikut:

- a. negara nusantara bermakna negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi keamanan nasional dan budaya atau peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- b. berdaulat bermakna bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri

seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;

- c. maju bermakna bahwa Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil; dan
- d. berkelanjutan bermakna negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Visi Indonesia 2025-2045 memiliki 5 Sasaran Utama dan 8 Misi atau Agenda Pembangunan 2025-2045.

Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2025-2045 yaitu:

- 1. pendapatan per kapita setara negara maju;
- 2. kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
- 3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- 4. daya saing sumber daya bangsa
- 5. intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*.

Misi atau Agenda Pembangunan Nasional 2025-2045 yaitu:

- 1. mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing;
- 2. mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, tenaga kerja, Badan Usaha Milik Negara, penerapan

ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, konektivitas global, serta pembangunan daerah sebagai pusat pertumbuhan;

3. mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat;
4. memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global;
5. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan;
6. membangun kewilayahan di wujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penterjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penterjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan

8. kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Misi Agenda dan Sasaran Utama Indonesia Emas 2025-2045 memiliki 17

Arah atau Tujuan Pembangunan yaitu:

A. Transformasi Sosial, meliputi tujuan:

1. kesehatan untuk semua;
2. pendidikan berkualitas yang merata; dan
3. perlindungan sosial yang adaptif;

B. Transformasi Ekonomi, meliputi tujuan:

1. iptek, Inovasi dan Peroduktivitas Ekonomi;
2. penerapan Ekonomi Hijau;
3. transformasi Digital;
4. integrasi ekonomi domestik dan global; dan
5. perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

C. Transformasi Tata Kelola, meliputi tujuan:

Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas tangkas dan kolaboratif

D. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi sebagai

Landasan Transformasi, meliputi tujuan:

1. hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gentar kawasan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial;
2. stabilitas ekonomi makro; dan
3. ketangguhan diplomasi

E. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Landasan Transformasi, meliputi tujuan:

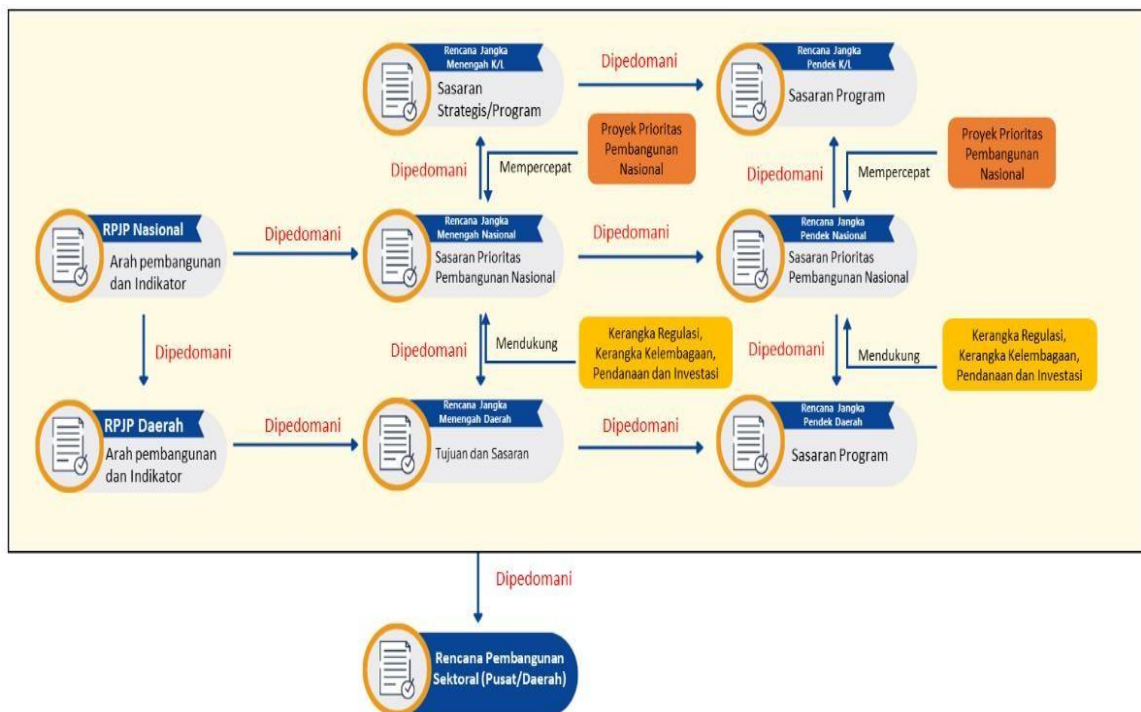
1. beragama maslahat dan berkebudayaan maju

2. keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
3. lingkungan hidup berkualitas
4. berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
5. resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

F. Ke-17 Arah atau Tujuan Pembangunan tersebut mempunyai kerangka implementasi yang meliputi:

1. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
2. mewujudkan sasaran dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
3. mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Gambar 4.1



Keterkaitan RPJMN dengan Dokumen Rencana Lainnya

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

4.1.2 Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045

Untuk Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 adalah:
Sulawesi Tengah sebagai daerah industri berbasis sumber daya alam yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri berbasis sumberdaya alam yang maju, sejahtera dan berkelanjutan	Maju	Provinsi Sulawesi Tengah Berdaya saing, Inovatif, tangguh dan berkeadilan
	Sejahtera	Peningkatan pendapatan yang tinggi yang ditunjang oleh sektor ekonomi unggulan daerah yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang tinggi
	Berkelanjutan	Kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi tersebut mempunyai pokok visi sebagai berikut:

4.1.3 Visi RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045

Kebesaran dan kemajuan Kabupaten Sigi di masa lalu menjadi sebuah inspirasi, dimana pembentukan visi Kabupaten Sigi kedepan tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Sigi, yang akan dimuat dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sigi. Berdasarkan pemahaman dan memperhatikan visi RPJPN tahun 2025-2045 dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2045, rekomendasi KLHS RPJPD, serta analisis terhadap permasalahan dan isu strategis Kabupaten Sigi, maka dirumuskan Visi RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2045 adalah:

“Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Agropolitan Yang Berdaya Saing, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan ”

Secara umum, visi Kabupaten Sigi tahun 2045 ingin meningkatkan kualitas kabupaten dan masyarakatnya yang meliputi aspek sosial, ekonomi, pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup serta tata pemerintahan, dalam 20 tahun kedepan, juga memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan “Visi Indonesia Emas 2045”, dimana penekanan pada kaidah pelaksanaannya mengatur bahwa konsistensi penjabaran RPJPN ke RPJPD salah satunya adalah substansi 8 misi Pembangunan. Berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dan muatan utama RPJPD. Konsistensi RPJPN dan RPJPD juga harus diakomodir pada arah kebijakan dan indikator Pembangunan dalam RPJPN harus menjadi pedoman bagi penyusunan RPJPD, guna menentukan sasaran, arah kebijakan dan indikator Pembangunan.

Untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045, Kabupaten Sigi harus memiliki Visi Pembangunan yang selaras dengan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan Visi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2045 dengan memperhatikan rekomendasi hasil RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045, yaitu :

1. rekomendasi pertama, Kabupaten Sigi sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan Sulawesi Tengah dalam mendukung Ibu Kota Nusantara;
2. rekomendasi kedua, Kabupaten Sigi menerapkan konsep ekonomi hijau dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan;
3. rekomendasi ketiga, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dengan membangun Kabupaten Sigi Menjadi Kabupaten Trans Lintas Tengah, melalui jalur mulai dari: Palu – Kalawara - Kulawi – Gimpu – Peana – Kalamanta – Seko. Sebagai penyempurna keberadaan lintas trans yang telah ada dan dirasakan belum memberi arti yang kuat terhadap perekonomian Kabupaten Sigi, seperti:

1. lintas trans timur (Palu – Poso – Pendolo – Masamba);

2. lintas trans barat (Palu – Pasangkayu – Mamuju);
3. lintas trans utara (Palu – Parigi – Gorontalo)

Hal ini diyakini belum mampu mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan rakyat miskin di Kabupaten Sigi.

4. rekomendasi keempat, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kabupaten Sigi
5. rekomendasi kelima, Menjadikan Kabupaten Sigi sebagai salah satu Kabupaten yang mengembangkan Agroindustri Pertanian berbasis Pariwisata

Hal ini sejalan dengan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045 yang menyatakan arahan pokok pikiran Visi yakni:

- Agropolitan : Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang tumbuh dan berkembang bercirikan pertanian yang ditopang oleh sistem dan usaha agribisnis, agroindustri, agrowisata, dalam mendukung pembangunan wilayah sekitarnya menuju kota jasa.
- Mandiri : Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang kuat, berdaya saing dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan krisis, serta mampu memanfaatkan potensi masyarakat Kabupaten Sigi yang religi sebagai modal dasar pembangunan.
- Maju : Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang moderen, menjunjung tinggi kearifan lokal, membangun sesuai karakteristik wilayah, mampu bersaing di kancah regional

maupun nasional, mewujudkan masyarakat mareso Masagena.

- Berkelanjutan: Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan hijau berkelanjutan, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan sosial, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta didukung oleh tata kelola yang baik.

Kabupaten Sigi di masa depan, harus menjadi Kabupaten yang mampu bersaing dengan wilayah besar lain di Indonesia, untuk menarik investasi dengan konektivitas dan kontribusi arus orang atau barang, jasa, dan keuangan. Salah satu keunggulan kompetitif Kabupaten Sigi adalah sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor penting.

Masyarakat Kabupaten Sigi di masa depan diproyeksikan memiliki kualitas manusia yang unggul dan berdaya saing global, yang telah memperoleh kualitas hidup terbaik dengan pelayanan publik-seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, yang prima dan inklusif. Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi juga serta sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat penyediaan kesempatan kerja dan berusaha dan penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Meskipun pembangunan mampu membawa kemajuan baik pada masyarakatnya, namun kemajuan tersebut harus tetap mengakar pada tradisi, adat istiadat masyarakat “Kaili” sebagai kearifan lokal. Memajukan dan melestarikan serta perlindungan terhadap kebudayaan. Nilai tradisi

warisan luhur harus mampu menjadi akar terhadap kemajuan dan inovasi, dengan mengarusutamakan dalam sistem pendidikan serta interaksi antar masyarakat. Tradisi dan seni budaya juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta untuk memperkuat citra Kabupaten Sigi, juga untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter, inovatif, kreatif dan disiplin.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka penjelasan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sigi tahun 2025-2045 dapat berkontribusi nyata dalam capaian Indonesia Emas tahun 2045, sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Agropolitan, Yang Berdaya Saing Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Agropolitan	Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang tumbuh dan berkembang bercirikan pertanian yang ditopang oleh sistem dan usaha agribisnis, agroindustri, agrowisata, dalam mendukung pembangunan wilayah sekitarnya menuju kota jasa.
	Berdaya Saing	Kabupaten Sigi yang Berdaya Saing Berbasis Agribisnis merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan Kesejahteraan. Perwujudan kesejahteraan di upayakan melalui Pertumbuhan Ekonomi, yang pada hakekatnya merupakan indikator peningkatan produksi dari kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya.
	Mandiri	Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang kuat, berdaya saing dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan krisis, serta mampu memanfaatkan potensi masyarakat sigi yang religi sebagai modal dasar pembangunan. Kabupaten Sigi diproyeksikan menjadi salah satu kabupaten maju di Indonesia. Kabupaten maju yang didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dan merata seperti jalan, drainase, air bersih atau air minum, pengelolaan sampah, dan transportasi umum, dengan ruang publik yang memadai dan ramah lingkungan. Selain itu Kabupaten Sigi juga harus menjadi kabupaten cerdas

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		yang mampu mendorong aksesibilitas dan berkreaitivitas dalam mendapatkan informasi dan layanan publik, serta mampu mengintegrasikan data untuk mendukung pengambilan kebijakan dan proses bisnis. Kemajuan sebuah kabupaten juga harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman dan mampu menjadi kabupaten yang tangguh dan berketahanan terhadap resiko bencana serta mampu menjadi wilayah berkelanjutan.
	Maju	Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang moderen, menjunjung tinggi kearifan lokal, membangun sesuai karakteristik wilayah, mampu bersaing di kancah regional maupun nasional, mewujudkan masyarakat masagena
	Berkelanjutan	Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan hijau berkelanjutan, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan sosial, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta didukung oleh tata kelola yang baik.

Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Agropolitan, Yang Berdaya Saing Mandiri, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kepemimpinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emision*.

1. sasaran pertama adalah, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2045;
2. sasaran kedua adalah, sejalan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga tingkat kemiskinan di Tahun 2045 diikuti dengan penurunan jumlah

- penduduk rentan miskin, ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini. Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan Pendapatan Daerah Regional Bruto;
3. sasaran ketiga adalah sejalan dengan kemajuan Kabupaten Sigi, peran dan pengaruh Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang meningkat yang dicerminkan dengan kepemimpinan daerah serta berkontribusi terhadap penyelarasan isu daerah yang diukur dengan indeks reformasi birokrasi.
 4. sasaran keempat adalah pendapatan perkapita Kabupaten Sigi Tahun 2045 yang didorong oleh kontribusi Pendapatan Daerah Regional Bruto industri pengolahan;
 5. sasaran kelima, dalam mewujudkan Kabupaten Sigi yang maju, Kabupaten Sigi berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca di Tahun 2045.

Tabel 4.2

Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045

No	RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
-1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,48	90	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75	90
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	11,75	9,5	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	11	1
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,298-0,302	0,236-0,287		b. Rasio gini (Indeks)	0,25	0,20
		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2,09	3,05		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	6,67	10,37
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Daerah Yang Meningkat	Indeks Reformasi Birokrasi	78	100	Kepemimpinan dan Pengaruh di Daerah Yang Meningkat	Indeks Reformasi Birokrasi	50	100
4	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	154,25-154,17	1.191,02-1.446,61	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	48	139
		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97-41,45	49,17-52,70		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	8,18	10
						c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3	25
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,96	96,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	28	51,51

Visi RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJPD harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. RPJPD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Sigi untuk 20 tahun. Visi merupakan kondisi Kabupaten Sigi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan di tahun 2045, yang kemudian dilaksanakan melalui upaya-upaya pada misi guna mewujudkan visi sebagai komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Visi dan misi harus dapat dinilai keberhasilan ataupun kegagalannya melalui penetapan target kinerja yang merupakan kuantifikasi visi dan misi pada sasaran pokok pembangunan. Sasaran pokok merupakan target berdasarkan arah kebijakan pada setiap pentahapan pembangunan untuk 5 tahunan, per periode RPJMD.

4.2. Misi RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang kemudian dirumuskan ke dalam misi, dengan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan berbagai agenda pembangunan untuk mencapai sasaran pokok yang ingin dicapai Kabupaten Sigi dalam jangka waktu 5 Tahun atau pentahapan per periode RPJMD. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dimana rumusan misi harus cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

Berangkat dari permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kabupaten Sigi yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum dapat dijelaskan masalah pokok guna perumusan misi RPJPD adalah berkaitan dengan dimensi pembangunan ekonomi, dimensi pembangunan sosial, dimensi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta dimensi tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan visi, permasalahan pembangunan dan isu strategi, rumusan Misi RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045 mencakup 6 Misi yang telah mengakomodir 8 Misi Nasional, yang dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1. Transformasi Sosial: Sumber Daya manusia yang berdaya saing
- Misi 2. Transformasi Ekonomi: Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan
- Misi 3. Transformasi Tata Kelola: Reformasi birokrasi pemerintahan yang berkualitas, supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah
- Misi 4. Mewujudkan lingkungan hidup yang handal.
- Misi 5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur secara merata dan berkeadilan.
- Misi 6. Kestinambungan Pembangunan.

RPJPN bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sedangkan yang bersifat spesifik daerah dimuat di RPJPD. Sesuai kaidah pelaksanaan RPJPN, bahwa sinkronisasi RPJPN kedalam RPJPD dilakukan melalui penjabaran 8 misi atau Agenda Pembangunan, berikut 20 upaya transformatif yang telah ditetapkan di dalam RPJPN merupakan bagian muatan utama yang harus masuk di dalam RPJPD.

Sinkronisasi agenda RPJPN dengan misi RPJPD Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Penyelarasan 8 Misi Pembangunan RPJPD ke dalam Misi Pembangunan Kabupaten Sigi

No	RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2045		RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045		
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi		Misi	
1	2	3	4	5	6
1	Transformasi Indonesia	M1	Transformasi Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	M1	Transformasi Sosial : Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
2		M2	Transformasi Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	M2	Transformasi Ekonomi : Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
3		M3	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	M3	Transformasi Tata Kelola : Pemerintahan Yang Berkualitas, Supremasi Hukum Stabilitas Dan Kestinambungan Pembangunan
4	Landasan Transfromasi	M4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	M3	Transformasi Tata Kelola : Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Berkualitas, Supremasi Hukum Stabisitas Dan Kestinambungan Pembangunan
5		M5	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	M4	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Handal
6	Kerangka Implementasi Transformasi	M6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	M5	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan
7		M7	Mewujudkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	M4	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Handal
8		M8	Kestinambungan pembangunan	M6	Kestinambungan pembangunan

Dari 8 Misi atau Agenda RPJPN dapat dijabarkan menjadi 6 Misi RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2025-2045 yang merupakan muatan utama, dimana seluruh atau 100 persen delapan misi RPJPN bersesuaian dan sinkron dengan Misi RPJPD Kabupaten Sigi. Misi RPJPD selanjutnya akan dijabarkan menjadi 18 Sasaran Pokok dan memuat indikator kinerja yang menjadi target untuk capaian RPJPD Kabupaten Sigi.

4.2.1 Penjelasan Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah

a. transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing

Pembangunan Sulawesi Tengah selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar, termasuk perubahan dalam jumlah struktur dan jumlah penduduk, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah kemajuan teknologi dan pembangunan manusia dalam segala sektor. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut, masyarakat siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam rangka pencapaian misi pertama yakni transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar yang berkualitas dan merata, perlindungan sosial yang adaptif, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi serta peningkatan produktivitas ekonomi yang unggul.

- b. transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan:

Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yaitu ditujukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta memiliki nilai tambah yang tinggi yang didukung oleh inovasi teknologi yang tinggi sehingga mendorong efisiensi menghasilkan produk komoditas yang berkualitas, akselerasi usaha mikro, kecil dan menengah dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan pasar dan adaptif terhadap transformasi digital.

Pengembangan transformasi digital dengan menerapkan teknologi informatika dan komunikasi serta inovasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan hasil hutan, Nilai tambah komoditas impor dan pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan riset dan inovasi.

Peningkatan kontribusi nilai tambah komoditas unggulan daerah, pariwisata, dan sektor jasa lainnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, dan peningkatan kontribusi barang jasa yang didukung oleh tenaga kerja terampil yang memiliki *competitive advantage* dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto Sulawesi Tengah, yang dikelola dengan memperhatikan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pemasaran dan pasar komoditas unggulan yang masuk dalam jaringan nasional dan dunia, pariwisata dengan standarisasi dunia, tenaga kerja dengan nilai persaingan yang tinggi, lingkungan hidup yang berkelanjutan, komoditas ekspor yang memenuhi kualifikasi ramah lingkungan.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah mejadi lebih mandiri dan berperan besar bagi perekonomian disetiap daerah, yang didukung oleh inovasi dan pengetahuan teknologi pemasaran, tenaga kerja berkualitas dan akses ke pasokan modal yang terintegrasi, desain baru yang menarik serta yang didukung oleh suplai bahan baku yang berkualitas. Database koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah semakin semakin terupdate dan valid menjadi basis dalam proses perencanaan perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas:

Transformasi tata kelola dilakukan melalui penguatan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara, Regulasi yang efisien, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil guna mewujudkan manusia tata keola pemerintahan yang berkualitas, penguatan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dan penguatan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara, Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif dengan difokuskan pada peningkatan elektabilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu, serta layanan pemerintahan yang menguasai teknologi dan digitalisasi

sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisiensi dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

- d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;

Stabilitas ekonomi sangat berpengaruh terhadap terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang stabil dan kondusif. Hal ini menjadi modal utama dalam pembangunan. Stabilitas politik dan Keamanan menjadi prasyarat mutlak bagi perkembangan investasi.

- e. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Lingkungan hidup yang handal ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas hidup serta mengurangi resiko bencana, yang dapat ditempuh dengan memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi dilaksanakan untuk terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, kebudayaan daerah yang maju, lingkungan hidup yang berkualitas, ketahanan energi, air, ketahanan pangan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang handal diharapkan meningkatnya kualitas lingkungan dan tangguh terhadap resiko bencana untuk terwujudnya Sulawesi Tengah Emas 2045.

- f. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan yang ditandai dengan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah karena terpusatnya sumber daya penggerak ekonomi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Untuk itu upaya percepatan pemerataan pembangunan yaitu peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pengembangan wilayah berbasis klaster perwilayahan sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Klaster Perkotaan Pasigala meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi;
2. Klaster Agropolitan yaitu Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara. Agropolitan Bolipamuso meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
3. Klaster Industri Morubang meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan
4. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Peningkatan konektivitas wilayah dapat ditempuh melalui:

1. peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi

melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik Sulawesi Tengah; dan

2. menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah dengan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pencapaian tersebut ditandai dengan menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah serta meningkatnya pelayanan dasar perumahan (air minum, sanitasi layak, rumah layak huni korban bencana, penanganan kawasan kumuh dan ketersediaan listrik) dan pekerjaan umum (jalan dan irigasi), yang pada akhirnya terwujud Sulawesi Tengah Emas 2045.

Dalam rangka mempermudah pelayanan dapat melakukan pemekaran wilayah yang menghasilkan daerah otonom baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Penyediaan sarana dan prasaran dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan ditandai dengan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Melalui upaya peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau

sesuai dengan karakteristik wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dan ramah lingkungan yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

h. kesinambungan pembangunan

Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan melalui pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif untuk pembiayaan sektor publik, melalui:

1. peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain kerja sama Pemerintah dan badan usaha, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke Daerah, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
3. peningkatan kolaborasi antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
4. penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah;
5. pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk kerja sama Pemerintah dan badan usaha dan pembiayaan campuran; dan
6. percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan super hub ekonomi IKN yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital.

Pencapaian tersebut dilaksanakan dengan melakukan akselerasi pembangunan melalui pengembangan pembiayaan yang inovatif, yang bertujuan untuk penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Tengah serta peningkatan pelayanan dasar.

4.2.2 Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Sigi

a. transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing

Transformasi sosial dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Transformasi difokuskan pada upaya untuk menghilangkan hambatan yang dapat mencegah masyarakat untuk berkembang, khususnya pada upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kemampuan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai landasan atau pijakan dalam upaya beradaptasi pada setiap revolusi industri atau perkembangan zaman yang akan terjadi dalam 20 tahun ke depan.

b. transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Sektor ekonomi dilandaskan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif, infrastruktur dan kebijakan perekonomian yang didasarkan pada konsep ekonomi hijau dapat diselenggarakan dengan optimal, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat berkembang dengan lebih mudah dan cepat.

Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan:

- 1) pengembangan transformasi digital dengan menerapkan teknologi informatika dan komunikasi serta inovasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan hasil hutan, nilai tambah komoditas impor dan pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas skill dan kompetensi tenaga kerja, pengembangan riset dan inovasi;
 - 2) peningkatan kontribusi nilai tambah komoditas unggulan daerah, pariwisata, dan sektor jasa lainnya dalam pembentukan produk domestik regional bruto, dan peningkatan kontribusi barang jasa yang didukung oleh tenaga kerja terampil yang memiliki keunggulan bersaing dalam pembentukan pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Sigi, yang dikelola dengan memperhatikan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
 - 3) pemasaran dan pasar komoditas unggulan yang masuk dalam jaringan nasional dan dunia, pariwisata dengan standarisasi dunia, tenaga kerja dengan nilai persaingan yang tinggi, lingkungan hidup yang berkelanjutan, komoditas ekspor yang memenuhi kualifikasi ramah lingkungan.
- c. transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah

Tata kelola pemerintahan yang mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Termasuk didalamnya adalah perwujudan Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten Agropolitan di Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas ditempuh dengan upaya;

- 1) penguatan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, regulasi yang efisien, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil guna mewujudkan manusia tata kelola pemerintahan yang berkualitas;
- 2) optimalkan regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif melalui penyederhaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi;
- 3) peningkatan kualitas tata kelola, kelembagaan, dan regulasi berbasis teknologi informasi;
- 4) arah kebijakan manajemen aparatur sipil negara untuk mendukung sektor atau bidang strategis yang difokuskan pada penataan pelayanan dasar; dan
- 5) penguatan kelembagaan secara kolaboratif, sumber daya manusia aparatur sipil negara yang berkualitas guna mewujudkan manusia tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Stabilitas ekonomi sangat berpengaruh terhadap terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang stabil dan kondusif. Hal ini menjadi modal utama dalam pembangunan. Stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat mutlak bagi perkembangan investasi. Stabilitas dalam konteks penanaman modal atau investasi lebih dari sekadar terjaganya kondisi makro ekonomi dan kepastian hukum. Unsur lain yang tidak kalah substansial ialah kejelasan regulasi, kelembagaan, kepastian ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur,

koordinasi pusat-daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta peran sektor bisnis.

Keberadaan investasi merupakan tulang punggung perekonomian karena tidak hanya sekedar mampu menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang atau jasa, tetapi juga membantu menciptakan nilai tambah bagi ekonomi Kabupaten Sigi.

Supremasi hukum sering dipahami sebagai salah satu esensi demokrasi. Karena supremasi hukum mengimplikasikan dua hal, yaitu mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, supremasi hukum memiliki implikasi menjaga masyarakat agar dalam menjalankan haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acapkali berujung anarkis.

Supremasi hukum menjadi batasan bagi pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Sigi sehingga memberikan rasa aman bagi investor yang mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sigi.

d. mewujudkan lingkungan hidup yang handal

Ditandai dengan meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas hidup serta mengurangi resiko bencana, yang dapat ditempuh melalui:

- 1) memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, agar tercapai

keseimbangan antara kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan;

2) memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif;

3) mewujudkan ketangguhan masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan; dan

4) mewujudkan Kabupaten Sigi sebagai wilayah yang mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

e. mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur secara merata dan berkeadilan

Ditandai dengan peningkatan pembangunan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam upaya peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang dapat ditempuh melalui:

1) peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, seperti di wilayah yang dekat dengan pengembangan Kota Palu serta di wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Sigi; dan

2) menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sigi.

f. kesinambungan pembangunan

Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan melalui pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif untuk pembiayaan sektor

publik, melalui:

- 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain kerja sama pemerintah dan badan usaha, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke Daerah, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- 3) peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- 4) penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah; dan
- 5) percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pencapaian tersebut dilaksanakan dengan melakukan akselerasi pembangunan melalui pengembangan pembiayaan yang inovatif, yang bertujuan untuk penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sigi serta peningkatan pelayanan dasar.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045, maka perlu dijabarkan menjadi beberapa langkah strategis untuk mencapainya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan masing-masing 5 (lima) tahunan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai peta jalan (road map) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi melalui penyelesaian dan solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan dan diatasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada seluruh stakeholders dan sumberdaya yang dimiliki daerah Kabupaten Sigi, agar dalam mencapai tujuan jangka Panjang daerah menjadi lebih optimal. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima

tahun periode kepala daerah, guna mencapai sasaran RPJPD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJPD. Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencermink-an urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJPD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena arah kebijakan yang disusun telah memperhatikan benang merah antara apa yang disajikan dalam visi dan misi jangka panjang serta mengsinergikan antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi disusun dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan pada situasi, kondisi dan realitas saat RPJPD disusun terkait semua potensi, peluang, kendala, serta tantangan yang mungkin timbul selama masa periode perencanaan Pembangunan pada masa mendatang. Antisipasi terhadap segala bentuk kemungkinan yang terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif pada masa pemerintahan

berkaitan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis pada wilayah setempat. Oleh karena itu, maka arah kebijakan juga ditetapkan berdasarkan pandangan terhadap proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian atas evaluasi hasil pembangunan RPJPD periode sebelumnya, agar dapat memperoleh gambaran nyata tentang kondisi daerah yang ingin dicapai pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari seluruh pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih, agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan kebijakan yang akan menjadi koridor bagi pelaksanaan setiap periode pemerintahan sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dari periode ke periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh RPJPD sampai akhir periode tahun 2045.

Arah kebijakan pembangunan dirumuskan sebagai suatu instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan yang dijabarkan dalam sasaran pokok pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 Tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap. Berdasarkan visi dan

misi jangka panjang daerah tersebut dan tema Pembangunan, maka arah kebijakan pokok dirumuskan berdasarkan periodisasi pembangunan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi dan Arah Kebijakan
RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025 -2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Agropolitan Yang Berdaya Saing, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	1. Transformasi Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Penguatan Pondasi Transformasi dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui:	Akselerasi Transformasi dengan percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui:	Ekspansi Global dengan penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui:	Mewujudkan Sigi Emas dengan mewujudkan Manusia Sigi yang Unggul melalui:
		∞ Pengarusutamaan Sigi Masagena untuk penguatan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Akselerasi dalam pengarusutamaan Sigi Masagena untuk penguatan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Pemantapan dalam pengarusutamaan Sigi Masagena untuk penguatan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Paripurna dalam pengarusutamaan Sigi Masagena untuk penguatan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
		∞ Perluasan upaya promotif-preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif pembudayaan perilaku hidup sehat	Percepatan perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Penguatan dan keberlanjutan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Paripurna dalam upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
		∞ Penanganan stunting, serta eliminasi penyakit menular di daerah endemis yaitu sistosomiasis	Percepatan penanganan stunting, serta percepatan eliminasi penyakit menular di daerah endemis yaitu sistosomiasis	Penguatan dan keberlanjutan penanganan stunting, serta eliminasi penyakit menular di daerah endemis yaitu sistosomiasis	Paripurna dalam penanganan stunting, serta eliminasi penyakit menular di daerah endemis yaitu sistosomiasis

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah terisolir dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam	Percepatan penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah terisolir dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam	Penguatan dan keberlanjutan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah terisolir dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam	Paripurna dalam penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah terisolir dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam
		∞ Perkuatan tenaga medis dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP	Percepatan perkuatan tenaga medis dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP	Keberlanjutan dalam perkuatan tenaga medis dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP	Paripurna dalam perkuatan tenaga medis dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP
		∞ Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Percepatan pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Penguatan dan keberlanjutan pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Paripurna dalam pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan)
		∞ Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat Kesehatan	Percepatan diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan	Penguatan dan keberlanjutan diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan	Paripurna dalam diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Peningkatan beasiswa sekolah baik untuk pendidikan menengah maupun tinggi bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu	Penguatan beasiswa sekolah baik untuk pendidikan menengah maupun tinggi bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu	Keberlanjutan beasiswa sekolah baik untuk pendidikan menengah maupun tinggi bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu	Paripurna dalam pemberian beasiswa sekolah baik untuk pendidikan menengah maupun tinggi bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu
		∞ Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Percepatan perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Keberlanjutan perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif	Paripurna dalam perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
		∞ Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan galian C, industri pengolahan hasil pertambangan galian C, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta keterkaitan dengan DUDI	Percepatan peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan galian C, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta keterkaitan dengan DUDI	Penguatan dan keberlanjutan peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan C, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta keterkaitan dengan DUDI	Paripurna dalam peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan galian C, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta keterkaitan dengan DUDI

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
∞		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan insentif untuk guru, dan penguatan sekolah terbuka	Percepatan penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan insentif untuk guru, dan penguatan sekolah terbuka	Penguatan dan keberlanjutan penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan insentif untuk guru, dan penguatan sekolah terbuka	Paripurna dalam penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan insentif untuk guru, dan penguatan sekolah terbuka
		Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif	Percepatan pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif	Penguatan dan keberlanjutan pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif	Paripurna dalam pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Percepatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Penguatan dan keberlanjutan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	Paripurna dalam perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas

Visi	Misi	Arah Kebijakan				
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi		Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
	2 Transformasi Perekonomian Yang Inklusif dan Berkelanjutan	∞	Kabupaten Sigi (sebagai bagian dari pengembangan wilayah Sulawesi Tengah) diarahkan sebagai penunjang ekonomi Ibukota Nusantara (IKN), pengembangan industri hilirisasi dan lumbung pangan nasional	Akselerasi transformasi Kabupaten Sigi (sebagai bagian dari pengembangan wilayah Sulawesi Tengah) sebagai penunjang ekonomi Ibukota Nusantara (IKN), pengembangan industri hilirisasi dan lumbung pangan nasional	Pemantapan Kabupaten Sigi (sebagai bagian dari pengembangan wilayah Sulawesi Tengah) sebagai penunjang ekonomi Ibukota Nusantara (IKN), pengembangan industri hilirisasi dan lumbung pangan nasional	Kabupaten Sigi (sebagai bagian dari pengembangan wilayah Sulawesi Tengah) unggul sebagai penunjang ekonomi Ibukota Nusantara (IKN), pengembangan industri hilirisasi dan lumbung pangan nasional
		∞	Penerapan investasi hijau/lestari sebagai branding Kabupaten Sigi	Akselerasi penerapan investasi hijau/lestari sebagai branding Kabupaten Sigi	Pemantapan dalam pene-rapan investasi hijau/ lestari sebagai branding Kabupaten Sigi	Unggul dalam penerapan investasi hijau/lestari sebagai branding Kabupaten Sigi
		∞	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berba sis sumber daya kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pening katan daya saing sektor pertanian dan perika nan berikut pengemban gan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;	Akselerasi transformasi nilai tambah dan komp leksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta peningkatan daya saing sektor pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;	Pemantapan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pening katan daya saing sektor pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;	Unggul dalam nilai tambah dan komplek sitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta peningkatan daya saing sektor pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;
		∞	Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, wisata alam)	Akselerasi transformasi daya saing sektor tradisional untuk pertumbu-han berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, wisata alam)	Pemantapan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya,wisata alam)	Unggul dalam daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, wisata alam)

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspanasi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya	Akselerasi transformasi kapasitas emerging sektors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidik-an dan riset, serta manajemen sumber daya	Pemantapan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya	Unggul dalam kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya
		∞ Optimalisasi peran pusat pertumbuhan baru dan kawasan transmigrasi untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah	Akselerasi transformasi peran pusat pertumbuhan baru dan kawasan transmigrasi untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah	Pemantapan peran pusat pertumbuhan baru dan kawasan transmigrasi untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah	Unggul sebagai peran pusat pertumbuhan baru dan kawasan transmigrasi untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah
		∞ Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif	Akselerasi transformasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif	Pemantapan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif	Unggul sebagai peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
		∞ Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui <i>System Rice Intensification</i> (SRI) dan pertanian orgnik serta diversifikasi pangan selain beras seperti sagu, jagung, umbi-umbian dan bahan pangan spesifik lokal (sumberdaya genetikl lokal) seperti vailo, kacang merah, kentang lokal, pisang ambon lokal dan jagung merah sigi, dll	Akselerasi transformasi kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui System Rice Intensification (SRI) dan pertanian orgnik serta diversifikasi pangan selain beras seperti sagu, jagung, umbi-umbian dan bahan pangan spesifik lokal (sumberdaya genetikl lokal) seperti vailo, kacang merah, kentang lokal, pisang ambon lokal dan jagung merah sigi, dll	Pemantapan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui System Rice Intensification (SRI) dan pertanian orgnik serta diversifikasi pangan selain beras seperti sagu, jagung, umbi-umbian dan bahan pangan spesifik lokal (sumberdaya genetikl lokal) seperti vailo, kacang merah, kentang lokal, pisang ambon lokal dan jagung merah sigi, dll	Unggul dalam kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui System Rice Intensification (SRI) dan pertanian orgnik serta diversifikasi pangan selain beras seperti sagu, jagung, umbi-umbian dan bahan pangan spesifik lokal (sumberdaya genetikl lokal) seperti vailo, kacang merah, kentang lokal, pisang ambon lokal dan jagung merah sigi, dll

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerja sama antar daerah	Akselerasi transformasi rantai nilai global melalui skema kerja sama antar daerah	Pemantapan rantai nilai global melalui skema kerja sama antar daerah	Unggul dalam rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama antar daerah
		∞ Peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Akselerasi transformasi produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan	Pemantapan produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Unggul dalam produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan yang paripurna
		∞ Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (ecotourism)	Akselerasi transformasi nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (ecotourism)	Pemantapan produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan pertumbuhan ekonomi (ecotourism)	Unggul dalam nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (ecotourism)
		∞ Penerapan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	Akselerasi transformasi penerapan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	Pemantapan penerapan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan	Unggul dalam penerapan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan
		∞ Peningkatan up-skilling dan reskilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan galian C dan industri	Akselerasi transformasi up-skilling dan reskilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan galian C dan industri	Pemantapan up-skilling dan reskilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan galian C dan industri	Unggul dalam up-skilling dan reskilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan galian C dan industri

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspanasi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Akselerasi transformasi pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Pemantapan pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Unggul dalam pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
		∞ Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (seperti biomasa tanaman/tumbuhan - biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik	Akselerasi transformasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (seperti biomasa tanaman/ tumbuhan - biofuel) guna memper-baiki bauran pembangkit listrik	Pemantapan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (seperti biomasa tanaman/tumbuhan - biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik	Unggul dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (seperti biomasa tanaman/tumbuhan - biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik
		∞ Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated minigrid</i>) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	Akselerasi transformasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini-grid</i>) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	Pemantapan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini-grid</i>) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	Unggul dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini-grid</i>) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas
		∞ Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Akselerasi transformasi utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Pemantapan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Unggul dalam utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		[∞] Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill	Akselerasi transformasi fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill	Pemantapan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill	Unggul dalam fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill

Visi	Misi	Arah Kebijakan				
		Periode I (2025-2029)		Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Perkuatan Pondasi Transformasi		Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Mewujudkan Sigi Emas
	3 Transformasi Tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kesenambungan Pembangunan	∞	Regulasi yang efektif melalui optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregu-lasi yang memadai	Regulasi berbasis teknologi informa-tif melalui akselerasi optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai	Pemantapan Regulasi yang adaptif	Regulasi yang adaptif dan taat azas
		∞	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sipil	Meningkatkan partisipasi masyara-kat sipil yang bermakna termasuk pelibatan Masyarakat	Pemantapan partisipasi masyarakat sipil	Masyarakat sipil yang mandiri
		∞	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Akselerasi transformasi dalam peningkatan responss terhadap laporan pelayanan publik Masyarakat	Pemantapan respons terhadap laporan pelayanan publik Masyarakat	Paripurna dalam respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat
		∞	Pengembangan smart government serta peng uatan kapasitas apara tur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	Akselerasi transformasi melalui kelembagaan kolaboratif untuk peng embangan smart govern ment serta penguatan kapasitas aparatur dae rah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informa si kapasitas digi tal SDM ASN, dan peng elolaan aset daerah	Pemantapan kelembaga an adaptif untuk pengembangan smart govern ment	Smart government yang paripurna, berin tegritas, tangkas, dan kolaboratif
		∞	Digitalisasi layanan publik dan pelaksana an audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Akselerasi transformasi dalam digitalisasi laya nan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Paripurna dalam layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Pondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
∞		Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Akselerasi transformasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Pemantapan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Paripurna dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	SDM ASN berkualitas melalui akselerasi transformasi dalam pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	Pemantapan SDM ASN yang kompetitif	SDM ASN yang paripurna
		Peningkatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Akselerasi peningkatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Pemantapan kapasitas fiskal melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Paripurna dalam kapasitas fiskal melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Perkuatan Pondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Pengendalian inflasi	Akselerasi pengendalian inflasi	Pemantapan pengendalian inflasi	Paripurna dalam pengendalian inflasi
		∞ Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Akselerasi transformasi untuk sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Paripurna untuk sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		∞ Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Akselerasi transformasi untuk sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Paripurna untuk sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten
		∞ Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional	Akselerasi transformasi akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional	Akuntabilitas kinerja pemda berskala global	Paripurna dalam akuntabilitas kinerja pemda
		∞ Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko	Akselerasi transformasi pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko	Pemantapan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko	Paripurna dalam pengendalian Pembangunan
		∞ Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Akselerasi transformasi sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Pemantapan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data Pembangunan	Paripurna untuk sistem elektronik terpadu dan tata kelola data Pembangunan
		∞ Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance	Akselerasi transformasi pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU	Pembiayaan inovatif berskala global	Paripurna untuk pembiayaan inovatif
		∞ Penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme	Akselerasi penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme	Akuntabilitas penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme	Paripurna penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Pondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Akselerasi peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Akuntabilitas peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Paripurna peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
		∞ Penguatan integritas partai politik	Akselerasi penguatan integritas partai politik	Akuntabilitas penguatan integritas partai politik	Paripurna penguatan integritas partai politik
		∞ Pengutan pengendalian inflasi daerah	Akselerasi penguatan pengendalian inflasi daerah	Akuntabilitas penguatan pengendalian inflasi daerah	Paripurna penguatan pengendalian inflasi daerah
		∞ Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Akselerasi penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Akuntabilitas penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Paripurna penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
4	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Handal	Penguatan pondasi transformasi dengan memper kuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, melalui:	Akselerasi transformasi dengan memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, melalui	Ekspansi global dengan mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan, melalui	Mewujudkan Sigi Emas dengan mewujudkan Sigi sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan, melalui:
		∞ Pengarusutamaan Sigi Religi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kerukunan umat beragama	Akselerasi dalam pengarusutamaan Sigi Religi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kerukunan umat beragama	Pemantapan dalam pengarusutamaan Sigi Religi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kerukunan umat beragama	Paripurna dalam pengarusutamaan Sigi Religi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kerukunan umat beragama
		∞ Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Akselerasi transformasi pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Pemantapan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Pendidikan berbasis kerukunan antar etnis dan agama yang paripurna
		∞ Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak	Akselerasi transformasi modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak	Pemantapan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak	Modal sosial yang paripurna untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak
		∞ Pengarusutamaan Sigi Hijau dalam memperkuat ketahanan ekologi	Akselerasi pengarusutamaan Sigi Hijau dalam memperkuat ketahanan ekologi	Pemantapan pengarusutamaan Sigi Hijau dalam memperkuat ketahanan ekologi	Paripurna dalam pengarusutamaan Sigi Hijau dalam memperkuat ketahanan ekologi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Akselerasi transformasi perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Perencanaan tata ruang berbasis global	Perencanaan tata ruang yang paripurna
		∞ Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana	Akselerasi transformasi manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana	Manajemen bencana berbasis global	Manajemen bencana yang paripurna
		∞ Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan	Akselerasi transformasi pembangun-an infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan	Pemantapan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan	Paripurna dalam pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan
		∞ Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana	Akselerasi transformasi pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana	Pemantapan pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana	Paripurna dalam pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana
		∞ Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat	Akselerasi transformasi pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari Masyarakat	Pemantapan pembangunan tampungan air serba guna	Paripurna dalam pembangunan tampungan air serba guna
		∞ Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting	Akselerasi transformasi pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting	Pemantapan pengembangan dan pengelolaan irigasi	Paripurna dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai	Akselerasi transformasi pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di Sungai	Pemantapan pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir	Paripurna dalam pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir
		∞ Pengembangan Flood Forecasting Warning System	Akselerasi transformasi pengembangan Flood Forecasting Warning System	Pengembangan Flood Forecasting Warning System berbasis global	Paripurna dalam pengembangan Flood Forecasting Warning System
		∞ Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk men jaga keberadaan hutan alam dan menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah sat wa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi diantaranya Anoa dan Babi Rusa	Akselerasi transformasi penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Anoa dan Babi Rusa	Pemantapan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi	Paripurna dalam upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi (Taman Nasional Lore Lindu) sebagai cagar biosfer dunia
		∞ Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim	Akselerasi transformasi peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim	Pemantapan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim	Paripurna kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim
		∞ Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas	Akselerasi transformasi penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas	Pemantapan penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas	Paripurna dalam penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim	Akselerasi transformasi penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim	Pemantapan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim	Paripurna dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim
		∞ Penyediaan air minum yang layak dan ramah lingkungan	Akselerasi transformasi penyediaan air minum yang layak dan ramah lingkungan	Pemantapan upaya penyediaan air minum yang layak dan ramah lingkungan	Paripurna dalam upaya penyediaan air minum yang layak dan ramah lingkungan
		∞ Ketersediaan rumah layak huni	Akselerasi transformasi ketersediaan rumah layak huni	Pemantapan upaya ketersediaan rumah layak huni	Paripurna dalam upaya ketersediaan rumah layak huni
		∞ Kualitas pemukiman yang ramah lingkungan	Akselerasi transformasi kualitas pemukiman yang ramah lingkungan	Pemantapan upaya kualitas pemukiman yang ramah lingkungan	Paripurna dalam upaya kualitas pemukiman yang ramah lingkungan

Visi	Misi	Arah Kebijakan							
		Periode I (2025-2029)		Periode II (2030-2034)		Periode III (2035-2039)		Periode IV (2040-2045)	
		Perkuatan Fondasi Transformasi		Akselerasi Transformasi		Ekspansi Global		Mewujudkan Sigi Emas	
5	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	∞	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di wilayah yang berbatasan	Akselerasi transformasi kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosis tem di wilayah yang berbatasan		Pemantapan kerja sama antardaerah berbasis global dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di wilayah yang berbatasan		Paripurna dalam kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ ekosistem di wilayah yang berbatasan	
		∞	Penuntasan RDTR Kabupaten	Akselerasi transformasi penuntasan RDTR Kabupaten		Pemantapan RDTR Kabupaten		Paripurna RDTR Kabupaten	
		∞	Peningkatan pelaksanaan reforma agrarian dan perhutanan sosial	Akselerasi transformasi pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial		Pemantapan dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial		Paripurna pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial	
		∞	Peningkatan ke status jalan nasional (ruas jalan palu-kulawi-gimpu-peana-kalamanta-batas sulsel); peningkatan ke status jalan provinsi (ruas jalan tangarawa-watatu, bangga-lalundu, kulawi-banggaiba-batas sulbar, manggalapi-sausu); serta pembangun an dan peningkatan kapa sitas jalan kabupaten dan desa pada koridor utama untuk menduku ng integrasi rantai pasok domestik (menghubung kan kawasan ekonomi	Akselerasi transformasi peningkatan ke status jalan nasional (ruas jalan palu-kulawi-gimpu-peana-kalamanta-batas sul sel); peningkatan ke status jalan provinsi (ruas ja lan tangarawa-watatu, bangga-lalundu, kulawi-banggaiba-batas sulbar, manggalapi-sausu); serta Pembangunan dan penin gkatan kapasitas jalan kabupaten dan desa pa da koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi)		Pemantapan dalam pening katan ke status jalan nas ional (ruas jalan palu-kulawi-gimpu-peana-kalaman ta-batas sulsel); pening katan ke status jalan provinsi (ruas jalan tanga rawa-watatu, bangga-lalundu, kulawi-bangga iba-batas sulbar, mangga lapi-sausu); serta pemban gunan dan peningkatan kapasitas jalan kabupaten dan desa pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi)		Paripurna dalam peni ngkatan ke status ja lan nasional (ruas jalan palu-kulawi-gimpu-pea na-kalamanta-batas sul sel); peningka tan ke status jalan provinsi (ruas jalan tangarawa-watatu, bangga-lalun du, kula wi-banggaiba-batas sul bar, manggalapi-sausu); serta pemba ngunan dan peningka tan kapasitas jalan kabu paten dan desa pada koridor utama untuk mendukung inte grasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi)	
		∞	Pengembangan transportasi perkotaan dan perdesaan termasuk sistem angkutan umum masal	Akselerasi transformasi pengembangan transportasi perkotaan dan perdesaan termasuk sistem angkutan umum masal		Pemantapan pengembangan transportasi perkotaan dan perdesaan termasuk sistem angkutan umum masal		Paripurna dalam pengembangan transportasi perkotaan dan perdesaan termasuk sistem angkutan umum masal	

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah	Akselerasi transformasi pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah	Pemantapan pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah	Paripurna dalam pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah
		∞ Pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan	Akselerasi transformasi pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan	Pemantapan pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan	Paripurna dalam pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan
		∞ Penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan	Akselerasi transformasi penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan	Pemantapan dalam penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan	Paripurna dalam penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan
		∞ Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	Akselerasi transformasi pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	Pemantapan dalam pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	Paripurna dalam pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
		∞ Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air	Akselerasi transformasi optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air	Pemantapan dalam optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air	Paripurna dalam optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air
		∞ Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir	Akselerasi transformasi penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir	Pemantapan dalam penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir	Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Mewujudkan Sigi Emas
		∞ Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik	Akselerasi transformasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik	Pemantapan dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik	Paripurna dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (biofuel) guna memperbaiki bauran pembangkit listrik
		∞ Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini-grid) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	Akselerasi transformasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini-grid) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	Pemantapan dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini-grid) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	Paripurna dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini-grid) guna memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi Global	Periode IV (2040-2045) Mewujudkan Sigi Emas
	6 Kesenambungan pembangunan	∞ Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan	Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan	Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan	Peningkatan inovasi pembiayaan daerah untuk percepatan dan kesinambungan pembangunan

5.2. Sasaran Pokok

Bagian ini menjelaskan sasaran pembangunan jangka panjang untuk melihat keterkaitan antara sasaran pokok dengan arah kebijakan, serta pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode tersebut. Maka, dengan merujuk pada Permendagri 86 tahun 2017, dimana suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja, beserta target masing-masing.

Prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Sigi dalam RPJPD Tahun 2025-2045, dirancang dalam sasaran pokok pembangunan yang didasarkan pada RPJPD Kabupaten Sigi lebih pada upaya menerjemahkan visi-misi pembangunan jangka panjang dan arah kebijakan hasil dari Kajian Lingkungan hidup Strategis RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai tolok ukur, untuk memudahkan pengukuran pencapaian pembangunan setiap periode dengan tujuan meningkatkan koordinasi antara pelaku pembangunan, sehingga mendapatkan hasil yang dicapai lebih optimal dan meningkatkan keterpaduan dan sinergi terhadap perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait, meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien.

Adapun Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Sigi 2025-2045, sebagai berikut :

Tabel 5.2

**Keterkaitan Antara Visi, Misi, Sasaran Pokok,
Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan
RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045**

No	Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah	Indikator Utama	Target					Ket			
				Pembangunan	Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045				
1	Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Agropokitan Yang Berdaya Saing, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	1 Transformasi Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Transformasi Sosial											
			1	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	SE1.	Kesehatan Untuk Semua :								
			a.	Peningkatan usia harapan hidup		1	Usia Harapan Hidpu (UHH) (Tahun)	72,47	74,65	76,89	78,04	80,39		
			b.	Peningkatan Kesehatan ibu dan anak			2	Kesehatan ibu dan anak :						
							a	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	0,032	0,030	0,028	0,026	0,025	
							b	dan sangat pendek) pada balita (%)	12	8,71	2,91	2,86	2,80	
			c	Penurunan penderita tuberkulosis			3	Penganan Tuberkulosis :						
							a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	45,19	82,19	95,48	95,53	95,59	
							b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (succe-ss rate) (%)*	83,09	92,79	98,09	98,14	98,20	
			d	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,95	98,99	99,04	99,09	99,15	
			2	Peningkatan kualitas pendidikan	SE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata :								
			a.	Peningkatan wajib belajar 12 tahun			5	Hasil Pembelajaran						
							a	Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:						

No	Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah	Indikator Utama		Target					Ket			
				Pembangunan	Pembangunan		Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045				
						i).	Literasi Membaca	300	320	350	380	405			
						ii).	Numerasi	300	328	350	390	438			
						b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	16	23	25	25	25			
						c	Harapan lama sekolah (tahun)	14	14	15	16	16			
			b	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi											
			c	Peningkatan lulusan yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi			6	Persentase pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	25	35,72	46,45	57,17	67,9		
			3	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	SE3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif									
			a	Pengentasan kemiskinan			7	Tingkat kemiskinan (%) *)	11,5	12,07	11,47	10,97	10,19		
			b	Peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan			8	Cakupan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (%)	50	62,38	74,8	87,18	99,5		
			c	Peningkatan penyandang disabilitas bekerja di sektor formal			9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	30	40	50	60		
			Transformasi Ekonomi												
			4	Peningkatan Iptek, Inovasi dan Produktif Ekonomi	SE4.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi									
			a	Peningkatan kontribusi industri pengolahan		10	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12	16	20	24	28			
			b	Peningkatan kontribusi industri pariwisata		11	Pengembangan Pariwisata:								
						a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makan dan minum (%)*)	0,51	2,38	4,25	6,123	8			
						b	Jumlah tamu wisatawan (ribu)	40	50	70	85	100			
			c	Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif											

No	Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah		Indikator Utama		Target					Ket
				Pembangunan		Pembangunan		Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			d Peningkatan produktivitas UMKM, koperasi dan BUMD			12	Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD :						
						a	Proporsi jumlah UMKM Non Pertanian	31	40	60	80	100	
						b	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	0,01	0,06	0,11	0,16	0,21	
						c	Rasio kewirausahaan (%)	2	3,5	5	6,5	8	
						d	Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1	3,25	5,5	7,75	10	
						e	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2	2,9	3,8	4,7	5,6	
			e Penurunan Tingkat Pengangguran			13	Tingkat pengangguran terbuka	2,04	1,29	0,73	0,68	0,62	
			f Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			14	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	55,76	58,07	60,38	62,69	65	
			g Peningkatan Penguasaan IPTEK			15	Tingkat Penguasaan IPTEK						
						a	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDRB)	0,2	0,4	0,6	0,8	1	
						b	Peringkat indeks inovasi (skor)	50,75	68,42	92,23	93,2	100	
			5 Peningkatan Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi	SE5.	Penerapan Ekonomi Hijau								
			a Peningkatan kontribusi ekonomi hijau			16	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
							Indeks Ekonomi Hijau	70	75,16	80,32	85,48	90,65	
			6 Peningkatan transformasi digital	SE6.	Transformasi Digital								
			Peningkatan penguasaan teknologi IT			17	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi *	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	
			7 Peningkatan Ekonomi Domestik dan Global	SE7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global								

No	Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah		Indikator Utama		Target					Ket
				Pembangunan		Pembangunan		Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
			a Peningkatan modal tetap bruto			18	Pembentukan modal tetap bruto (%) PDRB	48,27	46,20	44,13	42,06	40,22	
		3 Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, supremasi hukum, stabilitas dan kesinambungan pembangunan	Transformasi tata kelola										
			8 Peningkatan tatakelola yang berintegritas dan adaptif	SE8.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								
			a Peningkatan kualitas regulasi yang adaptif			19	Indeks Reformasi Hukum*	65	75	85	100	100	
			b Peningkatan tatakelola berbasis elektronik			20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3,5	4	4,5	5	
			c Peningkatan kualitas layanan publik			21	Indeks Pelayanan Publik	3,54	3,905	4,27	4,64	5	
			d Peningkatan integritas dalam tata kelola			22	Indeks Integritas	65	68,61	72,22	75,83	79,44	
			Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansi, Stabilitas Ekonomi Macro										
			9 Peningkatan kualitas hukum, keamanan dan demokrasi	SE9.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansi								
			a Peningkatan kualitas pembangunan hukum			23	Indeks Pembangunan Hukum	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	
			b Peningkatan kualitas keamanan			24	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	70,63	72,97	75,31	77,65	80	
			c Peningkatan kualitas demokrasi										
			10 Stabilisasi Ekonomi Macro	SE10.	Stabilitas Ekonomi Macro								
			a Peningkatan ratio pajak daerah terhadap PDRB			25	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,60	0,69	0,78	0,87	0,95	
			b Indeks ketahanan daerah			26	Indeks ketahanan daerah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	
			c Stabilisasi Inflasi			27	Tingkat inflasi (%)	5	4,5	4	3,5	3	
			11 Peningkatan diplomasi dan HANKAM	SE11.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertanyaan Berdaya Gentar Kawasan								
			a Peningkatan kualitas diplomasi			28	Indeks kepemimpinan kepala daerah	75	76,5	77,5	78,75	80	

No	Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah	Indikator Utama	Target					Ket	
				Pembangunan	Pembangunan		Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039		Target 2045
		4 Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Handal	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi									
			12 Peningkatan kualitas beragama dan kebudayaan	SE12. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju								
			a Peningkatan pembangunan kebudayaan			29	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)	50	54,54	59,08	63,62	68,15
			b Peningkatan kerukunan beragama			30	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	75	77,3	79,6	81,9	84,2
			13 Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender	SE13. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif								
			a Peningkatan kualitas keluarga			31	Indeks pembangunan kualitas keluarga	60	65	70	75	80
			b Penurunan ketimpangan gender			32	Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,44	0,35	0,31	0,24	0,15
			14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	SE14. Lingkungan Hidup Berkualitas								
			a Peningkatan volume ekspor			33	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	0,4	0,49	0,58	0,67	0,75
			b Peningkatan kualitas lingkungan hidup			34	Kualitas lingkungan hidup :					
						a	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	70	71,53	73,06	74,59	76,12
						b	Ruma tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10	22,5	35	47,5	60
						c	Pengelolaan sampah:					
							Timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (%)	48,98	91,78	91,83	91,88	91,94
			15 Peningkatan ketahanan bencana	SE15. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Ildim								
			a Pengurangan resiko bencana			35	Indeks Resiko Bencana (IRB)*	42,9	33,15	29,11	29,06	29
			b Penurunan emisi GRK			36	Presentase penurunan emisi GRK (%):					
						a	Kumulatif	28	33,88	39,78	45,64	51,51
						b	Tahunan	32	44,25	56,50	68,75	80,98
		5 Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi									
			16 Peningkatan kapasitas ketahanan energi, air dan pangan	SE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan								
			a Peningkatan ketersediaan energi, air dan pangan			37	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
						a	Kebutuhan Energi					
							Konsumsi listrik perkapita (kwh)*	30,117	31,242	32,367	33,717	34,617
						b	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	9,05	7,31	5,57	3,83	2,1
						c	Ketahanan Air					
							Kapasitas air baku (m3/detik)*	0,3	0,98	1,66	2,34	200
							Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	30	47,5	65	82,5	100

No	Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah	Indikator Utama		Target					Ket
				Pembangunan	Pembangunan		Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
		6 Kestinambungan Pembangunan	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Wilayah 17 Kota dan Desa maju, inklusif dan berkelanjutan		SE17. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
						38 Kota dan Desa maju, inklusif dan berkelanjutan						
						a Rumatangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	85,48	92,51	100	100	100	
						b Proporsi kontribusi PDRB wilayah kabupaten / kota terhadap provinsi	3,30	3,73	4,16	4,59	5	
						c Indeks infrastruktur daerah	0,40	0,46	0,52	0,58	0,64	
						d Presentase Desa mandiri (IDM) (%)	10,42	23,99	37,56	51,13	64,71	
						e Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi	58	62	78	81	100	

Tabel 5.3

**Keterkaitan Indikator Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah
dan Kabupaten Sigi**

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET RPJPD PROV. SULTENG TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJPD KAB. SIGI TAHUN 2025-2045	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	69.20	72.85	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,47	80,39
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	174	22	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	325,2	301,3
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14	5	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12	2,80
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis dan Eliminasi Schistosomiasis:			Penanganan Tuberkulosis		
				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	100	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	45	95,59
				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	100	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	83,09	98,20
				c) Prevalensi Schistosomiasis <1	<1	<1			
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99.5	99.5	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	98,95	99,15

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET RPJPD PROV. SULTENG TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJPD KAB. SIGI TAHUN 2025-2045	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
				nasional untuk:			kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Membaca	396	485	Literasi Membaca	20,13 – 44,64	63,97 – 65,97	Literasi Membaca	300	405
	- Matematika	404	490	Numerasi	14,45 – 34,86	58,63 – 60,63	Numerasi	300	438
	- Sains	416	487						
	b) Rata – rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)	9,46	12	b) Rata – rata Lama Sekolah (Tahun)	9.26	9.91	b) Rata – rata Lama Sekolah (Tahun)	16	25
	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,37	14,81	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.70	14.50	c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14	16
				d) Angka Melek Huruf penduduk Usia diatas 15 Tahun (%)	99.28	100			
				e) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Sederajat (%)	75	100	Persentase pekerjaan lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	25	67,9
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas Pendidikan tinggi (%)	12,57	12,57 – 14,67	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah/SMK yang terserap di dunia kerja dan industri (%)	62.25	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	25	67,9
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,54-12,20	5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,5	10,19
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,33 – 33,86	80,96	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten	50	99,5
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	30	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	50	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	60
11.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (%)	40,97 – 41,45	86,28	Rasio PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (%)	12	28

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET RPJPD PROV. SULTENG TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJPD KAB. SIGI TAHUN 2025-2045	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
13	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)*	4,07-8,38	10,18	Jumlah tamu wisatawan	40	100
	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (Rp)	1,2T – 2,0T	2,54T – 3,0T			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,3	5	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	12,33	20,34	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten (%)	31	100
	b) Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (Agst 2022)		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	2,44	9	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level Kabupaten (%)	0,01	0,21
			8	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,82	6,19	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2	8
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1 -2021	10	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,29	7	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1	10
	d) Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,26	5,48	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2	5,6
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,2 - 2,9	1,14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,04	0,62
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,3	69,5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,76	65
17.	Tingkat Penguasaan IPTEK:			Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)	0,28 -2022	2,2 – 2,3						
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (Peringkat)	75 -2022	30 besar	a) Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	Peringkat Indeks Inovasi (Skor)	50,75	100

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET RPJPD PROV. SULTENG TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJPD KAB. SIGI TAHUN 2025-2045	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
							(%)		
19.	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3
20.	Biaya logistik (% PDB)	16,9 -2019	9	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,36	4,81	Pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi		
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,4	36,8	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	48,27	40,22
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26 – 38,36	90,2	Indeks reformasi hukum	65	100
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,58	48,92	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Provinsi (%)	2,26	5	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Provinsi (%)	3,30	5
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64	100	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66,32	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	85,48	100
				c) Indeks Desa	0,27	9,66	b) Persentase Desa Mandiri (%)	10,42	64,71
				a. Indeks Infrastruktur Daerah	0,64	0,94			
				b. Rasio konektivitas simpul transportasi provinsi	0,61	0,85			
				c. Indeks williamson	1,45	0,35			
24.	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum	50,55-62,0	76,55	Indeks perencanaan Pembangunan daerah	80	100
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Persentase Pembiayaan Inovatif - Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah	3,15 “Baik” 5 3,60 81-90	5 50 4,30 91-100	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	5
26.	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	3,54-3,60	5,00	Indeks Pelayanan Publik	3,54	5
				Indeks Reformasi Birokrasi	70	100-115	Indeks Integritas	65	79,44
27.	Anti Korupsi			Anti Korupsi					
	a) Indeks Integritas Nasional	71,94 -2022	96,98	Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,58	85,02			
	b) Indeks Persepsi Korupsi	34	60	-					
28.	Indeks Pembangunan Hukum:	0,6 -2021	0,84	Indeks Kualitas Kebijakan	69	100	Indeks Pembangunan Hukum	0,4	0,6

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET RPJPD PROV. SULTENG TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJPD KAB. SIGI TAHUN 2025-2045	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
29.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	62,8 -2020	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	53,25	70,63	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat tinggalnya (%)	70,63	80
30.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	(> 80) Tinggi	90,00			
31.	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK(%)	0,3-0,97	0,3	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,60	0,95
32.	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1	Tingkat Inflasi (%)	2,35-3,8	1,2 - 3,9	Tingkat Inflasi (%)	5	3
							Indeks ketahanan daerah	Rendah	Tinggi
							Indeks kepemimpinan kepala daerah	75	80
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	12,85	60,5	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHK (%)		
	b) Aset Dana Pensiun/ PDB (%)	7,6	60	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04	0,08	Aset Dana Pensiun/PDRB ADHK		
	f) Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	c) Total Kredit/PDRB (%)	13,3	57,4	Total Kredit/PDRB ADHK (%)		
34.	Inklusi Keuangan (%)	91	98	Inklusi keuangan (%)	85,05	97,49	Inklusi keuangan (%)		
35.	Asia Power Index (Diplomatic Influence):	60,4 -2023	75,0-80,0	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	60-79	90-100	Pengaruh Diplomasi	75	80
36.	Asia Power Index (Military Capability):	14,6 -2023	45	Indeks Ketahanan Wilayah	Kurang Tangguh	Sangat Tangguh	Indeks Infra Struktur Daerah	0,40	0,64
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,71	84,21	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	50	68,15
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	82,39 - 82,44	89,85- 90,42	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75	84,2
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 -2022	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,0-66,33	66,14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60	80
				a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (skala 0-100)	60	100			
				b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per wanita)	2,12	2,2			
				c. Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	65	100			
				d. Persentase kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14	5			
				e. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Specific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun)	30/1000	5/1000			
40.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 -2025	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,42 - 0,44	0,356	Indeks Ketimpangan Gender	0,44	0,15

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET RPJPD PROV. SULTENG TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET RPJPD KAB. SIGI TAHUN 2025-2045	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,35 -2020	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,6	0,708	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,4	0,75
42.	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,42 -2020	76,12	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,18	84,4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
				b) Persentase Luas Genangan yang tertangani (%)	13	26,49	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70	76,12
				c) Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)					
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70	d) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	32,53	47,31	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10	60
	c) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13%Terdaur ulang)	90 (35%Terdaur ulang)	c) Pengelolaan Sampah			c) Pengelolaan Sampah		
				- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) dalam Ton	450,714,44	669,739,43	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	48,98	91,94
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	0,138	0,138			
43.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi					
	Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	588 - 2.250	6.970	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	30,117	34,617
				- Intensitas Energi Primer (\$BM/Rp milyar)*	189	200			
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)	6,2	2,1	b)Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,05	2,45	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,05	2,1
	c) Ketahanan Air			d) Ketahanan Air					
	- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)*	63,45	200	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,55	21,5	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,3	200
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100	-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	28,82	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30	100
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,60	90,83	Indeks Risiko Bencana (IRB)	42,9	29
45.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
	a. Kumulatif	28,12	51,51	a) Kumulatif	19,76	48,81	Kumulatif	28	51,51
	b. Tahunan	32,65	80,98	b) Tahunan	28,94	76,27	Tahunan	32	80,98

5.3. Upaya transformasi super prioritas (Game changers)

Game changer dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap suatu tindakan atau cara berfikir. Dengan demikian upaya transformasi super prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 dapat dimaknai sebagai tindakan, kegiatan atau transformasi pada bidang tertentu yang super prioritas untuk dilaksanakan, karena akan berdampak besar terhadap perwujudan Kabupaten Sigi sebagai daerah agropolitan yang dapat bersaing dengan wilayah lain.

Adapun upaya transformasi super prioritas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim terutama pada daerah terpencil
2. Percepatan penanganan penurunan ketimpangan antar wilayah
3. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka
4. Percepatan mewujudkan Kabupaten Layak Anak
5. Pengembangan pariwisata berbasis pertanian
6. Optimalisasi pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah
7. Percepatan penanganan stunting
8. Penunjang Ibukota Negara

Pengembangan tata kelola pemerintahan serta penguatan kapasitas aparatur daerah serta lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi.

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sigi Periode 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan 20 tahun kedepan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahun kedepan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan dapat dijadikan tolok ukur pembangunan jangka panjang yang dijabarkan dalam 4 periode pembangunan jangka menengah. Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan konsistensi perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan mekanisme perubahan untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sigi 2025-2045, yang dijabarkan sebagai berikut:

6.1. Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sigi dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip kerangka kerja logis pembangunan, pemanfaatan Kerangka Kerja Logis agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif.

Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.

Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir dalam suatu

rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian, lembaga /daerah/ pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, kerangka kerja logis dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

6.2. Pendanaan Dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Sigi, RPJMD dan RKPD, didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan

pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Pengintegrasian sistem elektronik terpadu diperlukan guna mewujudkan tata kelola data pembangunan berbasis bukti.

1. Pengendalian tahap Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Sigi ke RPJMD Kabupaten Sigi, dokumen RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah Perangkat Daerah serta penyelarasan RPJPD provinsi ke dalam dokumen RPJPD kabupaten (ii) dan penetapan konsistensi perencanaan penganggaran; serta (iii) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dalam dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dalam dokumen rencana kerja tahunan Perangkat Daerah; (ii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan serta (iii) identifikasi risiko pembangunan perencanaan dan mitigasinya.

2. Pengendalian tahap pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah baik yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun sasaran pembangunan nasional.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi serta kelembagaan pengendalian agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif.

6.4. Sistem Insentif

Penerapan sistem insentif (reward) diperlukan dalam rangka mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan. Sistem insentif tersebut diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran yang diberikan berdasarkan kinerja Perangkat

Daerah dan lembaga nonpemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain berdasarkan aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator kinerja utama, pencapaian program prioritas dan inovasi-inovasi pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6.5. Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko, karena pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun. Secara singkat, proses manajemen risiko merupakan penerapan kerangka kerja manajemen risiko pada tiap-tiap jenis risiko yang secara spesifik memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ke tujuh manajemen risiko bahwa manajemen risiko adalah khas bagi penggunaannya. Walaupun penerapan proses manajemen risiko bersifat khas untuk masing-masing risiko, tetapi secara metodologis, penerapan manajemen risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 6.1

Proses Manajemen Risiko



6.5.1 Penetapan Konteks (Establishing The Context)

Menentukan konteks berarti menentukan batasan atau parameter internal dan eksternal yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan risiko, menentukan lingkup kerja, dan kriteria risiko untuk proses-proses selanjutnya. Konteks yang ditetapkan haruslah meliputi semua parameter internal dan eksternal yang relevan dan penting bagi perangkat daerah. Dalam penetapan konteks akan banyak ditemui kesamaan parameter dengan proses sebelumnya, yaitu ketika merencanakan kerangka kerja manajemen risiko. Akan tetapi, dalam proses manajemen risiko, parameter ini akan ditelaah lebih rinci, khususnya yang terkait dengan lingkup suatu proses manajemen risiko tertentu.

Konteks internal memperhatikan sisi internal perangkat daerah, seperti struktur perangkat daerah, kultur dan proses perangkat daerah, kapabilitas dalam artian sumber daya yang dimiliki, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perangkat daerah.

Konteks eksternal mendefinisikan Sisi eksternal perangkat daerah yaitu pesaing, otoritas, lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, teknologi dan keadaan alam serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perangkat daerah.

Konteks manajemen risiko memperhatikan bagaimana manajemen risiko diberlakukan dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan di masa yang akan datang.

Terakhir, mendefinisikan parameter yang disepakati bersama untuk digunakan sebagai kriteria risiko yang dianggap relevan, sesuai dengan proses bisnis dan kepentingan organisasi.

6.5.2 Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko potensial apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perangkat daerah;
- b. Analisa risiko, menganalisis kemungkinan kejadian dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi; dan
- c. Evaluasi risiko: membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan;

6.5.3 Penanganan Risiko (Risk Treatment)

Dalam menghadapi risiko pada umumnya terdapat empat penanganan yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah:

- a. Menghindari risiko (risk avoidance);
- b. Mitigasi risiko atau mengurangi risiko (risk reduction), dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak;
- c. Transfer risiko atau pengalihan kepada pihak lain (risk sharing/tranfeö; dan
- d. Menerima risiko (risk acceptance).

Ketiga proses besar tersebut didampingi Oleh dua proses pendukung untuk memastikan keberhasilan dan kekinian manajemen risiko, yaitu:

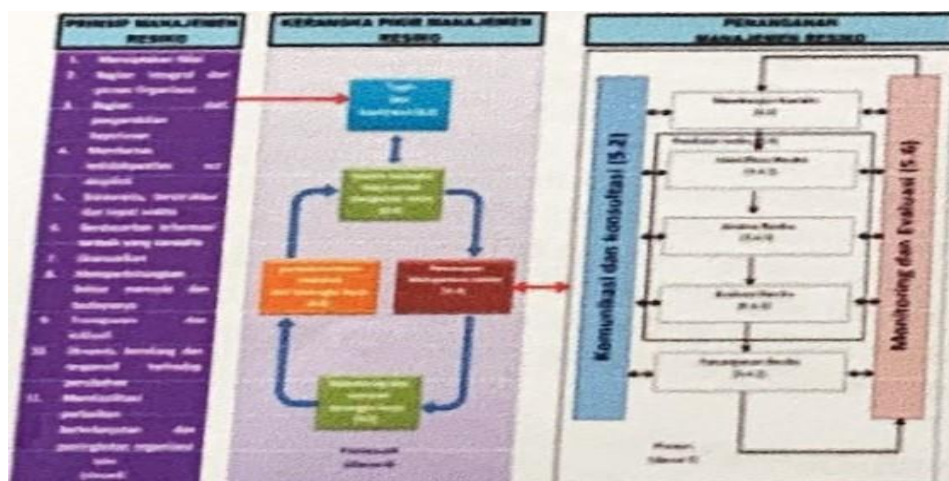
- Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang penting mengingat prinsip manajemen risiko yang kesembilan menuntut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, dimana manajemen risiko harus dilakukan Oleh seluruh bagian perangkat daerah dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders perangkat daerah. Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat kegiatan manajemen risiko menjadi tepat sasaran.

- Monitoring dan Review

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko.

Secara umum hubungan antara prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko adalah sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut di bawah ini.



Gambar 6.2

Hubungan antara Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko

Prinsip dasar Manajemen Resiko seperti komitmen pemimpin, penilaian resiko yg sistematis, identifikasi resiko, evaluasi resiko, pengelolaan resiko, komunikasi dan konsultasi serta review dan perbaikan berkelanjutan.

Peningkatkan kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan (modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi yang belum optimal

Peningkatan kualitas dan kuantitas tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas serta pelaporan

Peningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan internal yang mempertimbangkan persepsi dan nilai mereka serta hubungan dan komitmen kontraktual

Peningkatan strategi sasaran dan kebijakan, interdependensi dan interkoneksi, persepsi dan nilai budaya perangkat daerah.

Secara geografis survey kepuasan masyarakat akan terjadi 2 model antara SKM di daerah lembah dengan di daerah pegunungan

Indikator pengelolaan keuangan daerah adalah indikator gabungan dari konsekuensi perencanaan asset dan pengelolaan keuangan yang memungkinkan terjadinya persepsi.

6.6. Mekanisme Perubahan

Target dalam dokumen RPJPD dimungkinkan untuk disesuaikan dan dimutakhirkan apabila terjadi keadaan force majeure berupa perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana serta deviasi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Pemutakhiran target didasarkan atas evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dokumen RPJPD akan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen lain dibawahnya. Setiap calon kepala daerah hendaknya memperhatikan arah pembangunan RPJPD sehingga setiap RPJMD yang merupakan tahapan pencapaian RPJPD akan menjadi alat kesinambungan pelaksanaan dokumen RPJPD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.





RPJPD

2025 - 2045

